



WALI KOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pujian dan kesyukuran yang paling tinggi hanya milik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikanNya pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bukittinggi Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah LKjIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 sebagai tolak ukur atas capaian kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2023 dan capaian kinerja RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026.



LKjIP Kota Bukittinggi tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Tahun ke-1 (satu) implementasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026. Tahun ini merupakan tahun penuh motivasi yang menjadi pondasi dasar pemerintah Kota Bukittinggi untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemic Covid-19. Sejalan dengan slogan Nasional yakni "*Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat*" yang mencerminkan harapan bagi seluruh masyarakat Kota Bukittinggi agar senantiasa dengan semangat tinggi dalam bertransformasi untuk terus bertumbuh di tengah tantangan pasca pandemi covid-19.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2023 telah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, meskipun secara regional dan nasional, pembangunan daerah dipenuhi tantangan dan isu krisis ekonomi global. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengerahkan segala sumber daya yang ada, menghimpun pikiran, ide dan gagasan, sehingga roda kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik khususnya perekonomian dan kesehatan.

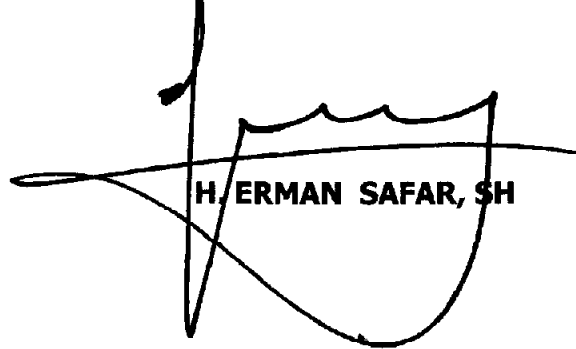
Mengusung visi "***Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah***", melalui 7 (tujuh) misi yang ditunaikan, yakni: hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan, hebat dalam sektor pendidikan, hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan, hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olahraga, hebat dalam tata kelola pemerintahan, hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan, dan hebat

dalam sektor pertanian, Kita optimis bahwa kedepan Bukittinggi akan mensejahterakan seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

Sekali lagi, dengan niat tulus dan ikhlas serta kerja keras semua pihak, Bukittinggi Hebat akan mewujudkan Bukittinggi yang *Baladatul Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur* yakni Bukittinggi yang dikumpulkan atasnya kebaikan dan kebaikan pula bagi masyarakatnya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Bukittinggi, Maret 2024

WALIKOTA BUKITTINGGI



H. ERMAN SAFAR, SH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi (LKjIP) tahun 2022 menyajikan informasi atas pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam penetapan kinerja Tahun 2022. capaian tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur sipil negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembaharuan sistem administrasi Negara.

Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Keberhasilan/ kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian 11 Tujuan, 25 sasaran strategis dan 44 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022.

Adapun rincian pencapaian misi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

MISI 1: HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Untuk pencapaian misi 1 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan dengan 3 tujuan dan 5 sasaran yang diukur dengan 9 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terciptanya ekonomi kerakyatan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	3	4,68	156
			Indeks Gini	0,264	0,317	-19,80
	Terciptanya ekonomi yang merata					
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah		Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	3	4,55	152 %
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13.509	13.633	100,91
	Meningkatnya investasi hijau		Pertumbuhan PMTB (%)	4,2	1,71	41%
			Persentase realisasi investasi hijau (%)	60	20,14 %	33,56
	Terbangunnya infrastruktur hijau	Indeks daya saing infrastruktur	76	73,72	97 %	
	Menurunnya	Tingkat kemiskinan	4,48	4,46	100,44	

kemiskinan	(%)				
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,18	4,9	131,75%	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 1</i>				88.09%	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 9 indikator kinerja utama adalah 88.09%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

MISI 2: HEBAT dalam Sektor Pendidikan.

Untuk pencapaian misi 2 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan dengan 1 tujuan dan 1 sasaran. Tujuan dan sasaran strategis tersebut diukur dengan 4 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	81,14	81,42	100,34
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,56	11,63	101%
			Harapan lama sekolah (Tahun)	14,99	14,99	100%
			Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	48,00	88,30	183,95 %
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 2</i>						121.32%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 121.32%, termasuk kategori memuaskan.

MISI 3: HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.

Untuk pencapaian misi 3 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan dengan 1 tujuan dan 7 sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut memiliki 11 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,48	51,77	81,55%
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	74,85	74,82	99,96 %

masyarakat	(Tahun)			
	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,7056	0,6841	96,95
	Prevalensi Stunting (%)	13,3	16.8	126,31 %
Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	51,89	30	63,83 %
Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	37,36	22,38	59.90
Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,64	87,89	103,83
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	73	89.09	122.04 %
	Persentase pengurangan sampah	26	7.09	27,26 %
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,50	60.19	98%
Meningkatnya Kenyamanan Kota	Indeks Kenyamanan Kota	3,15	3,48	106,36
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 3</i>				89.63%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 11 indikator kinerja utama adalah 89.63%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

MISI 4: HEBAT dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga.

Untuk pencapaian misi 4 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 dengan 2 tujuan dan 3 sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut memiliki 7 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK		Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori baik	52,71	-
	Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.		Indeks pembangunan olahraga	kategori baik	-	-
		Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,34	6,12	141%

inovatif	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	1	12,8	120%
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	559.316	1,262,590	226 %
Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	30	52,31	-
Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	Peringkat 3	-	-
Rata-rata Capaian Indikator Misi 4				162.33%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 7 indikator kinerja utama adalah 162.33%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

MISI 5: HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan

Untuk pencapaian misi 5 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan dengan 1 tujuan dan 6 sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut memiliki 6 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria B	Kriteria B	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	75,57	71,66	94,82%
			Nilai EKPPD	32,323	32,293	99,95
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Indeks integritas pemerintah daerah	76	77,49	102 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	85,25	90,80	106,51 %
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD	21,91	18,73	85,48%

	terhadap Pendapatan (%)	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 5</i>		98.12%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 98.12%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

MISI 6: HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan

Untuk pencapaian misi 6 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan dan 3 sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut memiliki 4 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini;

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya kesejahteraan sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori baik	86,89	100%
		Meningkatnya kehidupan keagamaan	Indeks kesalehan sosial (%)	84,2	85,109	101,32
		Meningkatnya kehidupan Sosial	Persentase Penurunan PPKS (%)	2	-4,495	-224,75
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	58,0	53,57	92,36
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 6</i>						17.23%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 6 yang diukur melalui pencapaian 4 indikator kinerja utama adalah 17.23%, termasuk kategori keberhasilan kurang baik.

MISI 7: HEBAT dalam Sektor Pertanian

Untuk pencapaian misi 7 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan dan 2 Sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut memiliki 6 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,53	2.3	150.33 %

Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	89,33	84,66	94.77%
Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	72,00	71.53	99.35%
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 7</i>				114.81%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja utama adalah 114.81%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2. Pemerintahan Kota Bukittinggi	2
1.3. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bukittinggi	5
1.4 Gambaran Umum Daerah	5
A. Geografi Kota Bukittinggi	5
B. Kependudukan	7
1.5. Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi	7
1.6. Dasar Hukum	14
1.7. Maksud Dan Tujuan	15
1.8. Sistematika Penulisan	18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja	19
2.2. Visi Dan Misi	20
Visi	21
Misi	21
2.3. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023	24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	28
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	29
3.3. Analisis Capaian Kinerja	32
Pertumbuhan Ekonomi	32
Indeks Gini	37
Indeks Pembangunan Manusia	39
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	45
Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	47
Indeks Pembangunan Kebudayaan	48
Indeks Pembangunan Olahraga	50
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	53
Indeks Kesejahteraan Sosial	55
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	56
Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	60
Pertumbuhan PMTB (%)	62

Persentase Realisasi Investasi Hijau (%)	63
Indeks Daya Saing Infrastruktur	64
Tingkat Kemiskinan (%)	67
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	73
Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	78
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	81
Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik.....	85
Indeks Kesalehan Sosial	86
Angka Harapan Hidup (Tahun)	94
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	97
Prevalensi Stunting (%)	100
Indeks Kualitas Air	103
Indeks Kualitas Tutupan Lahan.....	108
Indeks Kualitas Udara	111
Presentase Penanganan Sampah	114
Presentase Pengurangan Sampah	116
Indeks Pembangunan Pariwisata	121
Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi (%)	123
Jumlah Kunjungan Wisata	125
Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	128
Prestasi Pada Event Olah Raga Propinsi	129
Nilai SAKIP	129
Nilai EKPPD	136
Indeks Integritas Pemerintah Daerah	139
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	141
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%).....	148
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	151
Indeks Kenyamanan Kota.....	154
Presentase Penurunan PPKS (%)	155
Indeks Pembangunan Keluarga	159
Indeks Ketahanan Pangan.....	161
Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan.....	164
3.4 Realisasi Anggaran	168

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	170
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	170

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah suatu sistem dari berbagai kegiatan, alat dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur, mengumpulkan data, mengkategorikan, meringkas, dan melaporkan kinerja di instansi Pemerintah. Dalam rangka akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja juga merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian misi dan tujuan kinerja organisasi secara terukur. Ditentukan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara berkala.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP telah mendorong percepatan perwujudan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sistem manajemen pemerintahan, sebagai agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan melalui Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem pemerintahan yang baik. Untuk itu, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus disusun dengan baik secara teknis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai acuan dari implementasi kebijakan nasional dan daerah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk laporan tahun kedua RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026, siap untuk disajikan. Keberadaan LKjIP ini akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Bukittinggi dan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

I.2. PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

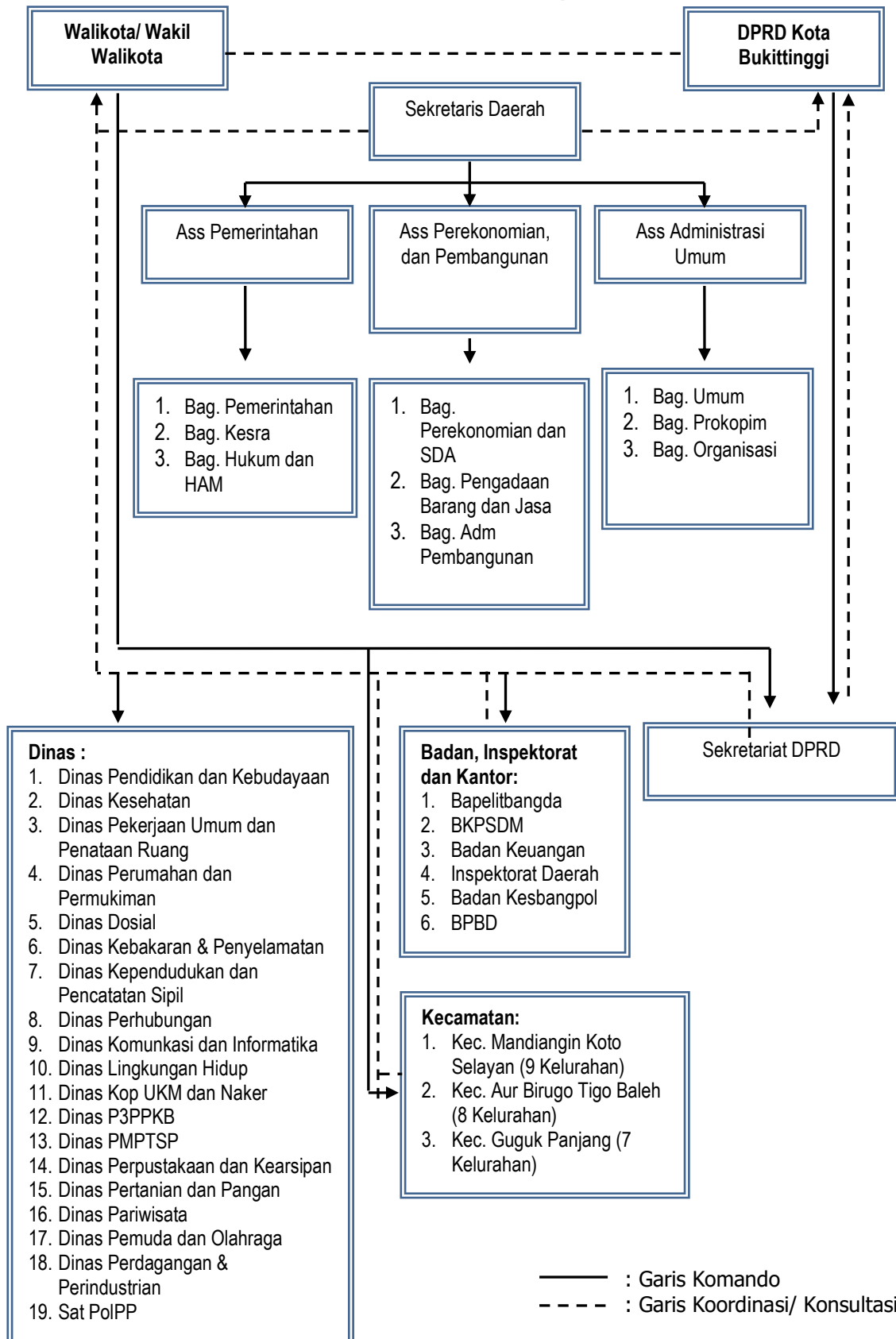
Guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Implementasi peraturan tersebut mendasari pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan,
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat,
 - 3) Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian dan SDA,
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan,
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Umum,
 - 2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
 - 3) Bagian Organisasi.
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh Inspektur;
4. Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Badan;
6. Badan Keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Badan;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
9. Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas;
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas;
12. Dinas Sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas;
13. Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh Kepala Satuan;
14. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas;
16. Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas;
18. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas;

19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, dipimpin oleh Kepala Dinas;
20. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas;
21. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
23. Dinas Pertanian dan Pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
24. Dinas Pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas;
25. Dinas Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas;
26. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dipimpin oleh Kepala Dinas;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana;
28. Kecamatan, dipimpin oleh Camat, terdiri dari 3 Kecamatan:
 - (a) Kecamatan Guguk Panjang membawahi 7 Kelurahan,
 - (b) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh membawahi 8 Kelurahan,
 - (c) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, membawahi 9 Kelurahan.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Bukittinggi selanjutnya dapat dilihat pada Bagan Struktur sebagaimana tercantum pada bagan berikut ini :

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bukittinggi



Sumber Data: Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022

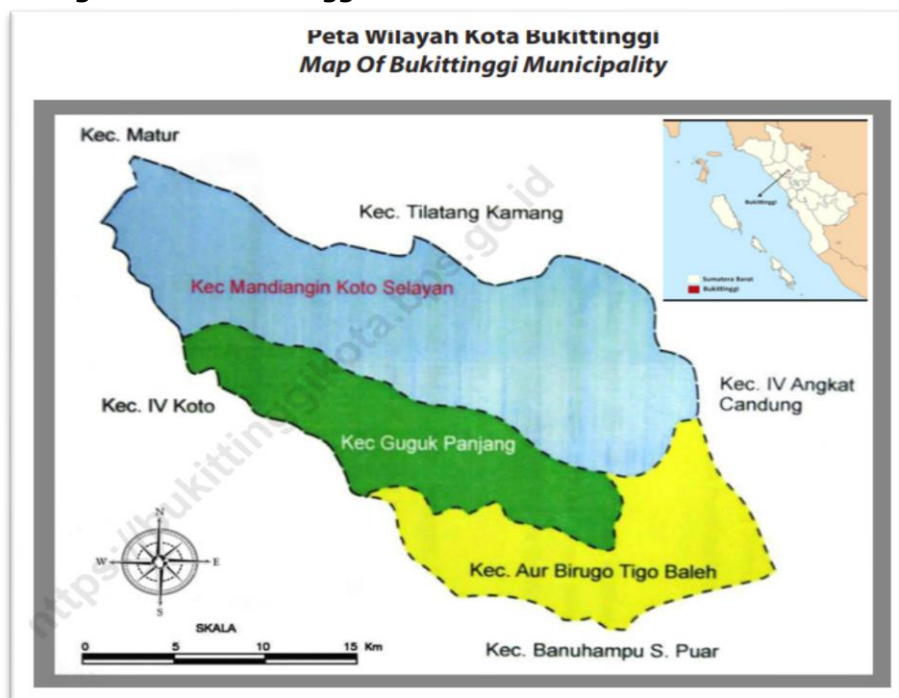
I.3. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOTA BUKITTINGGI

Secara administratif Kota Bukittinggi terbentuk atas Dasar Hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok pokok Pemerintahan Dearah jo Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah;
- 3) Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958, Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1966 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Nomor 391 Tanggal 9 Juni 1947 Tentang Pembentukan Kota Bukittinggi Sebagai Kota Yang Berhak Mengatur Dirinya Sendiri.

I.4. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Geografi Kota Bukittinggi



Sumber : Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter diatas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan Ibukota provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km.

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Tabel I.4. A Luas Kota Bukittinggi dan Kecamatan di Kota Bukittinggi

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km2)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27	100°, 22' 49" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiingin Koto Selayan	9	12.256	48	100°, 22' 23" BT 0°, 17' 28" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	25	100°, 23' 22" BT 0°, 19' 16" LS
Bukittinggi	24	25.239	100.00	100°, 22' 03" BT 0°, 17' 08" LS

Sumber Data: BPS 2019



Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2022

B. Kependudukan

Secara administratif pemerintahan Kota Bukittinggi terbagi atas 3 kecamatan dan 24 kelurahan dengan sebaran Rukun Tetangga dan Rukun Warga Aktif yang terdiri dari:

Tabel I.4.B. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi berKTP

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Memiliki KTP	
1	2	3	4	
Guguk Panjang	48.618	335.201	33.699	
Mandiingin Koto Selayan	59.478	43.013	41.364	
Aur Birugo Tigo Baleh	30.438	21.635	20.627	
Jumlah / Total	2023	138.534	99.849	95.690
	2022	134.412	96.195	92.459
	2021	130.211	90.846	90.790
	2020	101.745	88.327	88.289
	2019	123.296	85.296	85.289
	2018	121.590	84.845	81.182
	2017	119.183	82.723	77.775

Sumber Bukittinggi Dalam Angka 2024

I.5. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk itu, isu-isu strategis akan dianalisa dengan berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Berikut diuraikan isu-isu strategis pembangunan Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

1. Peningkatan Pengamalan Agama dan Kearifan Lokal

Pemahaman agama dan budaya untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat kota menjadi isu strategis yang sangat penting dimasa mendatang. Sebab, meskipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun dalam implementasinya terlihat belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat. Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negatif yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai*". Falsafah ini telah mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat Minangkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. Kedua, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang

memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia.

Selanjutnya, yang ketiga, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance* dan *clean government*. Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku. Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lainlainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcomes*.

Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan tepercaya, yaitu :

- a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi,
- c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik,
- d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),
- e. Perlunya semua stakeholder untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan masyarakat,
- f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah *brainware* berupa sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Disinilah pentingnya *reinventing government* dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi fokus untuk dioptimalkan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ditinjau dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kecenderungan peningkatan yang stabil dan berada diatas rata-rata IPM Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat maka IPM Kota Bukittinggi berada pada urutan tertinggi kedua setelah Kota Padang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang Kota Bukittinggi yang dibangun sejalan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah. Peningkatan pembangunan daerah yang tidak sejalan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan berdampak kepada peningkatan kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang akan memberikan efek penggandaan terhadap pengembangan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi harus mampu mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bukittinggi sehingga dapat mempertahankan predikat yang sejak lama dikenal sebagai kota pendidikan dan kota yang berbudaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya diukur dengan pengeluaran perkapita masyarakat, peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang diukur melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui peningkatan angka harapan hidup masyarakat Kota Bukittinggi.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/ kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah.

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. Ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan perekonomian daerah yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan.

Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi individu dan masyarakat berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Percepatan pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015, terdapat fenomena pada beberapa negara yang targetnya dikhawatirkan tidak tercapai. Namun dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan agenda global pasca MDGs, kekhawatiran ini tidak terjadi.

Agenda SDGs ini relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2015, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini.

Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan :

- a. penurunan tingkat pengangguran;
- b. ketersediaan tenaga kerja terampil;
- c. peningkatan pendapatan masyarakat,
- d. meningkatnya produktivitas usaha;
- e. pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

5. Pengembangan Kepariwisata

Kegiatan pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan perekonomian Kota Bukittinggi. Sektor pariwisata memberikan kontribusi paling besar pada PAD Kota Bukittinggi dan berkontribusi besar terhadap perkembangan sektor-sektor pada PDRB Kota Bukittinggi yang berkaitan dengan aktifitas pariwisata. Oleh karena itu Perkembangan Kota Bukittinggi akan sangat dipengaruhi oleh pengembangan sektor kepariwisataan sebagai sektor dominan dan pilar penting pembangunan kota.

Sebagai sektor utama dan dominan dalam pengembangan perekonomian daerah Kota Bukittinggi, sektor pariwisata menjadi isu strategis pengembangan Kota Bukittinggi. Pengembangan daya tarik objek wisata dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata menjadi prioritas pengembangan pariwisata kedepan. Pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi secara jangka panjang diarahkan kepada pengembangan pariwisata yang berbudaya. Melalui konsep pariwisata yang berbudaya, Kota Bukittinggi dapat

mengembangkan kebudayaan dan kearifan lokal menjadi bagian atraksi wisata serta melindungi kebudayaan daerah dari masuknya kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya daerah Kota Bukittinggi.

6. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan kota kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur Kereta Api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi masal yang murah dan representatif. Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Di samping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep *smart city*. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

7. Peningkatan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Pesatnya perkembangan Kota Bukittinggi berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan ruang bagi peruntukan infrastruktur dan kegiatan perekonomian. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi telah mengatur peruntukan ruang Kota Bukittinggi untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan Kota

Bukittinggi serta mengendalikan angka alih fungsi lahan Kota Bukittinggi. Keberlangsungan sumber daya alam secara jangka panjang harus tetap dipertahankan untuk menyediakan lingkungan yang sehat untuk generasi berikutnya dan menjaga Kota Bukittinggi dari ancaman bencana alam. Namun demikian, menjaga keberlangsungan sumber daya alam juga tidak menghalangi perkembangan daerah. Rencana tata ruang wilayah menyediakan Batasan Batasan terhadap pengembangan infrastruktur tanpa menghambat perkembangannya.

8. Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan. Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep *green city* juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

I.6. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini didasarkan kepada :

- 1) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
- 12) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- 13) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 15) Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 16) Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

I.7. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan evaluasi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan visi dan misi

berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kota. Akhirnya penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat membantu dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

I.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bukittinggi. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bukittinggi. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut:

I.1. Latar Belakang

Berisikan latar belakang penyusunan LKjIP

I.2. Pemerintah Kota Bukittinggi

Berisikan tentang struktur pemerintahan Kota Bukittinggi

I.3. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bukittinggi

Berisikan tentang dasar hukum pembentukan Kota Bukittinggi

I.4. Gambaran Umum Daerah

Penjelasan mengenai tugas dan fungsi beserta struktur organisasi Perangkat Daerah.

I.5. Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi

Penjelasan mengenai isu-isu/ permasalahan-permasalahan strategis yang sedang dihadapi SKPD.

I.6. Dasar Hukum

Berisikan tentang dasar hukum penulisan LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2023

I.7. Maksud dan Tujuan

Berisikan tentang maksud dan tujuan penulisan

I.8.Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai sistematika penulisan LKJIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan sebagai berikut:

II.1. Rencana Strategis

Berisikan penjelasan mengenai rencana strategis yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama tahun 2021-2026.

II.2. Perjanjian Kinerja

Penjelasan mengenai Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Menguraikan metodologi pengukuran penghitungan capaian target kinerja.

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Menjelaskan mengenai hasil pengukuran

III.3. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Tahun 2023;
2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (2021, 2022 dan 2023);
3. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Program/ kegiatan penunjang capaian indikator.

III.4. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



Bab IV Penutup

IV.1. Kesimpulan

Diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Penjelasan mengenai strategi/langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

• Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 pada Tahun 2023 merupakan tahun ketiga. RPJMD Kota Bukittinggi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026. Ditetapkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, diikuti dengan penetapan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 -2026 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2006 – 2025 telah ditetapkan Visi pembangunan jangka Panjang Kota Bukittinggi adalah Visi “Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan pula Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 dan telah dilaksanakan dalam tiga periode jangka menengah. Ketiga Periode tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi No.19 Tahun 2005, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 – 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2010, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradab berdasarkan iman dan taqwa;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
- 4) Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera;

- 5) Mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan.

2.2 VISI

Pelaksanaan RPJMD selama 3 periode telah memperlihatkan hasil yang sejalan dengan RPJPD tersebut. Pada tahun 2021 ini sampailah pada tahapan terakhir untuk melaksanakan semua misi tersebut. Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah mengajukan visi

**"MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT
BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"**

Terwujudnya masyarakat HEBAT berlandaskan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* adalah wujud dari masyarakat Kota Bukittinggi beradab, religius, unggul, berdaya saing tinggi, dan mandiri. Masyarakat yang beradab adalah perwujudan dari masyarakat madani, yang menjunjung nilai kemanusiaan, maju dan hebat dalam teknologi dan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai - nilai Agama. Lebih jauh visi tersebut, Bukittinggi adalah sebagai kesatuan geografis, demografis dan budaya. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Bukittinggi akan bersifat terpadu dalam wilayah yang telah ditetapkan.

HEBAT selain sebagai ungkapan yang menunjukkan keunggulan, ketauladanan dan bermartabat juga merupakan akronim dari:

H = Humanis

E = Entrepreneurship

B = Bijak

A = Agamais/ Adil

T = Tauladan.

Sementara itu, "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" adalah adat yang didasari/ ditopang oleh Syariat Agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Minangkabau. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* adalah kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah. Karena *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* yang kini menjadi identitas kultural orang Minangkabau lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses dan pergulatan yang panjang.

Oleh karena itu, *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan falsafah yang akan menjiwai seluruh upaya pencapaian visi. Artinya falsafah Minangkabau tersebut dijadikan acuan dan panduan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

yang akan disusun dan dilaksanakan mestilah tidak bertentangan dengan norma norma adat yang telah didasarkan pada kitab suci Al Qur'an dan Hadist.

Gambar berikut memperlihatkan keterkaitan Visi RPJPD 2026 Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025			
Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan			
RPJMD 2005-2010	RPJMD 2016-2021	RPJMD 2016-2021	RPJMD 2021-2026
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi unggulan daerah (jasa dan perdagangan, kepariwisataan, pendidikan dan pelayanan kesehatan) yang dijiwai oleh agama dan adat, <i>Syarak Mangato Adaik Mamakai</i>	Terwujudnya Bukittinggi Cerdas, Sehat dan Berekonomi Mapan dengan dilandasi nilai-nilai Agama dan Adat	Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Wisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Menciptakan Bukittinggi HEBAT berlandaskan <i>Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>

Visi RPJMD Kota Bukittinggi memperlihatkan konsistensi kondisi yang diinginkan pembangunan jangka panjang yaitu membangun Bukittinggi berlandaskan kepada Agama dan Budaya alam Minangkabau. Tahun 2025 pembangunan Kota Bukittinggi bercita-cita untuk menjadikan Kota Bukittinggi sebagai kota yang maju berbasiskan kepada *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

2.3 Misi

Visi yang spesifik ini memerlukan penjelasan agar setiap *stakeholders* memiliki satu pemahaman dan pandangan yang sama tentang visi pembangunan yang direncanakan. Untuk itu, Visi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dituangkan ke dalam tujuh Misi sebagai berikut :

2.3.1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan prinsip ekonomi yang sejalan dengan pemikiran Bung Hatta putra bangsa kebanggaan Kota Bukittinggi yang dikenal juga sebagai Proklamator Kemerdekaan RI dan Bapak Koperasi. Konsep yang dibangun dengan ekonomi kerakyatan adalah membangun Kota Bukittinggi berbasiskan kepada usaha ekonomi yang berasaskan kepada kekeluargaan, berkeadilan yang memihak kepada rakyat kecil. Hal ini sangat relevan dengan Visi yang berorientasi kepada membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (*enterprenur*).

Dengan demikian, HEBAT dalam sektor ekonomi kerakyatan berarti berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi yang berorientasi pada keterlibatan

sebanyak mungkin pelaku usaha dan dijiwai prinsip pemerataan dan keadilan. Lebih jauh mengingat pertumbuhan ekonomi konvensional telah menimbulkan *degradasi* sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup maka peningkatan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan antara lain bercirikan rendah karbon, berbasis peningkatan nilai tambah pada sumber daya yang diperbaharui.

2.3.2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan

Pendidikan adalah faktor utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang HEBAT, sebagaimana yang dimaksud Visi RPJPD 2005-2025 dan RPJMD periode 2021- 2026 Kota Bukittinggi. HEBAT dalam sektor Pendidikan mengandung makna bahwa Pendidikan yang akan dikembangkan adalah perubahan perilaku dan membentuk manusia yang berkarakter humanis, berjiwa *enterprenur*, bijak, agamais agar bersifat adil dan pantas menjadi tauladan untuk membangun Kota Bukittinggi Maju sesuai cita-cita RPJPD 2005-2025.

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang demikian, maka semua potensi baik sumber daya manusia, infrastruktur (sarana dan prasarana pendukung), sistem dan proses pendidikan, serta teknologi harus dimanfaatkan secara optimal. Pendidikan berkarakter HEBAT ini akan dikembangkan melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

Selanjutnya, pembangunan pendidikan Kota Bukittinggi juga diarahkan pada meningkatnya kehidupan keagamaan. Hal ini dengan maksud agar pembangunan pendidikan searah dengan penguatan kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat yang berbasiskan ABS-SBK.

2.3.3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Sektor kesehatan dan keberadaan lingkungan hidup yang sehat akan menentukan kualitas kehidupan Kota. Diharapkan dengan kesehatan dan lingkungan yang bersih dan sehat masyarakat Kota Bukittinggi akan lebih produktif. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tentunya upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat menekan penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pembangunan sektor kesehatan dan lingkungan akan menunjang sektor lain untuk juga menjadi lebih baik.

Melalui misi ini pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik yang ditandai dengan komponen kualitas lingkungan yang juga semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan diharapkan maka derajat kesehatan masyarakat juga semakin tinggi. Perbaikan kualitas lingkungan ini diperlukan mengingat secara perlahan telah terjadi degradasi sumber daya air dan meningkatnya timbunan sampah. Penurunan kualitas lingkungan ini mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

2.3.4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Sejak awal RPJPD Kota Bukittinggi telah menetapkan sektor kepariwisataan sebagai sektor unggulan. Namun kontribusi Pariwisata dalam PDRB sulit diketahui mengingat banyak aspek yang terkait yang dapat dikategorikan sebagai bagian kepariwisataan. Mengingat bahwa kota Bukittinggi disebut juga sebagai kota wisata namun berdasarkan indeks Kepawisataan Indonesia Bukittinggi belum termasuk kategori 10 besar. Oleh karena itu diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan pengelolaan wisata Kota Bukittinggi. Aspek-aspek penting yang berkontribusi dalam peningkatan kepariwisataan antara lain aspek lingkungan seperti kesehatan dan kebersihan serta keamanan. Selain itu aspek potensi wisata baik potensi alam maupun buatan perlu digali secara optimal.

Sementara itu di bidang seni budaya pembangunan diarahkan pada pengembangan ekspresi budaya yang dimaksudkan menguatkan budaya Minangkabau yang ABS-SBK. Hal yang sama juga terjadi pada aspek olah raga, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berperan penting dalam mengembangkan olah raga masih perlu dikembangkan.

2.3.5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan

HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan merupakan prasyarat utama pembangunan, baik nasional maupun daerah, termasuk Kota Bukittinggi. Karena kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan. Semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin baik dan cepat tercapainya tujuan pembangunan.

Pengembangan tata kelola pemerintahan yang direncanakan Kota Bukittinggi mengacu kepada *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*, dengan menekankan asas Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Sejalan dengan itu, RPJMN 2020-2024 menggunakan 3 pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Tiga pilar tersebut adalah Aparatur Sipil Negara, Kelembagaan dan Proses Bisnis Organisasi, dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan. Dengan demikian, Kota Bukittinggi juga akan menggunakan 3 pilar ini untuk mencapai misi HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan.

2.3.6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan

Aspek sosial kemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang berhubungan dengan hampir semua aspek lain dalam RPJMD. Pemerataan pendapatan dan akses kepada sumber daya ekonomi untuk membangun ketahanan sosial akan bersentuhan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya hal ini juga berhubungan dengan penyediaan infrastruktur publik, dukungan kepada kaum disabilitas dan perhatian yang tinggi kepada

manula. Peningkatan nilai-nilai sosial keagamaan dan adat istiadat memerlukan dukungan yang intensif dari tokoh adat dan ulama. Pembangunan masyarakat yang HEBAT dalam artian dapat menjadi teladan memerlukan langkah-langkah yang nyata meskipun hasilnya tidak terlihat dalam waktu yang singkat.

2.3.7 HEBAT dalam Sektor Pertanian

Walaupun Bukittinggi identik dengan kota yang berciri perdagangan dan pariwisata, namun masih ada sektor pertanian yang perlu dikembangkan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga masih menjadi perhatian pembangunan untuk periode lima tahun ke depan. Selain itu, pada sub sektor pertanian ini, Kota Bukittinggi juga potensial untuk pengembangan komoditi hortikultura. Konsep yang cocok untuk dikembangkan di kota ini adalah pertanian perkotaan.

HEBAT dalam Bidang Pertanian merupakan misi yang akan membawa Kota Bukittinggi menjadi kota yang kuat, inovatif, produktif dan berkelanjutan di bidang pertanian dan pangan. Untuk itu, melalui misi ini Kota Bukittinggi akan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Untuk mencapai maksud ini, Kota Bukittinggi perlu menetapkan sasaran pembangunan pertanian yakni menuju kota yang ketahanan pangan yang tinggi dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting bagi masyarakat, baik dalam menyediakan kesempatan kerja, kesempatan usaha maupun menyediakan bahan baku bagi sektor ekonomi lainnya, seperti pada industri dan jasa.

2.4. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023

Dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi diuraikan dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023

No	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Tujuan 1 : Terciptanya ekonomi kerakyatan	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	4,63
2	Tujuan 2 : Terciptanya ekonomi yang merata	2	Indeks Gini	Nilai	0,261
3	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	82,00

No	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
4	Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	64,04
5	Tujuan 6 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	%	4,63
6	Tujuan 7 : Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	kategori sangat baik
7	Tujuan 8 : Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	7	Indeks pembangunan olahraga	Nilai	kategori sangat baik
8	Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Nilai	Kriteria BB
9	Tujuan 10 : Meningkatnya kesejahteraan sosial	9	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	kategori sangat baik
10	Tujuan 11 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Nilai	1,72
11	Sasaran 1 : Meningkatnya daya beli masyarakat	11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	Rp.	14.035
12	Sasaran 2 : Meningkatnya investasi hijau	12	Pertumbuhan PMTB (%)	%	5,9
		13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	%	70
13	Sasaran 3 : Terbangunnya infrastruktur hijau	14	Indeks daya saing infrastruktur	Nilai	78
14	Sasaran 4 : Menurunnya kemiskinan	15	Tingkat kemiskinan (%)	%	4,24
15	Sasaran 5 : Meningkatnya kesempatan kerja	16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	6,74
16	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pendidikan	17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Angka	11,78
		18	Harapan lama sekolah (Tahun)	Tahun	15,01
		19	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	Angka	52,00
17	Sasaran 7 : Meningkatnya kehidupan keagamaan	20	Indeks kesalehan sosial (%)	%	84,6
18	Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	21	Angka harapan hidup (Tahun)	Angka	75,30
		22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	Nilai	0,7164

No	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
		23	Prevalensi Stunting (%)	%	11,6
19	Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas air	24	Indeks kualitas air	Nilai	56,09
20	Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan	25	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	39,24
21	Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas udara	26	Indeks kualitas udara	Nilai	84,84
22	Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan sampah	27	Persentase penanganan sampah	%	28
		28	Persentase pengurangan sampah	%	71
23	Sasaran 13 Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	29	Indeks Pembangunan Pariwisata	Nilai	4,42
		30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	%	3
		31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah	880.923
24	Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	Nilai	34
25	Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	33	Prestasi pada Event olahraga Propinsi	Peringkat	Peringkat 2
26	Sasaran 16 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	34	Nilai SAKIP	Nilai	80,00
		35	Nilai EKPPD	Nilai	32,353
27	Sasaran 17 :Terwujudnya pemerintahan yang bersih	36	Indeks integritas pemerintah daerah	Nilai	77
28	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Nilai	87,62
29	Sasaran 19 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	%	20,29
30	Sasaran 20 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	62,25
31	Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota	40	Indeks Kenyamanan Kota	Nilai	3,4
32	Sasaran 22 : Meningkatnya kehidupan Sosial	41	Persentase Penurunan PPKS (%)	%	2,2
33	Sasaran 23 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga	42	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	61,0

No	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
34	Sasaran 24 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	43	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	89,67
35	Sasaran 25 : Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	Nilai	76,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perwujudan dari kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Melalui LKjIP Pemerintah Kota Bukittinggi agar digambarkan upaya dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026. Peraturan Walikota ini mencakup 11 Tujuan 25 Sasaran dan 44 Indikator Kinerja Utama.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan ukuran pencapaian target kinerja kelompok sasaran strategis indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah ukuran kinerja yang sederhana dengan membandingkan tujuan kinerja dengan pencapaian seperangkat indikator kinerja untuk kinerja tujuan strategis.

Pengukuran Indikator Kinerja dan Hasil Pencapaian tersebut digunakan untuk mengukur baik keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian tujuan strategis untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi, serta menganalisis alasan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan strategis diukur dengan pencapaian indikator kinerja kelompok tujuan strategis yang relevan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	> 100%	Memuaskan
2	85% - 99,9%	Sangat Baik
3	75% - 84,9%	Baik
4	55% - 74,9%	Cukup
5	<55%	Kurang Baik

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 11 Tujuan, 25 sasaran strategis dan 44 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan 1 : Terciptanya ekonomi kerakyatan	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,29	4,79	111.66
2	Tujuan 2 : Terciptanya ekonomi yang merata	2	Indeks Gini	0,263	0.255	103.14
3	Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia	81,57	81.42	81.78
4	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.76	51.77	81.19
5	Tujuan 6 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	4.29	4.55	
6	Tujuan 7 : Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori baik	52.71	-
7	Tujuan 8 : Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	7	Indeks pembangunan olahraga	kategori baik	kategori baik	100
8	Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria B	BB	100
9	Tujuan 10 : Meningkatkan kesejahteraan sosial	9	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori baik	Kategori baik	Kategori baik
10	Tujuan 11 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,63	2.62	160,74
11	Sasaran 1 : Meningkatkan daya beli masyarakat	11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13.746	13.859	100.82
12	Sasaran 2 : Meningkatkan investasi hijau	12	Pertumbuhan PMTB (%)	5,5	3,92	98
		13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	20	35,20	176
13	Sasaran 3 :	14	Indeks daya saing	77	80,71	104,82

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Terbangunnya infrastruktur hijau		infrastruktur			
14	Sasaran 4 : Menurunnya kemiskinan	15	Tingkat kemiskinan (%)	4,36	3,92	98
15	Sasaran 5 : Meningkatnya kesempatan kerja	16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,96	4,9	131,75
16	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pendidikan	17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,67	11,64	99,74
		18	Harapan lama sekolah (Tahun)	15,00	12,3	82
		19	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	50,00	58,53	117,06
17	Sasaran 7 : Meningkatnya kehidupan keagamaan	20	Indeks kesalehan sosial (%)	84,4	85,109	101,32
18	Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	21	Angka harapan hidup (Tahun)	75,07	75,33	100,35
		22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,7110	0,6841	96,2
		23	Prevalensi Stunting (%)	12,5	16,8	134,4
19	Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas air	24	Indeks kualitas air	54,17	30	53,48
20	Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan	25	Indeks kualitas tutupan lahan	38,3	22,38	59,9
21	Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas udara	26	Indeks kualitas udara	84,74	83,54	94,53
22	Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan sampah	27	Persentase penanganan sampah	27	38014,48	80,40
		28	Persentase pengurangan sampah	72	7,09	27,26
23	Sasaran 13 Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	29	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,38	6,12	141
		30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	2	22,01	22,01
		31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	587.282	1,041,476	177,34

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
24	Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	32	32	106,6
25	Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	33	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	Peringkat 3	-	-
26	Sasaran 16 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	34	Nilai SAKIP	77.78	71,50	96.42
		35	Nilai EKPPD	3,2338	3,1000	95.86
27	Sasaran 17 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih	36	Indeks integritas pemerintah daerah	76	76.63	100.8
28	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	86.43	90,84	106,51
29	Sasaran 19 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	19.86	17.41	87,66
30	Sasaran 20 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,00	-	-
31	Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota	40	Indeks Kenyamanan Kota	3,3	3.48	110.35
32	Sasaran 22 : Meningkatnya kehidupan Sosial	41	Persentase Penurunan PPKS (%)	2,2	0.1	4.54
33	Sasaran 23 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga	42	Indeks Pembangunan Keluarga	59.5	63,2	106,22
34	Sasaran 24 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	43	Indeks Ketahanan Pangan	89,50	85.1	95.08
35	Sasaran 25 : Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	74.00	73	98.64

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 44 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 23 sasaran strategis yang ditetapkan tahun

2023. Namun demikian tidak seluruh IKU yang turut diperhitungkan dalam mengukur kinerja Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan, untuk IKU tersebut tidak dihitung dalam pencapaian kinerja Tahun 2023 karena indeks tersebut dihitung oleh Kementerian Pendidikan dan Riset sampai tingkat Provinsi.
2. Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan, iKU tersebut tidak dilakukan penghitungan yang baik oleh Perangkat daerah penanggungjawab IKU, sehingga data yang disajikan belum bisa dijadikan sebagai data yang valid.
3. Prestasi pada Event olah raga Propinsi, IKU tersebut tidak dihitung dalam capaian kinerja Tahun 2023 mengingat event Pekan Olahraga Propinsi Sumatera Barat sudah lama tidak terselenggara. Event Porprov terakhir dilaksanakan pada Tahun 2019, dan baru akan direncanakan kembali digelar pada pertengahan Tahun 2023 dan itupun tidak terlaksana.
4. Indeks Pembangunan Olahraga, IKU tersebut belum dilakukan pengukuran oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi. Dari data yang didapatkan, bahwa Indeks Pembangunan Olahraga baru mengukur sampai pada tingkat Provinsi.

III.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2023 pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya akan disajikan analisis capaian kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terciptanya Ekonomi Kerakyatan

IKU 1 : Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan 1 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama yakni **Pertumbuhan Ekonomi** yang secara defenisi operasional dapat diartikan pertumbuhan ekonomi dari tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.

1.1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Tahun 2023

Indikator pada Sasaran diatas adalah Pertumbuhan ekonomi dari tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2023 mencapai angka 4.79 persen, setelah tahun-tahun Covid 19 memberikan dampak yang kontraksi. Hal ini tentu saja menjadi berita baik dan angin segar bagi stakeholder dan masyarakat Kota Bukittinggi.

Tabel 1.1 **Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	4.29	4,79	11.66

Sumber : Bapelitbangda Kota Bukittinggi 2024



Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional Kabupaten/Kota) menggambarkan kemampuan suatu

wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke

n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator **Pertumbuhan Ekonomi** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 1.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja **Pertumbuhan Ekonomi** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021		3,61	
2022	3	4,68	156
2023		4,79	111.66

Sumber : Bapelitbangda Kota Bukittinggi 2024

Capaian indikator utama pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi telah melampaui target pada 2 tahun terakhir, hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan pemulihan ekonomi setelah covid 19 berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Data didapatkan dari Sensus Penduduk (SP) 2020/Population Cencus 2020, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2024 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of Interim Population Projection 2021-2024 (mid year/June). Kondisi Agustus/Condition at August Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010–2035/Weighted by the 2010–2035 population projection. Kondisi Maret/Condition at March. Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita. Mulai tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008). Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/Using 2010 base year (2010=100). Menggunakan proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2010/Using population projection based on SP2010

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab/ Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 1.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja **Pertumbuhan Ekonomi** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Kab/ Kota	Pertumbuhan ekonomi	
	2022	2023
SUMATERA BARAT (Provinsi)	4.36	4.62
Kepulauan Mentawai	4.94	4.04
Pesisir Selatan	4.01	4.19

Kab/ Kota	Pertumbuhan ekonomi 2022	Pertumbuhan ekonomi 2023
Kab.Solok	4.28	4.36
Sijunjung	3.93	4.26
Tanah Datar	4.16	4.44
Padang Pariaman	6.83	5.46
Agam	4.21	4.52
Lima Puluh Kota	4.02	4.55
Pasaman	4.08	4.41
Solok Selatan	4.01	4.57
Dharmasraya	4.27	4.35
Pasaman Barat	4.13	4.33
Padang	4.31	4.54
Kota Solok	4.6	4.81
Sawahlunto	3.96	4.46
Padang Panjang	4.39	4.84
Bukittinggi	4.67	4.79
Payakumbuh	4.51	4.7
Pariaman	4.53	4.79

1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi selama 2 tahun terakhir berada diatas pertumbuhan ekonomi provinsi dan selalu berada pada 3 besar pertumbuhna ekonomi tertinggi Sumatera Barat

1.5. Alternatif Solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator tidak/ belum mencapai target

Prioritas pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan usaha seperti tabungan ustman dan penurunan beban hidup masyarakat seperti kegiatan penyediaan bantuan pendidikan sekolah tingkat atas dan UHC telah berhasil me ingkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi selama 2 tahun terakhir.

1.6 Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5267084208	4558377126	86.54
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32853030830	29609626336	90.13
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3648472516	3581270917	98.16
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	657067500	636495900	96.87

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
(UMKM)			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	917429466	901334990	98.25
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	11621376191	10296169237	88.60
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	630993200	609558495	96.60
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1096276881	962808480	87.83
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1382952300	1311991271	94.87
	58074683092	52467632752	90.35

Tujuan 2 : Terciptanya Ekonomi yang Merata

IKU 2 : Indeks Gini

2.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tujuan 2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama yakni **Indeks Gini** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Indeks Gini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Gini	0,263	0,255	103.14

Sumber : Bapelitbangda Kota Bukittinggi 2024

Indek gini Kota Bukittinggi pada tahun 2023 sebesar 0,255 melampaui target yang ditetapkan yaitu 0,263.

2.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator diatas dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Gini 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Gini		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020		0,265	
2021		0,286	
2022	0,264	0,317	-19,80

2023	0.263	0.255	103.14
------	-------	-------	--------

Sumber : Bapelitbangda Kota Bukittinggi 2024

Capaian indikator utama indeks gini kota Bukittinggi pada tahun 2023 telah tercapai atau berada dibawah target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perkembangan dari 2 tahun sebelumnya yang selalu berada diatas target capaian yang diharapkan.

2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab/ Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 2.3 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Gini dengan Kab/Kota di Sumatera Barat

Kab/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat		
	2021	2022	2023
Sumatera Barat	0,306	0,300	0,280
Kab.Kep.Mentawai	0,321	0,233	0,259
Kab.Pesisir Selatan	0,253	0,246	0,259
Kab.Solok	0,246	0,243	0,235
Kab.Sijunjung	0,270	0,243	0,263
Kab.Tanah Datar	0,250	0,251	0,260
Kab.Padang Pariaman	0,269	0,245	0,257
Kab.Agam	0,272	0,298	0,255
Kab.Lima Puluh Kota	0,244	0,208	0,194
Kab.Pasaman	0,248	0,230	0,243
Kab.Solok Selatan	0,277	0,253	0,271
Kab.Dharmasraya	0,268	0,287	0,291
Kab.Pasaman Barat	0,261	0,277	0,238
Kota Padang	0,343	0,354	0,312
Kota Solok	0,277	0,288	0,256
Kota Sawahlunto	0,295	0,314	0,308
Kota Padang Panjang	0,306	0,296	0,273
Kota Bukittinggi	0,286	0,317	0,255
Kota Payakumbuh	0,316	0,311	0,316
Kota Pariaman	0,301	0,272	0,289

Tahun 2011-2014, Susenas ada 4 kali setahun yaitu Maret, Juni, September, Desember. Angka Publikasi Sumbar berdasarkan kondisi Juni, kompilasi data 4 triwulan. Setelah tahun 2015 ke atas kondisi Maret

2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Indeks gini Kota Bukittinggi tahun 2023 berada dibawah capaian provinsi yang mencapai 2,80. capaian ini merupakan capaian terbaik seluruh Kota di Provinsi Sumatera Barat.

2.5. Alternatif Solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator tidak/ belum mencapai target

Prioritas pembangunan berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan usaha seperti tabungan ustman dan penurunan beban hidup masyarakat seperti kegiatan penyediaan bantuan pendidikan sekolah tingkat atas dan UHC telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan 40 persen gterbawah sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk.

2.6. Program atau kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5267084208	4558377126	86.54
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32853030830	29609626336	90.13
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3648472516	3581270917	98.16
Jumlah	41768587554	37749274379	90.38

Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

IKU 3 : Indeks Pembangunan Manusia

Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	2021	2022	2023
Bukittinggi	80,70	81,42	81,78
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			

BPS Sumatera Barat 2024

3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. Capaian Indikator IPM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
IPM	81.57	81.78	100.25

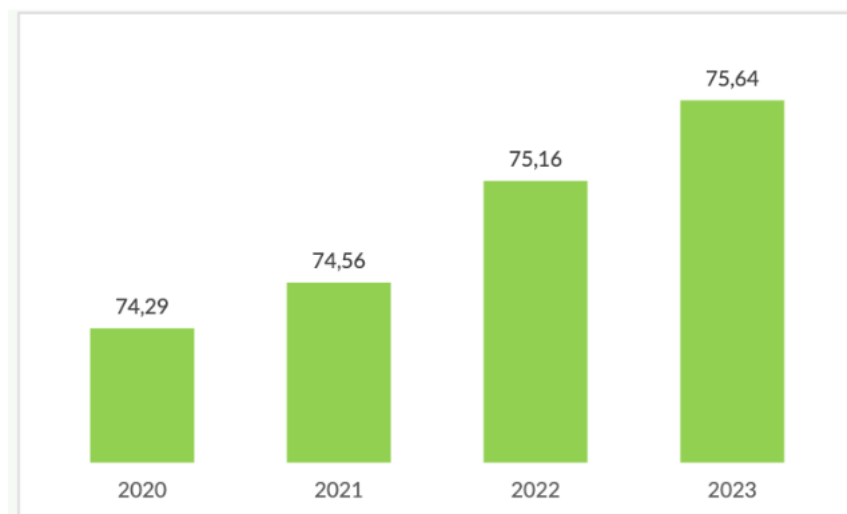
Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi Tahun 2023 melalui data BPS Kota Bukittinggi tercatat di angka 81.78. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, IPM Kota Bukittinggi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,36 poin.

Lain halnya dengan IPM Propinsi Sumatera Barat, Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Sumatera Barat sudah berada di level "tinggi". Selama 2020–2023, IPM Sumatera Barat rata-rata meningkat sebesar 0,60 persen per tahun, dari 74,29 pada tahun 2020 menjadi 75,64 pada tahun 2023.

Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Sumatera Barat sudah berada di level "tinggi". Selama 2020–2023, IPM Sumatera Barat rata-rata meningkat sebesar 0,60 persen per tahun, dari 74,29 pada tahun 2020 menjadi 75,64 pada tahun 2023.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2023:

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,64 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sumatera Barat adalah 73,50 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 74,14 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,26 tahun (0,35 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih lambat dibanding rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,26 persen per tahun).

2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Sumatera Barat rata-rata meningkat 0,21 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,08 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2022, lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,28 persen).

3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Sumatera Barat mencapai Rp11,380 juta per tahun. Capaian ini meningkat 250 ribu rupiah (2,25 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,84 persen per tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

2. Angka Melek Huruf, Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.
3. Rata-Rata Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
4. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Keterangan :

$C(i)$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500 perkapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari

Tabel 1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Komoditi	Unit
1. Beras Lokal	Kg	15. Pepaya	Kg
2. Tepung terigu	Kg	16. Kelapa	Butir
3. Singkong	Kg	17. Gula	Ons
4. Tuna/Cakalang	Kg	18. Kopi	Ons
5. Teri	Ons	19. Garam	Ons
6. Daging sapi	Kg	20. Merica	Ons
7. Ayam	Kg	21. Mie instan	80 Gram
8. Telur	Butir	22. Rokok Kretek	10 batang
9. Susu kental manis	397 Gram	23. Listrik	Kwh
10. Bayam	Kg	24. Air minum	M3
11. Kacang panjang	Kg	25. Bensin	Liter
12. Kacang tanah	Kg	26. Minyak tanah	Liter
13. Tempe	Kg	27. Sewa rumah	Unit
14. Jeruk	Kg		

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 1. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- . Sementara itu sempat tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,- , sedangkan sejak tahun 1999, batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia

3.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tujuan 3 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Pembangunan manusia** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	81,57	81,78	100,25

Sumber : Bapelitbangda Kota Bukittinggi 2024

3.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 3.2 Perbandingan antara Capaian 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020		80,58	
2021		80,70	
2022	81,14	81,42	100,34
2023	81.57	81.88	100.25

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab/ Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Pada tahun 2023, status pembangunan manusia di Kota Payakumbuh meningkat dari "tinggi" menjadi "sangat tinggi", dengan capaian IPM 80,14. Jumlah kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia yang "sangat tinggi" ($IPM \geq 80$) menjadi sebanyak 3. Kabupaten/kota dengan status "tinggi" ($70 \leq IPM < 80$) sebanyak 14, dan 2 kabupaten/kota dengan status sedang ($60 \leq IPM < 70$) sementara untuk status "rendah" ($IPM < 60$) sudah tidak ada.

Tabel 3.3 Perbandingan antara Capaian dengan Kab/Kota di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kabupaten Kep. Mentawai	70,91	71,06	12,89	12,90	7,48	7,76	6.567	6.891	64,83	65,79
Kabupaten Pesisir Selatan	73,20	73,27	13,35	13,36	8,43	8,58	9.686	9.953	71,72	72,24
Kabupaten Solok	72,12	72,31	13,30	13,55	7,89	7,90	10.539	10.717	71,39	71,92
Kabupaten Sijunjung	72,27	72,59	12,64	12,72	8,30	8,57	10.582	11.018	71,32	72,30
Kabupaten Tanah Datar	73,84	74,19	14,59	14,78	8,90	9,02	10.695	10.905	74,87	75,57
Kabupaten Padang Pariaman	73,67	73,77	13,93	14,19	8,16	8,41	11.159	11.432	73,67	74,54
Kabupaten Agam	74,07	74,22	13,88	13,89	8,98	9,22	10.171	10.402	73,84	74,44
Kabupaten Limapuluh Kota	73,03	73,25	13,40	13,41	8,08	8,12	10.035	10.285	71,64	72,05
Kabupaten Pasaman	71,71	72,04	13,05	13,25	8,11	8,13	8.619	8.908	69,12	69,85
Kabupaten Solok Selatan	71,89	72,22	12,73	12,80	8,41	8,69	10.560	10.884	71,36	72,24
Kabupaten Dharmasraya	73,84	74,04	12,51	12,68	8,56	8,71	11.650	11.901	73,19	73,87
Kabupaten Pasaman Barat	72,14	72,44	13,69	13,70	8,55	8,81	9.381	9.538	71,39	72,03
Kota Padang	74,71	74,94	16,54	16,56	11,60	11,62	14.889	15.089	83,69	83,98
Kota Solok	74,31	74,56	14,34	14,36	11,35	11,36	12.515	12.709	79,35	79,66
Kota Sawahlunto	73,50	73,79	13,42	13,69	10,43	10,44	10.537	10.829	75,21	75,91
Kota Padang Panjang	74,03	74,24	15,07	15,29	11,92	11,94	11.153	11.310	79,28	79,76
Kota Bukittinggi	75,02	75,33	14,99	15,01	11,63	11,64	13.633	13.859	81,52	81,88
Kota Payakumbuh	74,48	74,77	14,29	14,30	10,82	10,88	13.687	13.978	79,70	80,14
Kota Pariaman	73,98	74,20	14,61	14,79	10,78	10,79	13.150	13.355	79,31	79,76
Sumatera Barat	73,88	74,19	14,10	14,11	9,18	9,28	11.130	11.380	75,16	75,64

Keterangan:

UHH : Umur Harapan Hidup hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 75,64, meningkat sebesar 0,48 poin atau meningkat sebesar 0,64 persen dibandingkan tahun 2022 (75,16). IPM Sumatera Barat tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. IPM tahun 2023 mencapai 75,64 atau tumbuh 0,64 persen dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan IPM 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan rata-rata pertumbuhan per tahun selama periode 2020-2022. Peningkatan IPM didukung oleh seluruh indikator pembentuknya. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,14 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,10 menjadi 14,11 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,10 tahun, dari 9,18 tahun menjadi 9,28 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 250 ribu rupiah (2,25 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita

pertahunmenggunakan hasil Susenas Maret.Dari 19 kabupaten/kota,sebanyak 3 Kota berstatusIPMsangattinggi, 14 kabupaten/ kota tinggi, dan 2 Kabupaten berstatussedang pada tahun 2023.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Seluruh prioritas pembangunan Kota Bukittinggi dalam rangka pencapaian misi kota "Bukittinggi hebat terlandaskan ABS-SBK" mengarah pada peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan IPM.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32853030830	29609626336	90.13
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48405602388	47623390977	98.38
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5267084208	4558377126	86.54
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3648472516	3581270917	98.16
	90174189942	85372665356	94.68

Tujuan 5: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

IKU 4 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tujuan 5 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks komposit yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari aspek kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.

4.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 4.1. Capaian Indikator Indeks IKLH

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks IKLH	63,76	51,77	81,19%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2024

Capaian kinerja indicator IKLH Kota Bukittinggi Tahun 2023 belum dilakukan penghitungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Sehingga untuk data Tahun

2023 belum bias disajikan data update atau terkini. Namun demikian data informasi yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi bahwa untuk data sementara dapat digunakan data Tahun 2022 sehingga angka Indeks IKLH masih di angka 51,55. Sehingga jika dengan membandingkan capaian kinerjanya didapatkan hasil 81,19% dari target yang ditetapkan.

Tabel 4.1.1 : Klasifikasi Nilai Indeks IKLH

Nilai Indeks	Rentang Nilai
Sangat Baik	> 90
Baik	70 < - ≤ 90
Sedang	50 ≤ - ≤ 70
Kurang	25 ≤ - < 50
Sangat Kurang	< 25

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Pada tahun 2021, perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level kabupaten/kota. Indikator untuk menghitung IKLH kabupaten/kota sedikit berbeda dengan indikator untuk menghitung nilai IKLH provinsi dan nasional.

4.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator IKLH Kota Bukittinggi tiga tahun terakhir:

Tabel 4.2 Perbandingan antara IKLH 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	IKLH	
		Realisasi	Capaian Kinerja
2021		56,64	
2022	63,48	51,77	81,55%
2023	63,76	51,77	81,19

Tujuan 6 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah**IKU 5 : Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata****5.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 5.1. Capaian Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	3	4,55	152 %

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2023

Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata diambil dari jumlah café dan restaurant, rumah makan, hotel, homestay dan pusat ekraf yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2022. Narasi dan data masih mengacu pada yang disampaikan pada Tahun 2022

5.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator **Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 5.2 Perbandingan antara Persentase Pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	-	-	-
2021	2.67	4.18	157%
2022	3	4.55	152%

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2023

Sub indikator PDRB pariwisata setiap tahunnya cenderung sama terjadi penurunan dari tahun 2021 ke 2022 karena target tiap tahun cenderung meningkat.

5.3 . Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Proses pendataan kepariwisataan selalu dilakukan setiap tahun dengan melibatkan semua stakeholder agar data yang terkumpul dapat dipublikasikan tepat waktu.

5.4 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Menarik minat para investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor pariwisata dengan penyederhanaan regulasinya. Karena akan dapat menyerap tenaga kerja dan menumbuh kembangkan usaha lain yang mendukung sektor pariwisata.

5.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\% \text{)} \\ &\quad \text{capaian kinerja IKU} \\ Efisiensi &= 100\% - \frac{(79,155\% \times 100\%)}{152\%} \\ &= 47.93\% \end{aligned}$$

5.6 Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator

Tabel 5.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	598,765,050	490,632,680	81.94%
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2,079,840,430	1,822,440,038	87.62%
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	337,298,500	219,632,150	65.12%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	598,765,050	490,632,680	81.94%
			79,155

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi 2024

Tujuan 7 : Berkembangnya Seni Budaya Berbasis ABS-SBK

IKU 6 : Indeks Pembangunan Kebudayaan

6.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Indeks Pembangunan Kebudayaan** yang secara defenisi operasional adalah sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas

sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

Tabel 6.1 Capaian Indikator **Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Kategori Baik	52,71	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2024

Terkait dengan Indikator Pembangunan Kebudayaan yang merupakan indikator yang berformulasi atas berbagai kebijakan bidang kebudayaan didapatkan melalui hasil survey. Hingga saat ini Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Bukittinggi belum didapatkan. Termasuk Survey IPK Kota Bukittinggi belum ada dilakukan. IPK yang ada adalah IPK Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi melalui web <https://ipk.kemdikbud.go.id>

6.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 6.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Kebudayaan		Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	
2021		54.6	
2022	Kategori Baik	52,71	
2023	Kategori Baik	52,71	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2024

6.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab/ Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 6.3 Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Kab/Kota Di Sumatera Barat

Tahun	Nasional	SUMATERA BARAT
2018	53.74	53.23
2019	55.91	54.99
2020	54.65	54.60
2021	51.90	52.71

Sumber : Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek 2021

6.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Dalam pencapaian IPK Kota Bukittinggi Dinas pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan Peningkatan pembangunan Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Ekpresi Budaya, Budaya Literasi, Gender.

6.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Peningkatan pembangunan SDM dibidang Kebudayaan

6.6. Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator

Tabel 6.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	264,132,700.00	262,627,375.00	100%
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	375,908,300.00	337,288,469.00	99%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	631,625,000.00	631,605,000.00	100%

Tujuan 8 : Terwujudnya Masyarakat Berbudaya Olahraga

IKU 7 : Indeks Pembangunan Olahraga

Tujuan 8 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Pembangunan Olahraga** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks komposit pembangunan olahraga melalui empat indikator yaitu Indeks Ruang Terbuka, Indeks Sumber Daya Manusia, Indeks Partisipasi Masyarakat dan Indeks Kebugaran Jasmani.

7.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 7.1 Capaian Indikator **Indeks Pembangunan Olahraga**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Olahraga	Kategori baik	Kategori baik	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi 2024

Even Olahraga yang dilaksanakan dengan tingkat kunjungan olahraga ke Kota Bukittinggi dan prestasi olahraga yang diperoleh kota Bukittinggi.

7.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator **Indeks Pembangunan Olahraga** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 7.2 Perbandingan antara Jumlah **Indeks Pembangunan Olahraga** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Olahraga		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021			
2022	Kategori baik	Kategori baik	100
2023	Kategori baik	Kategori baik	100

7.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab / Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Pemerintah Kota memiliki kepedulian dan cinta kepada kota ini, khususnya berkenaan dengan aspirasi bagaimana kota kita ini memiliki sport hall atau sarana prasarana olahraga yang sifatnya kolosal dan itu juga bisa menjadi *landmarknya* kota Bukittinggi. Keinginan atau aspirasi itu menjadi inovasi bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi minat dan bakat warga kota, termasuk generasi muda untuk mengembangkan talenta olahraganya.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga mencermati usul atau masukan dari warga kota berkenaan dengan kesiapan pemerintah kota menyediakan beragam sarana prasarana untuk menampung bakat, minat anak-anak muda, ini barangkali dua hal yang menurut kami sangat positif.

7.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Untuk Keberhasilan sasaran pemuda olahraga dalam mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menunjang keberhasilan sasaran pemuda olahraga dengan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengembangan kapsitas daya saing keolahragaan dan program pengembangan kapasitas kepramukaan.

7.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

1. Mengantisipasi Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan dalam Renja tahun 2025.

2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan

7.6. Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator

Tabel 7.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.724.666.400	1.631.340.116	95%
Penyandaran , Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.410.596.000	1.365.082.883	97%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	95.577.400	94.583.325	99%
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	51.676.700	42.438.600	82%
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.263.341.900	1.228.060.958	97%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	314.070.400	266.257.233	85%
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	314.070.400	266.257.233	85%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.644.804.290	3.725.807.576	80%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	678.248.650	527.380.989	78%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Siingle Event Tingkat Kabupaten/Kota	675.418.650	524.550.989	78%
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kabaupaten/Kota	2.830.000	2.830.000	100%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	2.651.296.900	2.153.909.916	81%
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/kota	2.651.296.900	2.153.909.916	81%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.315.258.740	1.044.516.671	79%
Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	657.147.108	520.067.835	79%
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana olahraga Rekreasi	658.111.632	524.448.836	80%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.496.500	494.751.892	99%

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.496.500	494.751.892	99%
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500.496.500	494.751.892	99%

Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

IKU 8 : Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)

Tujuan 9 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks perbaikan tata kelola pemerintahan instansi pemerintah daerah yang diukur oleh Kementerian PAN dan RB.

8.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 8.1. Capaian Indikator **Indeks Reformasi Birokrasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	Kriteria B	BB	110 %

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi Berakhlak dengan ASN yang professional. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan kesimpulan hasil evaluasi adalah Indeks RB Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah 75,36 dengan kategori BB dengan rincian sebagai berikut :

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	66,27
B	RB Tematik	20	9,09
C	Indeks RB	120	75,36
			BB

Hasil evaluasi Tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi Tahun 2022. Karena berdasarkan Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator RB, baik nilai, catatan dan rekomendasi pada setiap indikator.

8.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator **Indeks Reformasi Birokrasi** dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 8.2 Perbandingan Capaian Kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Indeks Reformasi Birokrasi			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	Kriteria B	B	100
2021	Kriteria B	B	100
2022	Kriteria B	B	100
2023	Kriteria B	BB	

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi 2024

8.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab/ Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 8.3 Perbandingan Capaian Kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi** Dengan Kab/Kota Di Sumatera Barat

Kab/Kota	2022	2023
KOTA BUKITTINGGI	B	BB
KAB.TANAH DATAR	B	B
KAB. SOLOK	CC	BB
KABUPATEN PESISIR SELATAN	CC	BB
KABUPATEN SIJUNJUNG	C	CC
KOTA PAYAKUMBUH	B	BB
Kota Padang	BB	BB
Kota Solok	B	BB

Kab Agam	CC	B
Prov Sumatera Barat	B	BB
Kota Padang Panjang	CC	B

Pada Tahun 2023 Indeks RB Pemerintah Kota Bukittinggi adalah BB dengan Nilai 75,36. Untuk rangking, Pemerintah Kota Bukittinggi berada di posisi ke Tiga Setelah Kota Payakumbuh dan Propinsi Sumatera Barat.

8.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Peningkatan nilai indeks RB terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dan/atau prioritas Presiden lainnya.

8.5. Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator

Tabel 8.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			
SubKegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16,321,000	13,113,780	80%

Tujuan 10 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

IKU 9 : Indeks Kesejahteraan Sosial

Tujuan 10 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kesejahteraan Sosial** yang secara defenisi operasional dapat diartikan indeks komposit pembangunan kesejahteraan social melalui 2 (dua) dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial objektif dan subjektif. Penjabaran dan analisa terhadap IKU Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 belum bias disajikan, untuk itu data dan analisa yang digunakan masih menggunakan data dan analisa Tahun 2022.

9.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 9.1 Capaian Indikator **Indeks Kesejahteraan Sosial**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesejahteraan Sosial	Kategori baik	86,89	100

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2023

Indeks kesejahteraan sosial bernilai baik jika berada pada angka diatas 80, oleh karena ditargetkan bernilai baik maka selama masih berada pada rentang 80 sampai 100 maka capaiannya adalah 100 persen. Perhitungan indeks kesejahteraan sosial Kota Bukittinggi tahun 2022 mencapai 86,89 dan masuk kategori baik, sehingga target yang ditetapkan pada RPJMD tercapai.

9.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kesejahteraan Sosial** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 9.2 Perbandingan antara **Indeks Kesejahteraan Sosial** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kesejahteraan Sosial		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020			
2021			
2022	Kategori baik	86,89	100

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2023

9.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya target indeks kesejahteraan sosial kota bukittinggi, diantaranya kemampuan pemerintah kota untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan fisiologi, keamanan dan keselamatan, interaksi dan hak-hak sosial, serta kesempatan untuk berkompentasi dan penghargaan diri.

Tujuan 11 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan

IKU 10 : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Tujuan 11 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya

10.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 10.1 Capaian Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1.63	2.62	160,74 %

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi 2024

Tahun 2023 target pertumbuhan PDRB sektor pertanian adalah 1,63 dengan realisasi 2,62 dan capaian 160,74%.

10.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 10.2 Perbandingan **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**
Tahun 2023 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	1.44	3.06	212.5
2022	1.53	2.3	150.33
2023	1.63	2.62	160.74

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2024

Tahun 2021 target pertumbuhan PDRB sektor pertanian adalah 1,44 dengan realisasinya 3,06 dan capaian 212,5 %, Tahun 2022 target pertumbuhan PDRB sektor pertanian adalah 1,53 dengan realisasi 2,84 dan capaian 185,62%. Sedangkan tahun 2023 target pertumbuhan PDRB sektor pertanian adalah 1,63 dengan realisasi 2,62 dan capaian 160,74%. Angka ini tercapai lebih dari target karena Meningkatkan penggunaan teknologi budidaya, peningkatan penggunaan pupuk dan alsintan yang tepat sasaran dan memaksimalkan fungsional prasarana pertanian, bantuan benih dan pakan ikan tersalurkan kepada pembudidaya ikan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang cara budidaya yang baik dan cara pengolahan hasil perikanan.

Walaupun dengan lahan terbatas produksi dapat ditingkatkan karena pertama menggunakan teknologi tepat guna antara lain dengan sistim bioflok yaitu dengan pemanfaatan lahan sempit dapat ditebar benih ikan dengan jumlah yang besar dengan pemberian pakan yang komposisinya sesuai, memberikan rangsangan kepada Pokdakan berupa bantuan benih dan pakan ikan serta melakukan peningkatan SDM petani ikan dalam bentuk studi banding dan pelatihan teknis, yang ketiga banyaknya kelompok memanfaatkan lahan kosong dan lahan terlantar menjadi kolam ikan, yang keempat adanya kelompok yang bergerak dibidang usaha pembesaran lele dalam 1(satu) bulan sudah bisa dipanen, selanjutnya Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi selalu

melakukan intensifikasi pertanian, pembinaan terhadap kelompok tani gapoktan (LKMA) dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi dan penanggulangan hama.

10.3 . Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggunaan teknologi budidaya, peningkatan penggunaan pupuk dan alsintan yang tepat sasaran dan memaksimalkan fungsional prasarana pertanian
2. Memberikan bantuan benih dan pakan ikan kepada pembudidaya ikan, memberikan bimbingan dan pembinaan teknis tentang cara budidaya yang baik dan cara pengolahan hasil perikanan, dan lomba forikan tk kota, provinsi dalam rangka menggalakkan gemarikan dan peningkatan konsumsi ikan.
3. Walaupun dengan lahan terbatas produksi dapat ditingkatkan karena pertama menggunakan teknologi tepat guna antara lain dengan sistim bioflok yaitu dengan pemanfaatan lahan sempit dapat ditebar benih ikan dengan jumlah yang besar dengan pemberian pakan yang komposisinya sesuai, yang kedua dengan memberikan rangsangan kepada Pokdakan berupa bantuan benih dan pakan ikan serta melakukan peningkatan SDM petani ikan dalam bentuk studi banding dan pelatihan teknis, yang ketiga banyaknya kelompok memanfaatkan lahan kosong dan lahan terlantar menjadi kolam ikan, yang keempat adanya kelompok yang bergerak dibidang usaha pembesaran lele dalam 1(satu) bulan sudah bisa dipanen.
4. Melakukan intensifikasi pertanian
5. Pembinaan terhadap kelompok tani gapoktan dan LKMA
6. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi dan penanggulangan hama
7. Memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian alsintan

10.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

1. Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan kembali dalam Renja tahun 2024.
2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

10.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned}
 *Efisiensi &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\
 &= 100\% - (93,16\% \times 100\%) \\
 &= 42.04\%
 \end{aligned}$$

10.6 Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 10.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	667.086.212	596.852.969	89,47%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD Balai Benih Ikan Hias)	312.096.612	244.916.469	78,47%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Dinas Pertanian dan Pangan)	354.989.600	351.936.500	99,14%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	415.883.008	334.300.300	80,38%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	415.883.008	334.300.300	80,38%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.999.068.804	1.885.642.592	94,33%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	610.096.600	572.717.894	93,87%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.355.107.904	1.281.924.598	94,60%
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.900.000	16.817.800	93,95%
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.964.300	14.182.300	88,84%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.331.321.400	1.287.338.619	96,70%
Pengembangan Prasarana Pertanian	14.650.000	12.114.840	82,70%
Pembangunan Prasarana Pertanian	1.316.671.400	1.275.223.779	96,85%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	584.037.792	562.563.984	96,32%
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.263.136	49.927.136	92,01%
Pengelolaan Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas)	286.826.448	277.894.796	96,89%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD RPH)	242.948.208	234.742.052	96,62%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	606.110.180	553.697.608	91,35%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	606.110.180	553.697.608	91,35%
TOTAL	5.603.507.396	5.220.396.072	93,16%

Sasaran 1 : Meningkatnya daya beli masyarakat**IKU 11 : Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)**

Sasaran 1 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)** yang secara defenisi operasional dapat diartikan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa

11.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023Tabel 11.1. Capaian Indikator **Pengeluaran Per Kapita** Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengeluaran Per Kapita	13.746	13.859	100,82%

Sumber : Bapelitbangda Kota Bukittinggi 2024

Pengeluaran perkapita masyarakat Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah 13,86 juta rupiah perkapita, capaian ini berada diatas target yang ditetapkan yaitu 13,75 juta rupiah perkapita

11.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Pengeluaran Per Kapita** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 11.2. Perbandingan antara **Pengeluaran Per Kapita** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Pengeluaran Per Kapita		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021		13 331	
2022	13.509	13.633	100,91%
2023	13.746	13.859	100.82

Sumber : Bappelitbangda Kota Bukittinggi 2024

Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil melampaui target pendapatan perkapita selama 2 tahun terakhir, capaian ini menggambarkan berhasilnya program-program untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan setelah covid 19 yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat berada dibawah target pada tahun 2021.

11.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kab/ Kota	2022	2023
Prov. Sumatera Barat	11,130	11,380
Kota Bukittinggi	13,633	13,859
Kota Padang	14,889	15,089
Kota Solok	12,515	12,709
Kota Sawahlunto	10,537	10,829
Kota Padang Panjang	11,153	11,310
Kota Payakumbuh	13,687	13,978
Kota Pariaman	13,150	13,355
Kab. Kepulauan Mentawai	6,567	6,891
Kab. Pesisir Selatan	9,686	9,953
Kab. Solok	10,539	10,717
Kab. Sijunjung	10,582	11,018
Kab. Tanah Datar	10,695	10,905
Kab. Padang Pariaman	11,159	11,432
Kab. Agam	10,171	10,402
Kab. Lima Puluh Kota	10,035	10,285
Kab. Pasaman	8,619	8,908
Kab. Solok Selatan	10,560	10,884
Kab. Dharmasraya	11,650	11,901
Kab. Pasaman Barat	9,381	9,538

Selama tahun 2023-2024 pendapatan perkapita masyarakat Kota Bukittinggi selalu berada jauh diatas capaian provinsi meskipun belum beranjak dari peringkat 3 tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

11.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Prioritas pembangunan berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan usaha seperti tabungan ustman dan penurunan beban hidup masyarakat seperti kegiatan penyediaan bantuan pendidikan sekolah tingkat atas dan UHC telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator utama pendapatan perkapita masyarakat Kota Bukittinggi selama 2 tahun terakhir.

11.5. Program atau kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5267084208	4558377126	86.54
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32853030830	29609626336	90.13

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3648472516	3581270917	98.16
	41768587554	37749274379	90.38

Sasaran 2 : Meningkatkan Investasi Hijau

IKU 12 : Pertumbuhan PMTB (%)

Sasaran 2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pertumbuhan PMTB** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase kenaikan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya

12.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 12.1. Capaian Indikator **Pertumbuhan PMTB**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PMTB	4	3,92	98%

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Bukittinggi 2024

Mulai Tahun 2023, Target pertumbuhan PMTB telah dirubah berdasarkan SK IKU DPMPTSP dan Perubahan Renstra menjadi 4% dari target tersebut telah terealisasi senilai 3,92%

12.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Pertumbuhan PMTB** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 12.2. Perbandingan Capaian **Pertumbuhan PMTB** 3 Tahun Terakhir

Tahun	Pertumbuhan PMTB		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	-0.4	-0,47	117,5
2021	3,9	1,71	43,85
2022	4,2	1,71	45
2023	4	3,92	98

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Bukittinggi 2024

12.3. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 12.3 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Program Promosi Penanaman Modal	81.531.300,-	41.261.609,-	50,61%

Sasaran 2 : Meningkatnya Investasi Hijau

IKU 13 : Persentase Realisasi Investasi Hijau (%)

Sasaran 2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Persentase Realisasi Investasi Hijau** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase realisasi investasi hijau terhadap total realisasi investasi pada tahun tertentu.

13.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 13.1. Capaian **Persentase Realisasi Investasi Hijau**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Investasi Hijau	20 %	35,20 %	176

Sumber: Dinas PMPTSP Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi 2024

Mulai Tahun 2023, Target realisasi Investasi Hijau Kota Bukittinggi telah dirubah berdasarkan SK IKU DPMTSP dan Perubahan Renstra menjadi 20%. dari target tersebut telah terealisasi senilai Rp. 327.064.929.749 dari total realisasi investasi Rp. 929.035.775.030. penghitungan realisasi investasi hijau dilakukan dengan pendekatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). setiap Badan usaha atau kegiatan usaha yang telah melakukan pelaporan dapat dianggap telah memenuhi kriteria investasi hijau karena telah berbadan hukum sehingga mereka telah mengikuti aturan yang ada terkait aspek lingkungan, tata kelola, dan Sosial responsibility.

13.2. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 13.2 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Program Promosi Penanaman Modal	81.531.300,-	41.261.609,-	50,61%

Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Hijau

IKU 14 : Indeks Daya Saing Infrastruktur

Sasaran 3 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Daya Saing Infrastruktur** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks komposit capaian pembangunan infrastruktur dari indikator jalan, air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman dan perumahan.

14.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 14.1. Capaian Indikator **Indeks Daya Saing Infrastruktur**

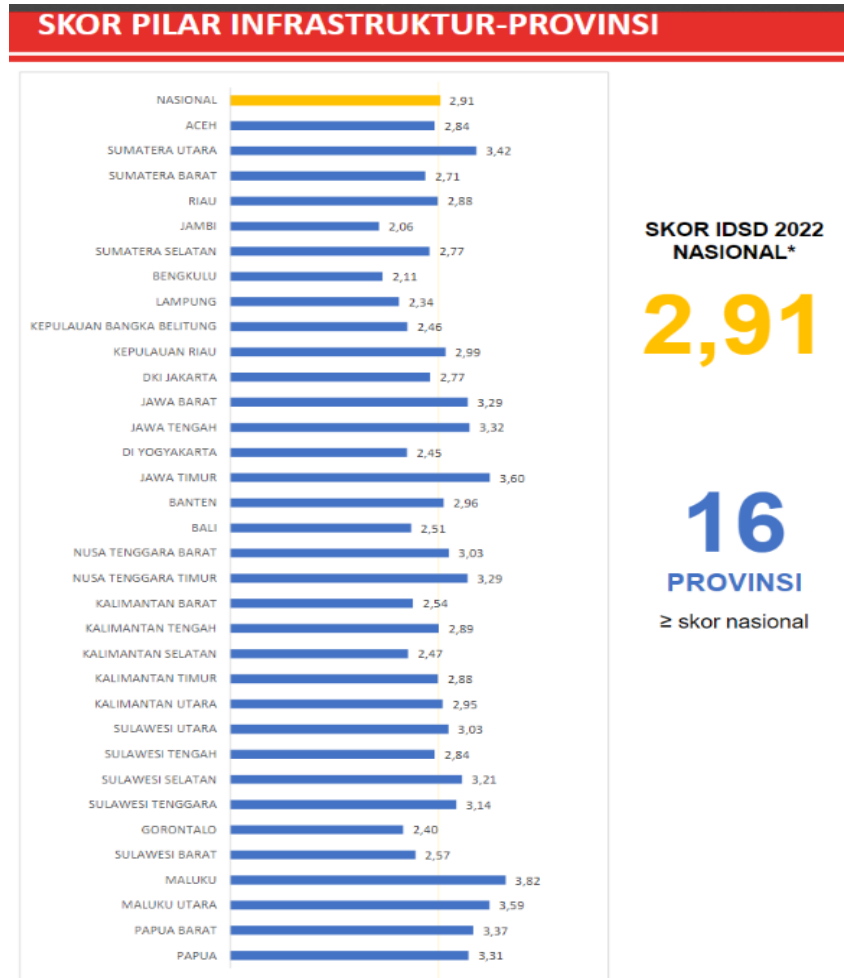
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Daya Saing Infrastruktur	78	80,71	104,82 %

14.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 14.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Daya Saing Infrastruktur		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020			
2021	75	94,61	126,14 %
2022	76	73,72	97 %
2023	78	80,71	104,82 %

14.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional



Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas Sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing

14.4. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 14.4 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	429,896,000.00	400,279,003.00	93,11%

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	429,896,000.00	400,279,003.00	93,11%
2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH/	176,690,200.00	111,180,546.00	62,92%
Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kab/Kota	176,690,200.00	111,180,546.00	62,92%
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3,747,349,258.00	3,579,261,176.00	95,51%
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,747,349,258.00	3,579,261,176.00	95,51%
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6,294,367,190.00	5,955,778,178.00	94,62%
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6,294,367,190.00	5,955,778,178.00	94,62%
5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3,485,571,600.00	2,473,320,758.00	70,96%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3,485,571,600.00	2,473,320,758.00	70,96%
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,468,400,436.00	1,246,793,934.00	84,91%
Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	940,914,200.00	807,508,697.00	85,82%
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	249,606,420.00	234,667,969.00	94,01%
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	277,879,816.00	204,617,268.00	73,63%
7. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4,518,183,075.00	4,270,274,353.00	94,51%
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,518,183,075.00	4,270,274,353.00	94,51%
		36,073,775,896.00	

Sasaran 4: Menurunnya Kemiskinan**IKU 15 : Tingkat Kemiskinan (%)**

Sasaran 4 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Tingkat Kemiskinan** yang secara definisi operasional dapat diartikan Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk pada tahun tertentu.

I. Penduduk MiskinKonsep :

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

SumberData :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

II. Garis Kemiskinan (GK)Konsep:

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$GK = GKM + GKNM$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

Dimana :

$GKM_j =$ Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi, sehingga:

Dimana :

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

HK_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

Dimana :

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan

pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

Dimana:

NFp = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).

Vi = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

ri = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

III. Persentase Penduduk Miskin

Konsep :

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

Dimana :

$a = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Konsep :

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

V. Indeks Keparahan Kemiskinan

Konsep :

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

15.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 15.1. Capaian Indikator **Tingkat Kemiskinan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kemiskinan	4,36	4,11	105.73%

Sumber : Bappelitbangda Kota Bukittinggi 2024

$$\begin{aligned}
 \text{Target Tahun 2023} &= 4,36 \\
 \text{Realisasi Tahun 2023} &= 4,11 \\
 \\
 \text{Selisih capaian} &= 4,36 - 4,11 \\
 &= 0,25 \\
 \\
 \% \text{ Selisih Capaian} &= (0,25 / 4,36) 100 \% \\
 &= 5.73 \% \\
 \\
 \% \text{ Capaian} &= 100\% + \% \text{ Selisih Capaian} \\
 &= 100\% + 5.73 \% \\
 &= 105,73 \%
 \end{aligned}$$

Capaian tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2023 sebesar 4,11% berada dibawah target yang ditetapkan atau melewati target tingkat kemiskinan sebesar 4,36%

15.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Tingkat Kemiskinan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 15.2. Perbandingan antara **Tingkat Kemiskinan** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Kemiskinan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021		5,14	
2022	4,48	4,46	100,44 %
2023	4.36	4.11	105.73

Sumber : Bappelitbangda Kota Bukittinggi 2024

Kota Bukittinggi telah berhasil melampaui target indikator kinerja utama tingkat pendidikan selama 2 tahun terakhir, meskipun pada tahun sebelumnya tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi gagal mencapai target karena dampak covid 19.

15.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023
SUMATERA BARAT (Provinsi)	370,67	335,21	5.95
Kepulauan Mentawai	14,31	13,74	13,72
Pesisir Selatan	37,41	33,78	7,34
Kab.Solok	30,36	27,16	7,13

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023
Sijunjung	16,81	15,07	5,88
Tanah Datar	15,89	14,91	4,16
Padang Pariaman	30,41	26,44	6,34
Agam	34,26	31,33	6,6
Lima Puluh Kota	28,51	26,00	6,8
Pasaman	21,57	19,94	6,8
Solok Selatan	13,41	11,81	6,45
Dharmasraya	17,60	15,08	5,56
Pasaman Barat	34,97	32,91	6,92
Padang	48,44	42,37	4,17
Kota Solok	2,31	2,28	3,05
Sawahlunto	1,52	1,47	2,27
Padang Panjang	3,28	2,89	5,24
Bukittinggi	6,98	6,16	4,11
Payakumbuh	8,66	8,08	5,44
Pariaman	3,99	3,80	4,2

Capaian tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2023 sebesar 4,11% berada dibawah capaian provinsi tahun 2023 sebesar 5,95 dan termasuk 3 terendah di Sumatera barat. Hal ini merupakan peningkatan keberhasilan dimana tahun sebelumnya peringkat 6 terendah.

15.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Prioritas pembangunan berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan usaha seperti tabungan ustman dan penurunan beban hidup masyarakat seperti kegiatan penyediaan bantuan pendidikan sekolah tingkat atas dan UHC telah berhasil menurunkan angka kemiskinan Kota Bukittinggi selama 2 tahun terakhir.

15.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Inflasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 diperkirakan akan terus meningkat dan berpotensi berada di atas target sasaran yaitu sebesar 3,1%. Tingginya tingkat inflasi di Kota Bukittinggi disebabkan oleh keterbatasan pasokan komoditas akibat tingginya curah

hujan, kenaikan harga pupuk dan kenaikan harga BBM. Sehingga secara nasional, Bukittinggi masuk peringkat 10 Nasional untuk angka inflasi tertinggi.

Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya menjaga kestabilan harga dengan memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan konsumsi masyarakat. Salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan pemberian subsidi kepada pelaku UMKM melalui Tabungan Utsman. Tabungan Utsman merupakan program prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membantu permodalan masyarakat dalam berusaha guna meningkatkan ekonomi mereka.

Sampai bulan Oktober 2022, warga Kota Bukittinggi telah memanfaatkan Tabungan Utsman sebanyak 1.663 orang dengan total kucuran pinjaman sebesar Rp 12.239.500.000,- dengan subsidi margin yang telah diberikan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp 2.325.505.000,- dan pembayaran macet 0 (nol) %. Pemberian subsidi melalui Tabungan Utsman juga menjadi salah satu instrumen untuk menjaga UMKM dari tekanan kenaikan harga dan juga mengurangi angka kemiskinan.

Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya menyusun program yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat dan lebih fokus pada program yang mengurangi beban masyarakat secara langsung. Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil mengangkat Perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi di sektor UMKM hingga mencapai 300%. Pada Tahun 2022, total usaha meningkat menjadi 4.300 dan serapan tenaga kerja sebanyak 13.243 jiwa sehingga total serapan investasi meningkat menjadi Rp 1 Trilyun lebih.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kesempatan Kerja

IKU 16 : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Sasaran 5 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Tingkat Pengangguran Terbuka** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

16.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 16.1. Capaian Indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,96	4,9	131,75%

Sumber : Dinas KopUKMNaker Kota Bukittinggi 2024

Target Tahun 2023 = 6,96

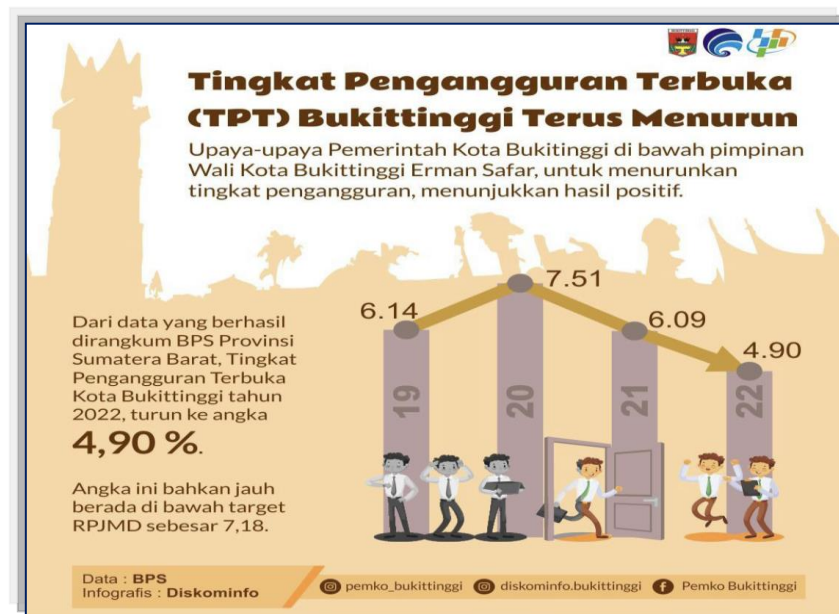
Realisasi Tahun 2023 = 4,9

$$\begin{aligned} \text{Selisih capaian} &= 6,96 - 4,9 \\ &= 2,06 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Selisih Capaian} &= (2,06 / 6,96) 100 \% \\ &= 29,6 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= 100\% + \% \text{ Selisih Capaian} \\ &= 100\% + 29,6 \% \\ &= 129,6 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 realisasi tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi menurut data BPS adalah 4,9 dari target 6,96. Hal ini berarti pencapaian Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam mengurangi tingkat pengangguran melebihi ekspektasi/target yang telah ditetapkan. Nilai tingkat pengangguran terbuka didapatkan dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Sehingga semakin rendah tingkat pengangguran terbuka maka semakin sedikit penduduk usia kerja yang menganggur. Selain itu pelatihan kerja meningkatkan produktivitas calon tenaga kerja serta tumbuhnya peluang usaha pasca Covid-19.



16.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Tingkat Pengangguran Terbuka** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 16.2 Perbandingan antara **Tingkat Pengangguran Terbuka** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	7,35	6,09	100,15 %
2022	7,18	4,9	129,6 %

2023	6,96	4,99	128,3
------	------	------	-------

Sumber : Dinas KopUKMNaker Kota Bukittinggi 2024

Pada Tahun 2021 dampak pandemi Covid 19 sudah mulai berkurang sehingga peluang dalam penambahan karyawan baik yang ada di daerah maupun di luar daerah mengalami pertumbuhan walaupun belum maksimal. Sementara pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih belum boleh dilaksanakan. Di tahun ini pelatihan tenaga kerja sudah mulai dilaksanakan kembali walaupun masih dalam skala yang kecil dalam rangka meningkatkan produktivitas calon tenaga kerja dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar kerja. Pada Tahun 2022 kondisi pasca Covid-19 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dan keadaan new normal membuka kembali peluang kerja baik di dalam daerah, luar daerah bahkan ke luar negeri sehingga tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik sehingga semakin banyak lapangan kerja yang tersedia yang dapat menyerap angkatan kerja yang berdampak kepada menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

16.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	2,79	1,39	1,33
Kab. Pesisir Selatan	5,97	4,61	4,75
Kab. Solok	4,67	5,89	4,99
Kab. Sijunjung	3,57	4,87	4,71
Kab. Tanah Datar	4,63	5,91	5,35
Kab. Padang Pariaman	8,41	6,60	6,69
Kab. Agam	5,06	4,93	4,96
Kab. Lima Puluh Kota	2,25	3,72	3,95
Kab. Pasaman	4,92	5,38	5,09
Kab. Solok Selatan	4,84	3,71	2,57
Kab. Dharmasraya	5,00	6,23	6,22
Kab. Pasaman Barat	5,02	6,33	6,01
Kota Padang	13,37	11,69	10,86

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Kota Solok	5,15	3,90	3,72
Kota Sawahlunto	6,38	5,00	4,98
Kota Padang Panjang	4,90	4,84	5,49
Kota Bukittinggi	6,09	4,90	4,99
Kota Payakumbuh	6,47	5,16	4,84
Kota Pariaman	6,09	5,19	5,68
Provinsi Sumatera Barat	6,52	6,28	5,94

Catatan: 2011-2017: menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035. Tahun 2016, Data tenaga kerja per Kabupaten/Kota tidak tersedia karena sampel tidak mencukupi. 2018-2021 menggunakan estimasi dari hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi sebesar 4.9 tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lain yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi pada tahun 2022 sebesar 6.09 dan pada tahun 2023 menjadi 4.99 berarti terdapat penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi sebesar 1.19 poin. Membaiknya pertumbuhan ekonomi serta terbukanya peluang pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Adanya subsidi bunga melalui tabungan Utsman memberikan kemudahan bagi tenaga kerja untuk memulai usaha mandiri sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Bulan Agustus 2023, jumlah Angkatan Kerja di Sumatera Barat sebanyak 3,02 juta orang, meningkat 156,16 ribu orang dari Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 69,61 persen, naik 0,31 persen poin dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,94 persen, turun sebesar 0,34 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Penduduk yang bekerja di Sumatera Barat pada Agustus 2023 sebanyak 2,84 juta orang, naik 156,76 ribu orang dibandingkan Agustus 2022 (2,69 juta orang). Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar penyerapan tenaga kerja adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan (0,58 persen poin), diikuti Sektor Jasa Lainnya (0,54 persen poin). Sebanyak 1,02 juta orang (35,81 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 1,07 persen poin dibanding Agustus 2022. Persentase setengah penganggur di Sumatera Barat naik sebesar 1,13 persen poin. Sebaliknya, persentase pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 0,04 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

16.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Faktor - faktor yang menyebabkan keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka diantaranya:

1. Peluang kerja telah terbuka luas di semua sektor perekonomian
2. Adanya peluang kerja ke luar negeri yang sudah boleh dilaksanakan
3. Adanya bantuan sarana usaha baik melalui perbankan atau melalui tabungan Utsman yang merupakan salah satu program prioritas Walikota sehingga merangsang pertumbuhan usaha bagi para pelaku usaha kecil menengah (UMKM)
4. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Bidang Tenaga Kerja mendorong peserta untuk membuka usaha mandiri berbekal dengan keahlian yang didapat

16.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Pemko Bukittinggi melahirkan kebijakan pengangguran yang berpihak kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya, melalui Tabungan Utsman yang dapat memberikan pembiayaan modal kepada warga kota, sehingga dengan modal usaha tersebut mereka dapat membuka usaha secara mandiri. Upaya inilah yang bisa dilakukan untuk dapat mengurangi angka pengangguran dalam dua tahun terakhir.

16.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\text{*Efisiensi} = 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)$$

$$= 100\% - \frac{(82,87\% \times 100\%)}{128,3}$$
$$= 67,37\%$$

16.7. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 16.6. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
BIDANG TENAGA KERJA	1,688,062,700	1,398,896,171	82.87%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,393,242,000	1,321,991,271	94.89%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,393,242,000	1,321,991,271	94.89%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,393,242,000	1321991271	94.89%

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	18,771,600	13,642,700	72.68%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	18,771,600	13,642,700	72.68%
Pelayanan antar Kerja	18,771,600	13642700	72.68%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	276,049,100	63,262,200	22.92%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	276,049,100	63,262,200	22.92%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,545,500	10,231,600	97.02%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,503,600	2,262,200	30.15%
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	258,000,000	50,768,400	19.68%

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

IKU 17 : Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Sasaran 6 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Angka Rata-rata Lama Sekolah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal

17.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 17.1. Capaian Indikator **Angka Rata-rata Lama Sekolah**

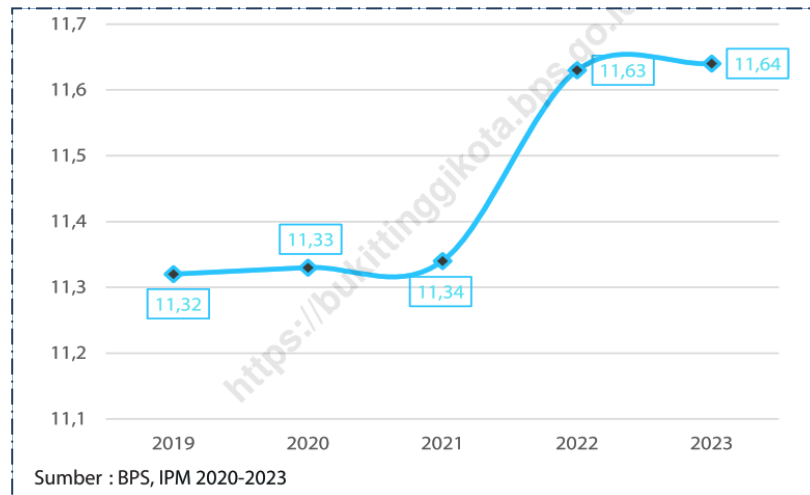
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,67	11,64	99,74%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2024

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indicator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. RLS mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 Tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tanhun yang mengulang). Indicator RLS

merupakan salah satu indicator yang digunakan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan.

Pada periode 2019-2023 RLS penduduk usia 25 Tahun ke atas memiliki tren peningkatan. Pada tahun 2019 RLS Kota Bukittinggi sebesar 11.32 tahun, angka tersebut meningkat hingga tahun 2023 mencapai 11,64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak mampu menempuh pendidikan selama 11-12 tahun. Angka ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program wajib belajar Sembilan tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.



17.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Angka Rata-rata Lama Sekolah** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 17.2 Perbandingan antara **Angka Rata-rata Lama Sekolah** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah		
	Target	Realisasi	Kinerja
2020	11.33	11.33	100%
2021	11.44	11.34	99%
2022	11.5	11.63	101%
2023	11,67	11.64	99,74%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2024

Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir.

17.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat [Metode Baru] (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	7,09	7,20	7,48
Kab. Pesisir Selatan	8,26	8,27	8,43
Kab. Solok	7,86	7,87	7,89
Kab. Sijunjung	8,11	8,12	8,30
Kab. Tanah Datar	8,61	8,62	8,90
Kab. Padang Pariaman	7,87	7,88	8,16
Kab. Agam	8,96	8,97	8,98
Kab. Lima Puluh Kota	7,99	8,07	8,08
Kab. Pasaman	8,09	8,10	8,11
Kab. Solok Selatan	8,28	8,32	8,41
Kab. Dharmasraya	8,47	8,55	8,56
Kab. Pasaman Barat	8,19	8,27	8,55
Kota Padang	11,58	11,59	11,60
Kota Solok	11,03	11,04	11,35
Kota Sawahlunto	10,17	10,32	10,43
Kota Padang Panjang	11,62	11,63	11,92
Kota Bukittinggi	11,33	11,34	11,63
Kota Payakumbuh	10,73	10,81	10,82
Kota Pariaman	10,59	10,67	10,78
Provinsi Sumatera Barat	8,99	9,07	9,18

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

17.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan pencapaian kini di dukung dengan lebih prioritasnya pembangunan di bidang pendidikan dengan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta telah dibayarkannya honorarium pegawai Non PNS pada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah disesuaikan dengan UMR, dan pemberian insentif bagi guru-guru di sekolah swasta

17.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Peningkatan bantuan untuk siswa miskin (alat tulis, buku paket, pakaian seragam, sepatu, tas dan biaya transportasi)

17.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\ &= \frac{100\% - (99,74\% \times 100\%)}{91,5\%} \\ &= \mathbf{9,01\%} \end{aligned}$$

17.7. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 17.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Program Pengelolaan Pendidikan			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	468,800,000	453,050,000	97%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	170,000,000	134,400,000	79%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	107,793,200	104,663,160	97%
Pengelolaan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan	42,913,300	39,873,900	93%

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

IKU 18 : Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Sasaran 6 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Harapan Lama Sekolah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang.

18.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 18.1. Capaian Indikator Kinerja **Harapan Lama Sekolah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Harapan Lama Sekolah	15	12.3	82%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi 2023

Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang 12,3 tahun
-----------------------------	--

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah 9 tahun sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP untuk umur 7 s/d 15 Tahun. data capaian didapat dari BPS melalui <https://bukittinggikota.bps.go.id/>

18.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Harapan Lama Sekolah** an Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 18.2 Perbandingan antara **Harapan Lama Sekolah 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Harapan Lama Sekolah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	14.99	14.97	99.87%
2021	15	14.98	99.87%
2022	15.2	14.99	98.62%
2023	15	12,3	82%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2023

Terjadinya pengurangan persentase harapan lama sekolah dari tahun sebelumnya karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut.

Angka terkait Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2021 melalui Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022 adalah 14,98. Sementara untuk pencapaian target kinerja Tahun 2022 tercatat 14.99.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas variabel ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2016, Harapan Lama Sekolah yang ditargetkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 14,7 tahun, dan terealisasi sebesar 14,92 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 79%. Artinya, setiap anak pada usia tertentu pada tahun 2016, akan memiliki harapan untuk bersekolah pada umur tertentu selama 14,92 tahun, atau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi pada semester 6.

Pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sekolah merupakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, sementara untuk jajaran pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, baik tingkat kota maupun provinsi. Perguruan tinggi negeri sesuai kewenangannya dikelola oleh pemerintah, sementara keberadaannya sangat berpengaruh pada harapan lama sekolah di Bukittinggi. Karena itu program Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini adalah dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi.

18.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat [Metode Baru] (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	12,82	12,89	12,89
Kab. Pesisir Selatan	13,32	13,33	13,35
Kab. Solok	13,04	13,05	13,30
Kab. Sijunjung	12,37	12,38	12,64
Kab. Tanah Datar	14,33	14,34	14,59
Kab. Padang Pariaman	13,67	13,68	13,93
Kab. Agam	13,87	13,88	13,88
Kab. Lima Puluh Kota	13,29	13,30	13,40
Kab. Pasaman	12,80	12,81	13,05
Kab. Solok Selatan	12,71	12,72	12,73
Kab. Dharmasraya	12,43	12,44	12,51
Kab. Pasaman Barat	13,61	13,68	13,69
Kota Padang	16,52	16,53	16,54
Kota Solok	14,32	14,33	14,34
Kota Sawahlunto	13,17	13,18	13,42
Kota Padang Panjang	15,06	15,07	15,07
Kota Bukittinggi	14,97	14,98	14,99
Kota Payakumbuh	14,26	14,27	14,29
Kota Pariaman	14,54	14,55	14,61

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat [Metode Baru] (Tahun)		
	2020	2021	2022
Provinsi Sumatera Barat	14,02	14,09	14,10

Source : Socio Economic National Survey

18.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan pencapaian kini di dukung dengan lebih prioritasnya pembangunan di bidang pendidikan dengan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta telah peningkatan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

18.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Peningkatan bantuan untuk siswa miskin (alat tulis, buku paket, pakaian seragam, sepatu, tas dan biaya transportasi)

18.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned}
 \text{*Efisiensi} &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\
 &= \frac{100\% - (97,65\% \times 100\%)}{98,62\%} \\
 &= 0,99\%
 \end{aligned}$$

18.7. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 18.6. Program/ kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Program Pengelolaan Pendidikan			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	468,800,000	453,050,000	97%
Pengelolaan Pendidikan sSekolah Menengah Pertama	170,000,000	134,400,000	79%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	107,793,200	104,663,160	97%

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42,913,300	39,873,900	93%
---	------------	------------	-----

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2024

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

IKU 19 : Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik

Sasaran 6 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Kemampuan peserta didik dalam mencapai kematangan pada kesadaran berpikir dan bertindak untuk menjalankan peran manusia sebagai makhluk sosial di dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya

19.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 19.1. Capaian Indikator **Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik	50	58,53	117,06 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2024

Berdasarkan hasil Rapor pendidikan pada Sub Indikator Survey Karakter, maka capaian kecerdasan sosial peserta didik Kota Bukittinggi memiliki capaian yang tinggi dbandingkan dengan rata-rata capaian Sumatera Barat

19.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 19.2 Perbandingan antara **Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021			
2022	48%	88.30%	184%
2023	50	58,53%	117,06

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2024

19.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian indikator Tingkat kecerdasan sosial peserta didik adalah tingkat kerjasama antara orangtua dan guru di sekolah dalam memprogramkan dan melaksanakan pembinaan karakter di sekolah

19.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5) di sekolah. Karena P5 ini merupakan program pengganti pembinaan karakter di sekolah.

19.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\ &= \frac{100\% - (117,06\% \times 100\%)}{96,31\%} \\ &= 21,54\% \end{aligned}$$

19.6. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 19.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Rp 135,670,000.00	Rp 130,670,000.00	96,31%

Sasaran 7 : Meningkatnya Kehidupan Keagamaan

IKU 20 : Indeks Kesalehan Sosial

Sasaran 7 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kesalehan Sosial** yang secara defenisi operasional dapat diartikan indeks capaian pembangunan manusia terkait kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika di ruang publik, melestarikan lingkungan dan kepatuhan kepada agama.

20.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Tabel 20.1. Tabel Capaian Indikator **Indeks Kesalehan Sosial**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesalehan Sosial	84,2	85,109	101,32

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2023

Pengukuran kinerja terhadap indikator Indeks Kesalehan Sosial tidak dilakukan pada Tahun 2023, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran guna membiayai pelaksanaan survey oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Namun demikian, kondisi kesalehan sosial masih disajikan guna memberikan gambaran terhadap hasil survey yang pernah dilaksanakan pada Tahun 2022.

Penelitian tentang Indeks Kesalehan Sosial Kota Bukittinggi merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Bapelitbang Kota Bukittinggi bekerja sama dengan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk mengetahui perkembangan kesalehan sosial masyarakat Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Tim Peneliti yang dipercayakan kepada Civitas Akademika UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi juga dengan usaha sungguh-sungguh pula mewujudkan terlaksananya penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana diamanatkan

Dari beberapa dimensi yang menentukan terhadap IKS yang dihitung, di antaranya berdasarkan dimensi kerjasama, kepedulian sosial, relasi antar manusia atau toleransi dan menjaga ketertiban umum kemudian hasil penghitungan tersebut dikategorikan ke dalam capaian sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Pengkategorian ini dilakukan dengan rentang nilai dan kemudian diinterpretasikan dengan sangat tinggi dengan A, tinggi dengan B, rendah dengan C dan sangat rendah dengan D, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Kategori Mutu IKS dan Kategori Capaian IKS

Nilai persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Kesalehan Sosial	Kategori Capaian IKS
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Rendah
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Sedang
3	3,0644 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Tinggi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,0	A	Sangat Tinggi

Berdasarkan pengkategorian dan pengintervalan tersebut, ternyata mutu IKS Kota Bukittinggi dari hasil survey yang dilakukan pada tahun 2022 ini tergolong tinggi dengan reratanya berada pada angka 85,1090, sebagaimana dapat dilihat pada table;

Jenis Indeks	Jenis Indeks	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Kesalehan Sosial	Tingkat Kesalehan Sosial
IKS	3,4043	85,1090	B	Tinggi

Tingginya IKS Kota Bukittinggi ini sangat dipengaruhi oleh masing-masing umat beragama telah melaksanakan ajaran agama untuk kepentingan kehidupan sosialnya. Umat beragama di Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai aktivitas sosial dengan baik yang terlihat dari nilai-nilai dimensi kesalehan sosial dari masyarakat Kota Bukittinggi pada masing-masing dimensi sikap kesalehan sosial; yakni mulai dari dimensi kerjasama, solidaritas sosial, menjaga ketertiban umum, relasi antar umat, dan seterusnya pada umumnya telah dilakukan dengan baik, bahkan ada yang sangat tinggi, seperti toleransi dan menjaga ketertiban umum sebagai kewajiban warga negara sebagaimana dapat dilihat pada tabel

Unsur Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Nilai Interval (NI)	Mutu Kesalehan Sosial	Kategori Capaian IKS
Kerjasama	3.4148	B	Tinggi
Kepedulian/Solidaritas Sosial	3.2329	B	Tinggi
Toleransi dan Relasi Antar Manusia	3.5593	A	Sangat Tinggi
Ketertiban Umum (Sub Dimensi Kewajiban Warga Negara)	3.7733	A	Sangat Tinggi
Ketertiban Umum (Sub Dimensi Keterlibatan Dalam Organisasi)	3.3408	B	Tinggi
Ketertiban Umum (Sub Dimensi Keterlibatan dalam Pencegahan Kekerasan)	3.3721	B	Tinggi
Ketertiban Umum (Sub Dimensi Melestarikan Lingkungan)	3.0948	B	Tinggi
Rata-rata Capaian IKS	3.3983	B	Tinggi

Dari dimensi kesalehan sosial yang diukur di atas, diperoleh rerata sikap toleransi dan relasi antar umat manusia sangat tinggi dengan nilai interval 3.5593 dan begitu pula dengan menjaga ketertiban umum sebagai kewajiban warga negara berada nilai intervalnya sangat tinggi, dibandingkan nilai-nilai dimensi yang lainnya, yaitu 3.7733. Sementara dimensi-dimensi yang lainnya berada pada rerata kategori tinggi. Dengan demikian umat beragama di Kota Bukittinggi telah memerankan agama dalam sikap sosial kesehariannya. Ajaran agama telah mendorongnya untuk membangun sikap yang toleran, sikap kerjasama, sikap solidaritas dan sikapnya sebagai warga negara. Sebagai masyarakat yang kota yang heterogen ternyata masyarakatnya juga sudah memiliki sikap sosial yang sangat toleran mampu hidup berdampingan secara damai

20.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 20.2 Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	IKS		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	84,2	85,109	101,32

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2023

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengukuran IKS yang baru dilaksanakan pada Tahun 2022, sehingga data perbandingan tidak dapat ditayangkan dan hanya data capaian kinerja atas Tahun 2022 saja yang di tayangkan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan survey IKS dilakukan Untuk mengetahui tentang Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kota Bukittinggi dilakukan dengan pengumpulan data kepada kelompok masyarakat atau responden atas dasar beberapa pertimbangan, mulai dari pertimbangan domisili, gender, usia, agama, suku bangsa, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, semuanya berjumlah sebanyak 600 orang. Dari jumlah 600 orang sebagai basis pengumpulan data itu, tingkat ketersebarannya atau distribusinya bermacam-macam. Data dikumpulkan terhadap responden dengan kriteria domisili, gender, Usia, agama, suku bangsa, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.

20.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap tinggi atau rendahnya IKS Kota Bukittinggi. Diantaranya teridentifikasi faktor yang mempengaruhi IKS tersebut adalah adanya faktor pengetahuan, habituasi, sosio demografi, afiliasi organisasi keagamaan dan adat, serta ritualitas keagamaan masyarakat. Seberapa besar pengaruhnya masing-masing aspek tersebut menentukan IKS telah dipetakan berdasarkan rerata yang diperoleh pada masing-masing kecamatan, sampai pada rerata keseluruhan capaian IKS Kota Bukittinggi

Tingkat pengetahuan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap IKS jika dibandingkan dari masing-masing faktor lainnya. Seberapa besarnya tingkat pengetahuan masyarakat pada masing-masing kecamatan di Kota Bukittinggi menentukan IKS tersebut, ternyata pada Kecamatan Guguk Panjang tingkat pengetahuan tersebut berada pada kategori yang sangat tinggi menentukan IKS di kecamatan tersebut dengan rerata 3,645, sementara pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh berada pada rerata 3,500 kategori tinggi dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan rerata 3,353 berada pada kategori tinggi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel:

No	Kecamatan	Rata-rata	Kategori
1	ABTB	3,500	Tinggi
2	GP	3,645	Sangat Tinggi
3	MKS	3,353	Tinggi

Habituaasi atau kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya sebagai seorang umat beragama juga memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam menentukan IKS pada masing-masing kecamatan, dimana reratanya berada pada kategori tinggi, seperti di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh reratanya habituaasi masyarakatnya 3,316, di Kecamatan Guguk Panjang rerata habituaasi masyarakatnya 3,424 dan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan rerata 3,274

20.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

IKS Kota Bukittinggi tahun 2022, berada pada kategori tinggi ini memiliki arti penting dalam mengetahui bahwa sikap sosial umat beragama masyarakat Kota Bukittinggi yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan Kota Bukittinggi. Berdasarkan pada aspek-aspek penentu IKS Kota Bukittinggi dikemukakan beberapa rekomendasi kebijakan dan rencana aksi dari hasil penelitian ini seperti pada tabel berikut:

NO	Dimensi/ Faktor Penentu	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Aksi
I.	Pengetahuan	Penguatan Pendidikan karakter	<ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan kompetensi guru anti diskriminasi b) Penguatan program <i>tahfiz</i> dan ibadah <i>qira'ah</i> bagi setiap kelompok usia c) Optimalisasi program BKMT d) Optimalisasi kegiatan keagamaan bagi kelompok usia lanjut e) Kegiatan tahfiz untuk kelompok lanjut usia f) Optimalisasi Pendidikan Karakter dengan <i>field based training</i> di tingkat usia dini
		Penguatan moderasi beragama	<ul style="list-style-type: none"> a) Sosialisasi berbagai program Kementerian Agama tentang moderasi beragama di tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi b) Sosialisasi program moderasi beragama di forum-forum pemuda lintas agama c) Sosialisasi program moderasi beragama di forum-forum pengajian dan di rumah-rumah ibadah d) sosialisasi dan edukasi kepada para Penyuluh Agama Islam tentang moderasi beragama e) Mengusut tegas kasus-kasus intoleransi dalam beragama

NO	Dimensi/ Faktor Penentu	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Aksi
		Penguatan Pendidikan sadar lingkungan	<p>a) Kebijakan pengadaan ruang terbuka hijau dan ruang publik ramah disabilitas, ramah anak, dan lansia</p> <p>b) Mengefektifkan pengolahan sampah organik dan anorganik di tingkat kelurahan</p> <p>c) Melarang penggunaan kemasan plastik sekali pakai di ruang publik.</p> <p>d) Mempersiapkan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan.</p> <p>e) Membuat regulasi terkait dengan revitalisasi budaya lokal dan penjagaan lingkungan</p> <p>f) Regulasi penjadwalan penggunaan listrik</p> <p>g) Sosialisasi cinta produk dalam negeri</p> <p>h) Program pengelolaan persampahan dan daur ulang di tingkat kelurahan dan kecamatan</p>
			<p>i) Sosialisasi program-program Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</p> <p>j) Sosialisasi program-program <i>Green Economics</i></p> <p>k) Sosialisasi program-program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup</p>
		Penguatan Pengetahuan tentang budaya	<p>a) Pendidikan multikultural dalam kurikulum</p> <p>b) Keterlibatan praktisi adat dalam kegiatan ekstra kurikuler atau muatan lokal</p> <p>c) Pendidikan multikultural dalam kurikulum</p> <p>d) Penguatan literasi budaya di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi</p> <p>e) Melestarikan budaya Minang dalam berbagai event nasional dan internasional</p>
II.	Ritual Keagamaan	Optimalisasi fasilitas dan infrastruktur	<p>a) Menginisiasi pemakaman umum</p> <p>b) Penataan sarana ibadah dan kelompok-kelompok keagamaan</p> <p>c) Pembinaan materi dakwah oleh tokoh-tokoh agama</p> <p>d) Penataan penghimpunan dana-dana di jalanan</p>
		Penguatan Regulasi	<p>a) Regulasi sertifikasi ulama dan pemuka agama lainnya</p> <p>b) Jaminan kebebasan beribadat untuk semua umat beragama, sehingga masing-masing tidak terdiskriminasi</p> <p>c) Penganekaragaman materi dakwah; Dakwah Lingkungan, Dakwah Tertib Lalu Lintas, Dakwah Ekonomi, dll.</p>
III.	Afiliasi	Optimalisasi Organisasi Keagamaan	<p>a) Mengoptimiliasi organisasi keagamaan pemuda</p> <p>b) Pembinaan sanggar budaya di tingkat kelurahan</p> <p>c) Menyelenggarakan Forum Diskusi Lintas Agama</p> <p>d) Mengaktifkan berbagai forum yang dapat membangun anti diskriminasi dalam beragama, seperti mendukung program Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB), program lintas agama yang lainnya.</p>
		Aktif dalam mengelola rumah ibadah	<p>a) Penataan rumah-rumah ibadah dan kelompok-kelompok keagamaan oleh berbagai afiliasi keagamaan</p> <p>b) Kerjasama Pemko dalam mensosialisasikan nilai nilai moderasi beragama</p> <p>c) Melakukan berbagai macam program penguatan pendidikan agama melalui ekstra kurikuler berbasis rumah ibadah</p>

NO	Dimensi/ Faktor Penentu	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Aksi
		Aktif dalam forum komunikasi lintas agama	Melaksanakan program pembinaan umat beragama di Kota Bukittinggi secara berkelanjutan yang tidak diskriminatif melalui kerjasama dengan masing-masing agama dan merancang program yang dapat menyatukan sikap umat beragama dalam membangun hubungan sosial yang lebih baik.
		Aktif dalam organisasi /institusi/ forum-forum adat	a) Mengaktifkan berbagai forum-forum adat yang dapat membangun anti diskriminasi dalam beragama b) Memperkuat eksistensi dan peran lembaga adat dan lembaga keagamaan untuk berperan aktif mengawasi dan memperkuat habituasi umat beragama di Kota Bukittinggi.
IV.	Habituasi	Penguatan Semangat Musyawarah dan gotong royong	a) Memberikan apresiasi kepada kelurahan-kelurahan yang berprestasi dalam merawat lingkungan. b) Penguatan Dasawisma masing-masing kelurahan. c) Optimalisasi peran KAN/ tokoh adat. d) Mengefektifkan peran Badan Musyawarah (Bamus) untuk mempertahankan semangat gotong royong
		Penguatan kebiasaan baik di lingkungan keluarga dan tetangga	a) Sosialisasi sadar pajak, sadar lalu lintas, dan lingkungan sedari dini b) Sosialisasi Keluarga Berencana dan program Kementerian Kesehatan lainnya c) Sadar Wabah penyakit menular
V	Kebijakan pemerintah	Sosialisasi Kebijakan Moderasi Beragama	Melaksanakan kebijakan-kebijakan bersama dengan pihak terkait untuk memperkuat moderasi beragama melalui sehingga sikap masing-masing umat beragama menunjukkan sikap beragama yang <i>rahmatallah'alamiin</i> ;
		Kebijakan Program Keluarga Bahagia	Merancang berbagai program pendukung dari program Keluarga Bahagia yang sudah digagas oleh Pemerintah Pusat
		Kebijakan Inovatif Pemko	Merancang berbagai program program yang inovatif dalam pelayanan publik dan keummatan yang mendukung moderasi beragama
		Kebijakan pajak, retribusi, dan lainnya	a) Mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung pengembangan kota b) Mensosialisasikan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah c) Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah
VI	Ritual	Optimalisasi Kegiatan Ibadah dan Berderma	a) Optimalisasi badan pengumpul zakat (BAZNAS) b) Merevitalisasi program Magrib Mengaji/ Didikan Shubuh c) Memperkuat perlindungan keagamaan untuk lansia d) Penataan kegiatan penghimpunan dana ibadah di ruang publik e) Penataan sarana rumah ibadah di lingkungan publik

IKS Kota Bukittinggi tahun 2022, berada pada kategori tinggi. Hal ini memiliki arti penting dalam mengetahui bahwa sikap sosial umat beragama masyarakat Kota Bukittinggi yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan. Aspek yang mempengaruhi kesalehan sosial

masyarakat ini (aspek kerjasama, solidaritas, keterlibatan sebagai warga negara dan melestrikan lingkungan) berada pada pada kategori tinggi. Bahkan pada dimensi toleransi dan menjaga keterlibatan sebagai warga negara dalam menjaga ketertiban umum berada pada kategori yang sangat tinggi. Kondisi ini membuktikan bahwa kesalehan sosial umat beragama di Kota Bukittinggi memiliki peran strategis dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kota Bukittinggi.

Jika ditilik lebih jauh, aspek-aspek penentu IKS Kota Bukittinggi terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi, di antaranya:

1. Pengetahuan

Aspek pengetahuan ini memiliki kontribusi yang tinggi terhadap penentuan IKS Kota Bukittinggi. Hal ini bermakna bahwa pendidikan sebagai agen transformasi dan membentuk karakter sikap sosial masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan; bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat maka semakin tinggi pula kesalehan sosial dari masyarakat itu. Untuk memperkuat kontribusi aspek ini terhadap IKS Kota Bukittinggi ke depan diperlukan kebijakan, di antaranya:

- a. Memperkuat pendidikan karakter anak usia sekolah, dengan pendekatan nilai-nilai budaya lokal dan adat istiadat;
- b. Perlu melakukan program-program pendidikan keagamaan dasar untuk anak usia sekolah, seperti memperbanyak program tahfiz, didikan subuh, literasi agama dan sejenisnya;
- c. Memperkuat perlindungan keagamaan untuk lansia dengan memperhatikan pelaksanaan program-program pemberdayaan kepada lansia supaya kesalehan sosial tetap berkelanjutan dalam segala stratifikasi umur.

2. Habitiasi

Habitiasi memiliki kontribusi penentu IKS Kota Bukittinggi; dilihat dari aspek-aspek penentu habitiasi. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengaruh habitiasi pada IKS yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di antaranya:

- a. Melakukan berbagai macam program penguatan pendidikan agama melalui ekstra kurikuler berbasis rumah ibadah;
- b. Memperkuat eksistensi dan peran lembaga-lembaga adat dan lembaga-lembaga keagamaan untuk berperan aktif mengawasi dan memperkuat habitiasi umat beragama di Kota Bukittinggi.

3. Kerjasama

Aspek kerjasama juga memberikan kontribusi penentu terhadap IKS Kota Bukittinggi; di antara kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam memperkuat eksistensi kerjasama ini menentukan IKS Kota Bukittinggi ke depan, adalah:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan bersama dengan pihak terkait untuk memperkuat moderasi beragama melalui sehingga sikap masing-masing umat beragama menunjukkan sikap beragama yang rahmatall'alamiin;
- b. Melaksanakan program pembinaan umat beragama di Kota Bukittinggi secara berkelanjutan yang tidak diskriminatif. Hal ini dapat dilakukan bekerjasama dengan masing-masing tokoh agama membuat program yang dapat menyatukan sikap umat beragama dalam membangun hubungan sosial yang lebih baik.

4. Ritual dan Praktek Keagamaan

Pada aspek ini, bagian yang paling penting dilakukan oleh Pemerintah Kota, di antaranya:

- a. Membuat kebijakan untuk memberikan jaminan kebebasan beribadat untuk semua umat beragama, sehingga masing-masing tidak terdiskriminasi. Kebijakan ini sangat berkaitan erat dengan supaya masing-masing umat beragama memiliki tindakan sosial yang berkontribusi untuk kepentingan kemajuan Bukittinggi yang semakin heterogen;
- b. Mengaktifkan berbagai forum yang dapat membangun anti diskriminasi dalam beragama, seperti mendukung program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), program lintas agama dan lain sebagainya.

SASARAN 8 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

IKU 21 : Angka Harapan Hidup (Tahun)

Sasaran 8 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup yang secara defenisi operasional dapat diartikan Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu.

21.1. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 21.1. Capaian Indikator Angka Harapan Hidup (Tahun)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Hidup (Tahun)	75,07	75,33	100,35 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2024

Angka harapan hidup pada tahun 2022 adalah 74,82 dimana capaiannya terhadap target adalah sebesar 100,35%

21.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 21.2 Perbandingan antara Angka harapan hidup 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Angka Harapan Hidup		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	74.7	74.5	99.73
2022	74.85	74.82	99.96
2023	75,07	75,33	100,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2024

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan salah satu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang mewakili indikator umur harapan hidup saat lahir. Pentingnya UHH terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan secara tidak langsung berkaitan erat dengan umur harapan hidup seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. UHH merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang masih akan dijalani seseorang setelah mencapai umur tertentu, pada tahun tertentu, pada situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

21.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 21.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kab/ Kota di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota2	Angka Harapan Hidup (Persen)		
	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	69,31	69,47	69,59
Kepulauan Mentawai	64,68	64,73	64,73
Pesisir Selatan	70,73	70,86	70,96
Kabupaten Solok	68,34	68,58	68,79
Sijunjung	66,02	66,21	66,36
Tanah Datar	69,73	69,94	70,12
Padang Pariaman	68,58	68,79	68,97
Agam	72,17	72,37	72,53
Lima Puluh Kota	69,70	69,79	69,84

Kabupaten/Kota ²	Angka Harapan Hidup (Persen)		
	2019	2020	2021
Pasaman	67,18	67,40	67,59
Solok Selatan	67,58	67,81	68,01
Dharmasraya	71,10	71,33	71,53
Pasaman Barat	67,67	67,82	67,94
Padang	73,57	73,65	73,69
Kota Solok	73,45	73,61	73,73
Sawahlunto	69,87	70,00	70,10
Padang Panjang	72,77	72,82	72,82
Bukittinggi	74,22	74,38	74,50
Payakumbuh	73,61	73,74	73,84
Pariaman	70,15	70,28	70,38

Apabila dibandingkan dengan angka harapan hidup Propinsi Sumatera Barat maka angka harapan hidup masyarakat di Kota Bukittinggi lebih tinggi daripada angka harapan hidup rata-rata masyarakat di Propinsi Sumatera Barat

21.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Angka harapan hidup masyarakat di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya pola perilaku hidup sehat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tercatat rata-rata penduduk Kota Bukittinggi yang lahir tahun 2019 akan dapat menjalani kehidupannya hingga umur 74,22 tahun dan untuk penduduk yang lahir tahun 2023 menjadi lebih panjang umurnya hingga 75,33 tahun

21.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

1. Penjarangan faktor resiko penyakit degeneratif pada kelompok usia produktif
2. Peningkatan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, diabetes melitus
3. Peningkatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut

21.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\ &= \frac{100\% - (84,12\% \times 100\%)}{100,35\%} \\ &= \mathbf{17,17} \end{aligned}$$

21.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 21.7 Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Angka Harapan Hidup

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	134805200	115281100	85.52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98396604	79548618	80.84
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	102301700	94752160	92.62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	87839600	69470410	79.09
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24547800	24228514	98.70
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	68819000	64477200	93.69
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	58833500	57129055	97.10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	168946864	166121005	98.33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	302107600	275739370	91.27
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	255958304	223888904	87.47
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10482739300	10433777600	99.53
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	687895450	615689352	89.50

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2024

Sasaran 8 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

IKU 22 : Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Sasaran 8 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Capaian

pembangunan kesehatan yang meliputi kesehatan balita, kesehatan ibu, penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, dan status gizi

22.1. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 22.1. Capaian Indikator Kinerja **Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0,7110	0,6841	96,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2024

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat adalah Capaian pembangunan kesehatan yang meliputi kesehatan balita, kesehatan ibu, penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, dan status gizi. Data IPKM Bukittinggi yang tersedia sebagaimana dipublish oleh Bapelitbang Kemenkes adalah data IPKM tahun 2018, belum ada update data terbaru. dimana realisasi masih di bawah target atau 96,22%

22.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 22.2 Perbandingan antara **Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	0.7002	0.6841	97.70
2022	0.7056	0.6841	96.95
2023	0,7110	0,6841	96,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2024

Karena belum tersedianya data yang terbaru dari Kemenkes tentang IPKM ini, maka masih menggunakan data yang lama yaitu data tahun 2018 dimana realisasi IPKM Kota Bukittinggi masih di bawah target yang ditetapkan.

22.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 22.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kab/Kota di Sumatera Barat

Kab/ Kota	2021	2022
Prov. Sumatera Barat	0.6177	0.6177
Kota Bukittinggi	0.6841	0.6841

Kab. Lima Puluh Kota	0.6034	0.6034
----------------------	--------	--------

Dibandingkan dengan IPKM Propinsi Sumbar dan Kab. Lima Puluh Kota, IPKM Kota Bukittinggi masih lebih tinggi.

22.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan pencapaian indeks pembangunan kesehatan masyarakat ini ditentukan oleh capaian pembangunan kesehatan yang meliputi kesehatan balita, kesehatan ibu, penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, dan status gizi.

22.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Pemetaan Sasaran dengan melibatkan Lintas Sektoral Terkait, Promosi Kesehatan secara berkelanjutan, membuat inovasi dalam meningkatkan capaian IPKM

22.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned}
 *Efisiensi &= 100\% \quad (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\
 &= \frac{\text{serapan anggaran}}{\text{anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{91,34}{96,95} \times 100 \\
 &= 91,34
 \end{aligned}$$

22.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 22.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98396604	79548618	80.84
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98396604	79548618	80.84
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	102301700	94752160	92.62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	87839600	69470410	79.09
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	255958304	223888904	87.47
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	318736115	291515837	91.46
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	58833500	57129055	97.10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	168946864	166121005	98.33

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	687895450	615689352	89.50
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	302107600	275739370	91.27
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10482739300	10433777600	99.53

Sasaran 8 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

IKU 23 : Prevalensi Stunting (%)

Sasaran 8 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama : **Prevalensi Stunting** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase anak dibawah lima tahun yang mengalami kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) menggunakan standar WHO:



23.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 23.1. Capaian Indikator **Pravelansi Stunting**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi Stunting	12,5	16.8	134,4 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2024

Pevalensi stunting Kota Bukittinggi tahun 2022 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, adalah sebesar 16,8, hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2023 belum dipublish.



23.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Prevalensi Stunting** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 23.2 Perbandingan antara **Prevalensi Stunting 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Prevalensi Stunting		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	14.1	19	134,75
2022	13.3	16.8	126,31
2023	12,5	16,8	134,4

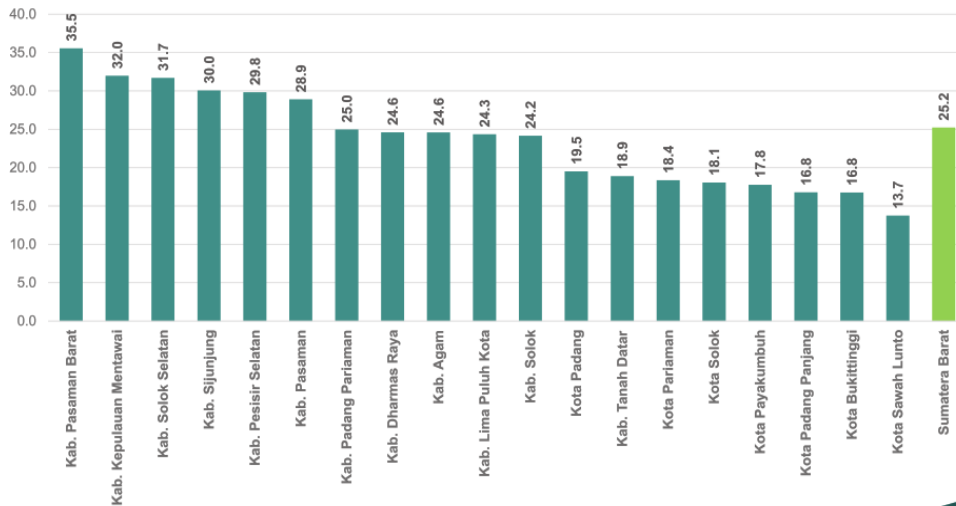
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2024

Dibandingkan dengan prevalensi stunting Kota Bukittinggi tahun sebelumnya, maka pada tahun 2022 ini terjadi penurunan sebesar 2,2 point dari prevalensi stunting tersebut. Namun apabila dibandingkan dengan target RPJMD angka ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

23.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Gambar 23.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kab/Kota di Sumatera Barat

PREVALENSI BALITA STUNTED (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT, SSGI 2022



Prevalensi stunting untuk kota Bukittinggi sudah berada di bawah prevalensi stunting propinsi Sumatera Barat.

23.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab belum berhasilnya pencapaian indikator prevalensi stunting adalah dengan pemantauan pertumbuhan di posyandu yang belum berjalan sesuai seharusnya. Selain itu juga dilakukan beberapa alternative solusi yangtelah dilakukan dalam pencapaian indicator diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas kader dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dengan melakukan pelatihan untuk kader
2. Melakukan kerja sama dengan Universitas Fort De Kock untuk meningkatkan jumlah penimbangan balita
3. Mempersiapkan media yang dibutuhkan dalam melakukan pemerikasann Pertumbuhan dan Perkembangan Balita (Antropometri)

23.5. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 23.5 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	134805200	115281100	85.52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	302107600	275739370	91.27

Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Air

IKU 24 : Indeks Kualitas Air

Sasaran 9 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Air** yang secara defenisi operasional dapat diartikan indeks kondisi air suatu daerah menggunakan metode indeks pencemar.

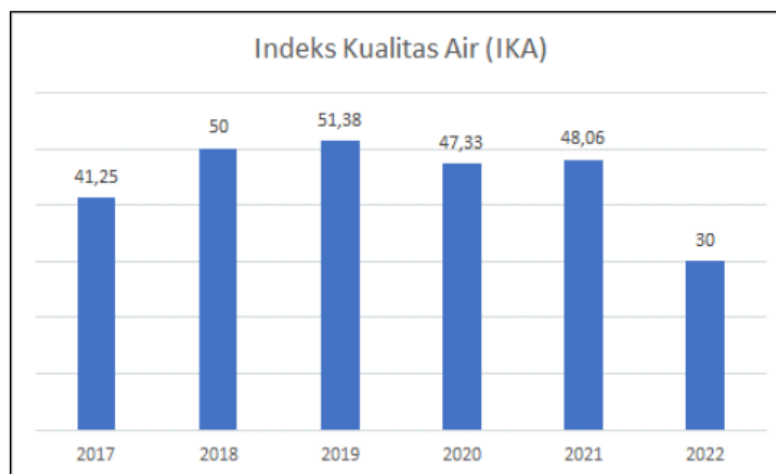
Indeks Kualitas Air adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survey kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter. Nilai indeks yang semakin tinggi akan menunjukkan kualitas air yang semakin baik pula.

24.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 24.1 Capaian Indikator **Indeks Kualitas Air**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	56.09	30	53,48 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2024



Gambar 3.28 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2023

Indeks kualitas air (IKA) menggambarkan kualitas badan air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa nilai 8 parameter kualitas air (DO, COD, TSS, BOD, E Coli, Total Coliform, Total Phosphat) yang diukur pada 3 sungai besar di Kota Bukittinggi. IKA digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang kompleks dalam satu informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk pengambil kebijakan dalam analisis lingkungan. Secara umum trend IKA Kota Bukittinggi cenderung fluktuatif bahkan IKA pada tahun 2022 mempunyai nilai terendah sejak 6 tahun lalu. Nilai IKA 0-44 termasuk pada kategori jelek, artinya kualitas air hampir selalu buruk, terancam dan tidak memenuhi standar. Berdasarkan pengukuran parameter Total Suspended Solid (TSS) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi pada tahun 2022, tidak terdapat konsentrasi TSS yang melebihi baku mutu air kelas 1 pada Lampiran VI Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada sungai-sungai yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi, baik pada bagian hulu maupun hilir.

Dibandingkan dengan data tahun 2019 di mana pada hulu dan hilir Batang Masang terdapat konsentrasi TSS yang melebihi baku mutu kelas 1. Pengukuran pada hulu Batang Masang (yang berada pada wilayah administrasi Kota Bukittinggi) sudah menunjukkan konsentrasi TSS yang cukup tinggi (181,75 mg/L), hal ini mengindikasikan tingginya konsentrasi TSS ini terjadi lintas Kabupaten/Kota. Salah satu penyebab tingginya padatan terbawa pada aliran sungai adalah karena perubahan tutupan lahan bervegetasi sehingga terjadi erosi tanah melalui aliran air

Secara umum Kota Bukittinggi dilalui oleh 3 sungai besar dan anak sungaisungai kecil. Ketiga sungai besar tersebut adalah Batang Tambuo, Batang Sianok dan Batang Agam. Batang Agam, merupakan sungai dengan kapasitas debit air potensial yang telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Cakupan wilayah administratif kota Bukittinggi yang dilalui oleh ketiga sungai besar tersebut dapat dilihat pada Tabel

No	Nama Sungai / Batang	Lebar (m)	Kecamatan Yang Dilalui
1.	Batang Tambuo	7	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Birugo Tigo Baleh • Mandiangin Koto Selayan
2.	Batang Masang	12	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Birugo Tigo Baleh • Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan
3.	Batang Agam	6	<ul style="list-style-type: none"> • Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan

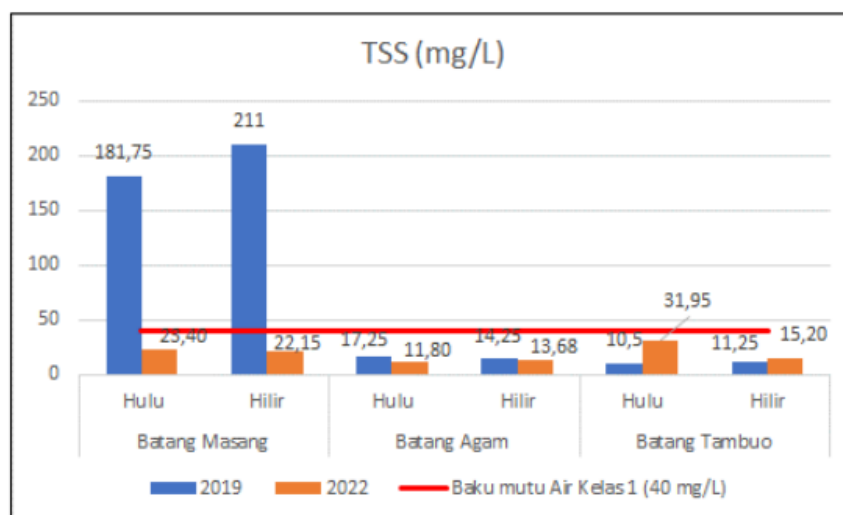
Sumber : RDTR Kota Bukittinggi, 2017

Berdasarkan perbandingan data debit sungai-sungai di Kota Bukittinggi pada tahun 2013 dan 2019 (Gambar 3.27), terdapat penurunan debit maksimal rata-rata 27% dan 51% untuk debit minimum. Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi penurunan debit aliran sungai ini adalah;

- Karakteristik hujan, seperti intensitas hujan, lama hujan, dll.
- Karakteristik daerah aliran sungai, seperti jenis tanah, tutupan lahan, topografi, dll

Selain penurunan debit, kualitas sumber air seperti air sungai, air embung, air tanah/sumur masih menjadi permasalahan dan isu prioritas bidang lingkungan hidup di Kota Bukittinggi. Setiap tahunnya cenderung terjadi penurunan kualitas air yang disebabkan oleh:

- Keterbatasan sarana pengolahan limbah domestik,
- Ketidapatuhan industri terhadap peraturan pembuangan air limbah.
- Belum terolahnya air limbah peternakan, serta
- Pembuangan sampah ke sungai



Gambar 3.29 Perbandingan TSS Sungai Kota Bukittinggi

Sumber: Diolah dari DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2020 dan 2023

Secara umum parameter Biological Oxygen Demand (BOD) pada semua sungai di Kota Bukittinggi melebihi batu mutu baik tahun 2022 maupun tahun 2019 (kecuali di hulu dan hilir Batang Masang pada tahun 2019). Konsentrasi BOD yang cukup tinggi terdapat pada Sungai Batang Agam dibandingkan dengan sungai lainnya.

Hal ini mengindikasikan tingginya tekanan pencemaran di Batang Agam dibandingkan dengan sungai lainnya di Kota Bukittinggi. Sumber pencemaran ini dapat berasal dari kegiatan domestik dan komersial yang mengalirkan saluran pembuangan air limbahnya ke sungai. Semakin tinggi BOD mengindikasikan bahwa semakin banyak bakteri pada badan air tersebut sehingga semakin rendah kualitas air pada badan air tersebut. Selisih nilai antara COD dan BOD memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit diurai yang ada di perairan. Seiring dengan BOD, semua sungai di Kota Bukittinggi melebihi mutu kelas 1 untuk parameter COD baik tahun 2022 maupun tahun 2019. Hal ini diperkirakan disebabkan karena tingginya limbah yang dibuang ke sungai baik oleh aktivitas domestik (rumah tangga) maupun komersial (restoran, rumah makan dll) sehingga menyebabkan peningkatan kandungan bahan organik pada sungai. Oleh karena itu secara kualitas, ketiga sungai ini tidak memenuhi syarat sebagai sumber air baku air minum, baik oleh masyarakat maupun PDAM. Perbandingan konsentrasi COD sungai Kota Bukittinggi

Transformasi nilai Indeks Kualitas Air dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No.82/ 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampek yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Pembobotan indeks kualitas air diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. memenuhi baku mutu = 70
- b. tercemar ringan = 50
- c. tercemar sedang = 30
- d. tercemar berat = 10

Sehingga, dari capaian 30 dapat disimpulkan bahwa klasifikasi Indeks Kualitas Air di Kota Bukittinggi berada pada kriteria Tercemar Sedang.

24.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kualitas Air** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 24.2 Perbandingan antara **Indeks Kualitas Air** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kualitas Air		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	83.98	47.33	56.47 %
2021	83,98	48,06	57,22 %
2022	47	30	63,83 %
2023	56,09	30	53,48 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2023 belum dilakukan sehingga untuk pengukuran capaian Tahun 2023 masih didasarkan pada hasil capaian pada Tahun 2022, itupun masih jauh dari capaian yang diharapkan.

24.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	35,83	55,46	63,21
Kab. Pesisir Selatan	87,08	76,23	85,83
Kab. Solok	79,08	78,09	81,02
Kab. Sijunjung	61,23	64,12	70,27
Kab. Tanah Datar	85,63	86,50	87,80
Kab. Padang Pariaman	88,73	86,09	88,22
Kab. Agam	88,04	87,46	92,80
Kab. Lima Puluh Kota	74,75	68,93	71,33
Kab. Pasaman	70,98	82,57	75,77
Kab. Solok Selatan	77,04	81,01	77,46
Kab. Dharmasraya	69,93	70,27	69,61
Kab. Pasaman Barat	69,56	81,47	77,76
Kota Padang	98,51	95,52	97,93
Kota Solok	97,83	96,55	97,17
Kota Sawahlunto	91,25	88,27	92,75
Kota Padang Panjang	96,58	98,45	98,09
Kota Bukittinggi	100,00	97,05	98,56
Kota Payakumbuh	98,76	99,43	98,83
Kota Pariaman	95,61	97,69	95,46
Provinsi Sumatera Barat	83,37	83,40	85,23

Catatan: 1. Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. 2. Data tahun 2019-2020 merupakan data Backcasting

24.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Air tanah menjadi salah satu sumber air minum masyarakat Kota Bukittinggi. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat (2022), lebih kurang 16, 79% masyarakat Kota Bukittinggi memanfaatkan air tanah sebagai sumber air minum. Secara umum terdapat perbaikan kualitas air sumur di Kota Bukittinggi. Dissolved Oxygen (DO) atau oksigen terlarut merupakan kandungan oksigen yang terkandung dalam air. Baku mutu air kelas I untuk DO adalah 6 mg/L. Semakin rendah nilai parameter DO, maka kualitas air tersebut semakin buruk. Pada tahun 2022, parameter DO di semua sumur yang dilakukan pemantauan berada di bawah baku mutu. Sehingga kualitas air sumur ini sebagai sumber air minum, perlu mendapat perhatian khusus. Namun karena praktek penggunaan air tanah sebagai air minum selalu didahului dengan pemanasan air hingga mendidih, penurunan nilai DO ini masih dalam kategori yang masih wajar dan aman.

24.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

1. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan pengelolaan lingkungan
2. melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan

Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

IKU 25 : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sasaran 10 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Tutupan Lahan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan indeks kondisi tutupan lahan menggunakan parameter tutupan hutan, belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan atau kawasan berfungsi lindung:

25.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 25.1 Capaian Indikator **Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,36	22,38	59.90

Data yang disajikan masih menggunakan data dan analisa Tahun 2022. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan IKU baru yang dimunculkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2021, dan juga menjadi IKU pada RPJMD 2021-2026. Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan target yang ditetapkan dengan

nilai 37.36 didapatkan realisasi dengan nilai sebesar 22,38 dengan persentase capaian indikator sebesar 59,90 %.

25.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 25.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (tiga) tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	22,9	22,9	100 %
2021	22,9	22,38	97,73 %
2022	37,36	22,38	59.90

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 masih jauh dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan hanya mendapatkan nilai 22,38 dengan persentase kinerja sebesar 59,90 %. Untuk tahun 2017-2019 data indeks kualitas tutupan lahan belum tersedia pada instansi terkait karena memang belum diadakan penghitungan secara sistematis oleh SKPD terkait.

25.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Kota Bukittinggi sebagai wilayah administratif yang terus berkembang di berbagai sektor kehidupan sangat berdampak terhadap jumlah pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan menjadi bangunan maupun sebagai tempat usaha dan kegiatan masyarakat terus saja terjadi. Namun dalam hal ini penataan dan penertiban menjadi langkah penting Pemerintah dalam mengatur kualitas tutupan lahan di Kota Bukittinggi.

Pencapaian kinerja IKU Indeks Kualitas Tutupan Lahan dapat dikatakan berhasil apabila seluruh masyarakat Kota Bukittinggi ikut serta dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan termasuk menjaga pohon, menambah jumlah biopori (daerah resapan) dan memberikan kontribusi yang positif terhadap tutupan lahan pada lingkungan sekitar.

Penyebab kegagalan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan RTH, serta tidak tersedianya dana dukungan dari pemerintah untuk merawat tutupan lahan Kota Bukittinggi.

25.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Pemerintah Kota telah berupaya untuk merealisasikannya. Namun karena keterbatasan lahan untuk RTH pada RTRW yang juga dilatarbelakangi oleh kondisi dan luas kota Bukittinggi selama ini, maka indeks kualitas tutupan lahan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena tidak mungkin lagi membuka lahan untuk tujuan perhijauan karena sudah ditentukan secara jelas. Namun masih ada langkah yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan adanya fungsi ruang

terbuka hijau yang cukup. Hal tersebut adalah dengan penggalakkan dan mengoptimalkan upaya penanaman pepohonan di lahan yang tersedia termasuk pohon pelindung diberbagai titik di Kota Bukittinggi dilakukan secara terus menerus dan masif. Selain itu, secara konkrit langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator luas tutupan lahan sebagai berikut:

- a. Penanaman 200 pohon di Tahun 2021
- b. Pembenahan beberapa taman kota untuk RTH

25.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Efisiensi = 100% -	(serapan anggaran x 100 %)
	capaian kinerja IKU
100% -	(85 / 59.90) x 100
	- 41,9

25.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 25.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.150.402.330	2.746.598.227	87.18
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.150.402.330	2.746.598.227	87.18
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	97.990.000	97.065.600	99.07
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.052.412.330	2.649.522.627	86.80
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	542.235.500	388.242.373	71.60
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	542.235.500	388.242.373	71.60
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	152.447.000	135.928.593	89.16
Total	3.692.637.830	3.134.840.600	85

Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Udara**IKU 26 : Indeks Kualitas Udara**

Sasaran 11 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Udara** yang secara defenisi operasional dapat diartikan indeks kondisi udara yang diukur menggunakan parameter SO₂ dan NO₂ atau :

Indeks Kualitas Udara = Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara
87,89

26.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022Tabel 26.1 Capaian Indikator **Indeks Kualitas Udara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	84,64	87,89	103,83

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2023

Menghitung Indeks Kualitas Udara adalah dengan menghitung rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan udara dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref eu dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO₂ Ref eu. Sebagai acuan dalam menentukan kualitas udara, hasil nilai Indeks Kualitas Udara diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel : Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks	Rentang Nilai
Sangat Baik	> 90
Baik	70 < - ≤ 90
Cukup	50 ≤ - ≤ 70
Kurang	30 ≤ - < 50
Sangat Kurang	< 30

Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Semakin tinggi angka indeks akan menunjukkan kualitas yang semakin tinggi pula. Saat ini indeks standar kualitas udara yang digunakan secara resmi adalah indeks standar pencemaran udara (ISPU). Indeks kualitas udara tahun 2023 adalah 88,12, sebuah angka yang menunjukkan **kualitas baik**.

26.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kualitas Udara** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 26.2. Perbandingan antara **Indeks Kualitas Udara** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kualitas Udara		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	88.37	83.54	94.53 %
2021	88,37	85,46	96,70 %
2022	84,64	87,89	103,83
2023	84,74	88,12	103,99

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2024

26.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Berikut 4 kota dengan Indeks Kualitas Udara terendah di Sumbar pada 2021 dikutip dari BPS Sabtu 19 Maret 2022.

1. Padang

Tak dapat dipungkiri Padang adalah kota dengan kualitas udara terendah di Sumbar. Di sini pusat industri, banyak kendaraan, dan padat penduduk. Nilai IKU Padang adalah 74,83. Sedikit naik karena 2020 sebesar 74,51 dan 2019 sebesar 73,77.

2. Dharmasraya

Dharmasraya menjadi daerah ke 2 dengan IKU terendah. Nilainya 84,49, menurun ketimbang tahun sebelumnya yang 86,11.

3. Bukittinggi

Bukittinggi saat ini adalah kota wisata yang padat penduduk dan pengunjung. Daerahnya terkenal akan kesejukan udaranya. Tapi, polusi udara membuat IKU Bukittinggi 85,46 pada 2021. Kabar baiknya, kualitas udara Bukittinggi meningkat di 2021 ketimbang 2020 silam yang 83,54.

4. Sawahlunto

Kota Sawahlunto IKU-nya berada di angka 87,65. Jumlahnya sedikit mengalami kenaikan yang sebesar 87,54 pada 2020. Sementara, daerah dengan IKU tertinggi atau paling sedikit polusi adalah Mentawai 95,26. Kemudian Sijunjung 94,35 dan Padang Pariaman 93,54.

Tabel Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2022

Kab/ Kota	2022
Prov. Sumatera Barat	90,65
Kota Bukittinggi	87,89

Kota Payakumbuh	93,11
Kota Sawah Lunto	87,00
Kota Padang Panjang	91,29
Kota Pariaman	95,09
Kab. Lima Puluh Kota	92,00
Kab. Kepulauan Mentawai	92,68
Kab. Pesisir Selatan	92,43
Kab. Solok	90,55
Kab. Sijunjung	94,51
Kab. Tanah Datar	91,06
Kab. Padang Pariaman	93,89
Kab. Agam	90,94
Kab. Pasaman	93,44
Kab. Solok Selatan	91,90

26.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Diantara penyebab keberhasilan pencapaian indikator sebagai berikut.

1. Petausahaan/ kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku,
2. Terjadinya beberapa kasuistik terhadap usaha dan kegiatan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan dan penindakan terhadap usaha maupun kegiatan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku.

26.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Melihat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan langkah-langkah strategis seperti:

1. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
2. terhadap pelaku usaha dan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan di Kota Bukittinggi secara teratur dan berkala.

Sasaran 12 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah**IKU 27 : Presentase Penanganan Sampah**

Sasaran 12 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Presentase Penanganan Sampah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan persentase sampah yang melalui tahapan penanganan terhadap total sampah.

27.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023Tabel 28.1 Capaian Indikator **Presentase Penanganan Sampah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Penanganan Sampah	73	38014,48	80,40 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2024

Persentase penanganan sampah Kota Bukittinggi Tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 7.40%. Tingginya tingkat aktivitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Perilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, masyarakat yang tinggal diperbatasan serta dari aktifitas perdagangan.

Fenomena lain juga dapat dilihat dari kondisi di lapangan pada temuan awal yang menunjukkan bahwa masih banyak beberapa daerah di Kota Bukittinggi yang memiliki volume timbunan sampah yang belum terangkut semuanya, diantaranya Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Simpang Aur dan Terminal Aur Kuning. Timbunan sampah untuk pasar di Kota Bukittinggi menurut data dari Dinas Kop UKM Perdagangan berkisar antara 6 m³ /hari. Puncak timbunan sampah pasar terjadi saat libur dan lebaran, yakni mencapai 8 m³ /hari. Pasar Kota Bukittinggi terdiri dari atas 3 pasar yakni Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur, dimana ketiga pasar ini dilengkapi masing-masing 1 (satu) kontainer.

27.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 27.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) tahun Terakhir

Tahun	Presentase Penanganan Sampah	
	Sampah yang terangkut ke TPA	Realisasi
2020		

2021	42449,50	94,02
2022	40506,53	86,90
2023	38014,48	80,40

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Persentase penanganan sampah Kota Bukittinggi dilihat dari capaian kinerja 3 tahun terakhir sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

27.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab belum tercapainya target pengurangan sampah di Kota Bukittinggi adalah karena belum maksimalnya kegiatan pembatasan timbulan sampah yang ditargetkan pada sekolah, instansi pemerintah dan swasta dan masyarakat yang ada di Kota Bukittinggi, dan belum maksimalnya pendauran ulang, dan/atau pemanfaatan kembali sampah di Masyarakat.

Sebagai kota pariwisata, Kota Bukittinggi tidak luput dari permasalahan persampahan, banyaknya pengunjung di kota ini terutama dihari libur, peningkatan jumlah penduduk kota menyebabkan produksi sampah juga ikut meningkat, sementara daerah dan tingkat pelayanan sampah kota ini belum merata yang menyebabkan pengelolaan sampah yang ada di Kota Bukittinggi ini tidak tertata dengan baik pada kondisi tertentu. Rendahnya praktek pemanfaatan sampah (3R) juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan persampahan kota. Selain permasalahan tersebut, adanya sampah kiriman dari Kabupaten Agam yang berasal dari masyarakatnya yang bekerja di Kota Bukittinggi juga menyebabkan jumlah timbulan sampah Kota Bukittinggi meningkat. Untuk itu pada perencanaan ini diharapkan dapat direncanakan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan kondisi eksisting wilayah perencanaan.

27.4 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Dalam menjalankan Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, DLH Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi Nomor 188.45-36/DLH/III-2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan dengan tugas pokok dan fungsi menindak warga atau masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 11, Setiap Orang atau badan dilarang membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran dijalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu. Oleh sebab itu Pasal 35 ayat (5) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 11 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atau sanksi administratif penahanan sementara waktu KTP, kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

Warga yang kedapatan membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah disediakan dan ditentukan yakni diluar pukul 06.00 WIB- 18.00 WIB pada saat tim penegakan kebijakan perda melaksanakan razia. Petugas menahan kartu identitas yang dimiliki oleh si pelanggar dan urusannya diselesaikan di Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi. Penegakan kebijakan perda ini berlaku untuk semua masyarakat yang terutama berdomisili di Kota Bukittinggi serta masyarakat daerah tetangga yang membuang sampah ke Kota Bukittinggi.

27.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\ &= 100\% - \frac{(11,94\% \times 100\%)}{94} \\ &= 87,29\% \end{aligned}$$

27.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian

Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	1.028.493.604	971.917.903	94

Sasaran 12 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah

IKU 28 : Presentase Pengurangan Sampah

Sasaran 12 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Presentase Pengurangan Sampah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan persentase sampah yang melalui tahapan pembatasan timbulan, daur ulang, dan/ atau pemanfaatan kembali sampah terhadap total sampah.

28.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

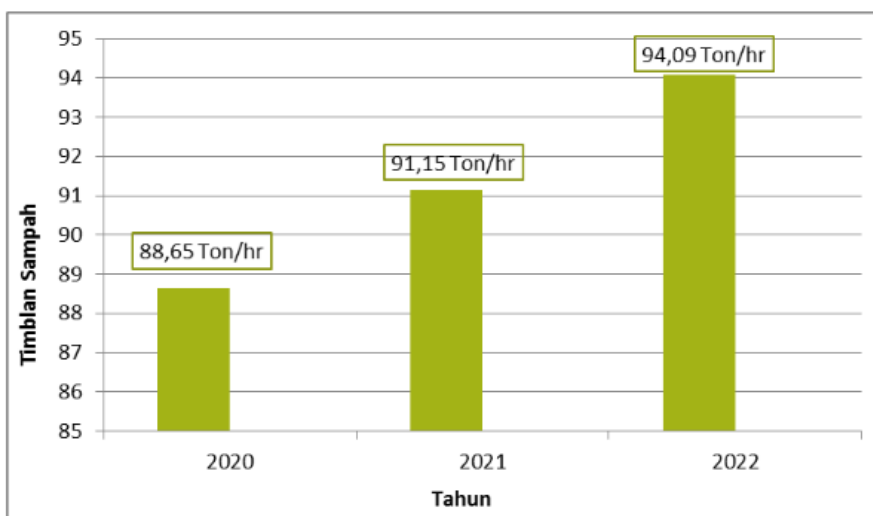
Tabel 28.1 Capaian Indikator **Presentase Pengurangan Sampah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Pengurangan Sampah	27	7.09	27,26 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2024

Realisasi pengurangan sampah masih menggunakan data Tahun 2022. Peningkatan timbulan sampah akan memberikan tekanan terhadap lingkungan dan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan karena sampah terkait dengan hubungan nilai dan perilaku masyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang dilakukan.

Timbulan sampah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 sebesar 94,09 Ton/hari, mengalami kenaikan jumlah timbulan sampah dibandingkan dengan timbulan sampah tahun 2021 dan 2020 yaitu masing-masing 91,15 Ton/hr dan 88,65 Ton/hr. Terjadinya kenaikan timbulan sampah pada tahun 2022 disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2022, artinya penambahan jumlah timbulan sampah berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk.



Gambar 3.63 Timbulan Sampah Domestik Kota Bukittinggi Tahun 2020-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di masing-masing kecamatan dapat dilihat bahwa Kecamatan Mandiangin Koto Senayan memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Timbulan sampah Pasar Bawah Kota Bukittinggi per hari Kota Bukittinggi Tahun 2022. Berdasarkan tabel tersebut terlihat peningkatan timbulan sampah di Pasar Bawah pada hari rabu dan sabtu yang merupakan "hari balai" di Kota Bukittinggi.

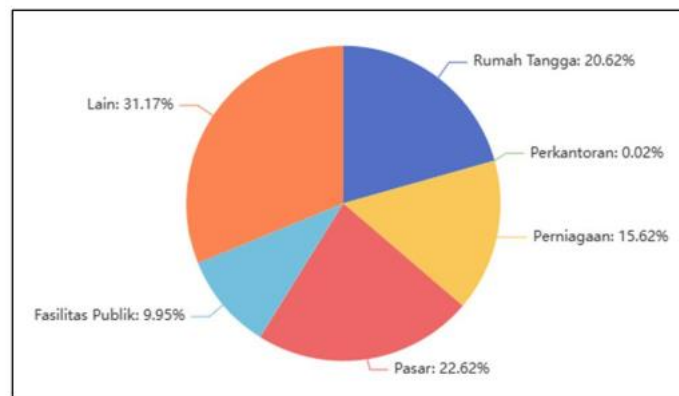
Berdasarkan dokumen Review Master Plan Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi tahun 2018, diperkirakan terjadi peningkatan timbulan sampah Kota Bukittinggi sekitar 2,68% setiap tahunnya. Pada tahun 2038 diperkirakan timbulan sampah Kota Bukittinggi mencapai 184,23 ton/hari. Oleh karena itu diperlukan upaya komprehensif untuk mengurangi dampak peningkatan timbulan sampah ini.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini terdapat 125.23 ton timbulan sampah harian yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat di Bukittinggi.

Dengan jumlah penduduk sekitar 121.588 jiwa, masing-masing orang setidaknya menghasilkan satu kilogram sampah per harinya. Diantaranya 55,98% merupakan sampah organik yang terdiri dari makanan dan tumbuhan, dan 44,02 adalah sampah anorganik.

28.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Berdasarkan Data Sistem Informasi Persampahan Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2022 sampah yang terkelola di Kota Bukittinggi mencapai 96,18% dari total timbulan sampah 45.707,54 per tahun, yang terdiri dari pengurangan sampah mencapai 7,09% dan penanganan sampah 89,09% seperti terlihat pada Tabel 3.34. Tingkat daur ulang sampah (Recycling Rate) di Kota Bukittinggi mencapai 9,28%.



a) Berdasarkan Sumber Sampah

Tabel 3.34 Capaian Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Indikator	2020	2022
1	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)(A)	45.368,41	45.707,54
2	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)(B)	1.649,27	3.241,35
3	%Pengurangan Sampah(B/A)	3,64	7,09
4	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)(C)	40.716,11	40.720,00
5	%Penanganan Sampah(C/A)	89,75	89,09
6	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)(B+C)	42.365,38	43.961,34
7	%Sampah Terkelola(B+C)/A	93,38	96,18
8	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)(D)	1.088,33	1.761,51
9	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun)(E)	292,00	2.482,00
10	Recycling Rate(D+E)/A	3,04	9,28

Sumber : Sistem Informasi Persampahan Nasional, 2023

Data jumlah timbulan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah 405,431.45 ton. Dari 13 kabupaten/ kota di Sumatera Barat, yang menghasilkan sampah terbanyak setiap tahunnya adalah Kabupaten Agam 78,412.95 ton, Kabupaten Lima Puluh Kota 56,285.41 ton, Kabupaten Tanah Datar 46,806.83 ton, Kota Bukittinggi 46,225.43 ton dan Kabupaten Pasaman 44,253.04 ton.

28.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab belum tercapainya target pengurangan sampah di Kota Bukittinggi adalah karena belum maksimalnya kegiatan pembatasan timbulan sampah yang ditargetkan pada sekolah, instansi pemerintah dan swasta dan masyarakat yang ada di Kota Bukittinggi, dan belum maksimalnya pendauran ulang, dan/atau pemanfaatan kembali sampah di Masyarakat.

Selain budaya di masyarakat, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah adalah, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Sistem pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah perlu untuk ditingkatkan secara terus menerus.

Akhir Tahun 2023, juga menjadi saat yang berat bagi penanganan sampah di Kota Bukittinggi. Akibat dampak longsohnya TPA Regional Payakumbuh membuat sampah Kota Bukittinggi harus dibuang ke TPA Regional Padang dengan jumlah sampah yang dibatasi dibuang pada TPA tersebut.

Selain itu, saat ini di Kota Bukittinggi belum ada peraturan atau kebijakan mengenai operasional Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

28.4 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Melakukan penyuluhan ke sekolah yang ada di Kota Bukittinggi, menjadikan kelurahan Bukit Apit Puhun sebagai Pilot Project dalam pengurangan sampah dengan melakukan edukasi pemilahan sampah domestik serta pembuatan kompos dan maggot.

Seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang berkembang, masalah sampah telah menjadi salah satu isu kritis yang perlu segera diatasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kota Bukittinggi bersama WALHI Sumbar, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia, mencanangkan suatu program pengelolaan sampah.

Pogram Pengurangan Emisi melalui Perbaikan Sampah Perkotaan itu dilakukan dengan melibatkan warga di kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Yakni bersama Kelompok Budi Daya Maggot Sejati dan Rumah Kompos Kelurahan Bukit Apit Puhun.

Dengan mengajak masyarakat untuk memilah sampah antara yang organik dan anorganik, lalu melakukan proses Reduce, Reuse, Recycle (3R), diharapkan masalah yang ada di Kota Bukittinggi bisa berangsur-angsur teratasi.

Saat ini di RW 4 Kelurahan Bukit Apit Puhun telah ada rumah kompos dan kelompok budidaya maggot Sejati. Tak hanya itu, warga yang tergabung dalam kelompok budidaya tersebut juga sedang melakukan pengembangan pada pertanian perkotaan dan perikanan budidaya darat dengan sistem bioflok. lokasi tersebut memberikan contoh bagaimana mengelola dan mengolah sampah menjadi suatu peluang usaha yang menghasilkan.

Di rumah kompos dan maggot sejati RW 4 Bukit Apit Puhun, kegiatan budidaya sudah cukup efektif dilakukan dantelah bisa memproduksi 50-60 kilogram maggot setiap bulannya. Saat ini per kilogramnya, maggot bisa dijual dengan harga Rp. 8000, rupiah. Hal itu diperuntukkan utamanya untuk pakan ternak dan unggas. Seperti ayam, itik, burung kicau, bahkan pakan ikan lele atau ikan hias seperti koi dan arwana.

28.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\ &= \frac{100\% - (27,26\% \times 100\%)}{94\%} \\ &= 71\% \end{aligned}$$

28.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 29.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	1.028.493.604	971.917.903	94

Sasaran 13 : Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif
IKU 29 : Indeks Pembangunan Pariwisata

Sasaran 13 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Pembangunan Pariwisata** yang secara defenisi operasional Indeks capaian pembangunan pariwisata menggunakan pendekatan faktor kebencanaan, posisi target pasar, karakteristik dan kualitas produk, serta indeks experience dan hospitality:

29.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 29.1. Capaian Indikator **Indeks Pembangunan Pariwisata**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Pariwisata	4,34	6,12	141%

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2024

Data yang digunakan masih menggunakan data dan informasi Tahun 2022, serta tidak didukung dengan data yang baik dari Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi. Indeks Pembangunan Pariwisata diukur dari jumlah sarana dan prasarana objek wisata dan kunjungan wisatawan mancanegara yang menginap di Kota Bukittinggi dibagi 100%.

29.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 29.2 Perbandingan capaian kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Pariwisata		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020			
2021	4.3	0.92	21%
2022	4.34	6.12	141%

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2023

IPP pada Tahun 2022 cenderung meningkat karena faktor jumlah kunjungan wisman yang meningkat drastis dari Tahun sebelumnya.

29.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional



29.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Indeks Pembangunan Pariwisata Kota Bukittinggi meningkat setiap tahunnya. Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahunnya ke Kota Bukittinggi.

Berdasarkan IPKN (Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional) Sumatera Barat menempati posisi 9 dari 34 Provinsi yang dilakukan penilaian IPKN. Pembangunan Kepariwisata di Kota Bukittinggi bersifat multisektor dengan mempertimbangkan aspek aspek pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, keamanan, kebersihan dan Kesehatan, infrastruktur dan layanan pariwisata, keberlanjutan lingkungan serta Pendidikan (non-leisure).

29.5 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Membuat kerangka kerja, dimana Kerangka kerja tersebut tidak hanya menitikberatkan pada bagaimana cara peningkatan pembangunan pariwisata berdasarkan capaian atas data yang dimiliki, namun lebih jauh lagi melihat apakah pemerintah daerah memiliki perencanaan strategis yang mampu mendorong kemajuan (progress) pembangunan kepariwisataan dengan komitmen pemerintah daerah.

29.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} \text{*Efisiensi} &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\ &= \frac{100\% - (91\% \times 100\%)}{141\%} \\ &= \mathbf{35,47\%} \end{aligned}$$

29.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 29.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Tahun 2021	Realisasi 2021	Persentas
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14,008,449,421	12,836,400,121	91,63%

**Sasaran 13 : Terwujudnya Kota Bukittinggi
Sebagai Destinasi Wisata Inovatif**
**IKU 30 : Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang
Terstandarisasi (%)**

Sasaran 13 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi (%)** yang secara defenisi operasional adalah Persentase jumlah usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi terhadap jumlah seluruh usaha ekonomi kreatif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi	2	22,01	22.01%

Data diambil dari data ekraf (sesuai dengan penyisiran data dari OSS) dengan formulasi perhitungan:

Jumlah tenaga kerja pariwisata x 100 %	512	
--	-----	--

tersertifikasi		22.01%
Jumlah tenaga kerja pariwisata	2326	

30.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 30.1 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020			
2021	1	48.47%	48.47%
2022	1	12.08%	12.08%
2023	2	22.01%	22.01%

Terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi pada tahun 2022 ke tahun 2023, karena pada tahun 2023 kita sudah menggunakan OSS dan data yang masuk di tahun 2022 tidak semua yang termasuk kedalam sektor pariwisata

30.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan indikator capaian dipengaruhi beberapa faktor :

1. Telah dilakukannya pertemuan rutin bagi pentahelix kepariwisataan.
2. Telah dilakukannya pelatihan sertifikasi bersama lembaga pelatihan resmi dalam rangka peningkatan SDM ekraf
3. Semangat dan Komitmen yang tinggi dari Pelaku Ekraf Kota Bukittinggi dalam rangka pengembangan kepariwisataan Kota Bukittinggi

Secara umum setiap tahun untuk indikator jumlah usaha yang tersertifikasi sudah melewati target yang ditetapkan, walaupun terjadi penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 hal ini merupakan penurunan positif karena perbaikan data pelaku ekonomi pariwisata yang dilakukan untuk menciptakan data yang akurat dan akuntabel. Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi didapatkan melalui perbandingan jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif di semua bidang ekraf yang ada di Kota Bukittinggi dengan jumlah tenaga kerja ekraf yang sudah tersertifikasi melalui pelatihan resmi dan memiliki sertifikat keahlian.

30.3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Untuk menefisiensikan indikator ini kita terus mengupayakan semua pelaku usaha pariwisata yang belum tersertifikasi untuk mengurus sertifikasi usaha pariwisata mereka.

Pada Tahun 2024 ini kita sudah menganggarkan kegiatan untuk sertifikasi bagi pegawai hotel dan akan melakukan pelatihan digitalisasi kepada pegawai hotel untuk menyiapkan data kepariwisataan Tahun 2024.

30.4. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 30.5 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.238.343.762	1.005.305.172	81,18%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.181.294.372	3.693.066.921	88,32%
TOTAL	5.419.638.134	4.698.372.093	87%

**Sasaran 13 : Terwujudnya Kota Bukittinggi
Sebagai Destinasi Wisata Inovatif
IKU 31 : Jumlah Kunjungan Wisata**

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Jumlah Kunjungan Wisata** yang secara defenisi operasional adalah jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata pada satu tahun tertentu

31.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 31.1 Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kunjungan Wisata	587,282	1,041,476	177,34%

Jumlah Kunjungan Wisata dihitung berdasarkan jumlah tiket terjual pada objek wisata berbayar (TMSBK dan TPLJ) selama 1 Tahun. Wisatawan dibagi atas dua : Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara.

31.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 31.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisata		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja

2020			
2021	532,682	750,021	141%
2022	559,316	1,262,590	226%
2023	587,282	1,041,476	177,36

Jumlah Kunjungan wisatawan pada 3 Tahun Terakhir tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan jumlah kunjungan 1.262.590. Jumlah Kunjungan pada Tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 200Ribu Pengunjung, hal ini disebabkan oleh Hari-Hari Libur Nasional dan Hari libur sekolah berbeda sehingga berdasarkan statistik perjalanan wisatawan ke Sumatera Barat untuk perantau tidak banyak yang pulang ke kampung halaman. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan penurunan kunjungan adalah terjadinya fenomena alam (erupsi merapi) yang terjadi pada bulan Desember, dimana bulan Desember merupakan jadwal liburan sekolah.

31.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (orang)		
	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	994 655	122 793	318
Kab. Pesisir Selatan	971 989	177 017	354 297
Kab. Solok	601 244	703 649	703 300
Kab. Sijunjung	12 434	149 889	60 533
Kab. Tanah Datar	627 057	527 635	340 363
Kab. Padang Pariaman	307 316	261 615	100 144
Kab. Agam	756 750	664 318	509 428
Kab. Lima Puluh Kota	639 840	654 334	624 155
Kab. Pasaman	101 141	747	11 812
Kab. Solok Selatan	68 084	41 809	61 199
Kab. Dharmasraya	9 745	11 676	54 908
Kab. Pasaman Barat	28 603	2 486	23 503
Kota Padang	843 296	2 621 929	376 534
Kota Solok	120 411	134 450	181 154
Kota Sawahlunto	237 490	101 649	91 027
Kota Padang Panjang	166 364	107 642	215 073
Kota Bukittinggi	933 609	1 471 542	748 074

Kabupaten/Kota	Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (orang)		
	2019	2020	2021
Kota Payakumbuh	298 479	46 930	77 747
Kota Pariaman	450 640	239 758	252 317
Provinsi Sumatera Barat	8 169 147	8 041 868	4 785 886

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat

31.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Jumlah Kunjungan ke objek wisata berbayar selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan pada tahun 2021 ke tahun 2022 dan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Namun, pada tahun 2023 walaupun terjadi penurunan kunjungan capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2023 tetap dapat dikatakan berhasil.

Pengembangan destinasi pariwisata haruslah bertujuan customer-centric strategy yang mencakup tiga hal. Pertama, customer satisfaction di mana wisatawan puas dengan destinasi wisata yang kita tawarkan. Kedua, customer retention/loyalty di mana wisatawan berkunjung kembali dan loyal dengan destinasi wisata kita. Ketiga, customer advocacy di mana wisatawan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain.

31.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned}
 \text{*Efisiensi} &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\
 &= \frac{100\% - (91,63\% \times 100\%)}{177,36\%} \\
 &= \mathbf{48,33\%}
 \end{aligned}$$

31.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 31.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14,008,449,421	12,836,400,121	91,63%

Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi Budaya Daerah**IKU 32 : Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan**

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan** yang secara defenisi operasional adalah Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

32.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 32.1 Perbandingan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	30	32	106,6 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Data target dengan realisasi berasal dari Inventarisi Data Lembaga kesenian tradisional yang di bina dalam upaya pelestarian kebudayaan pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 dengan capaian 100%

Untuk data perbandingan capaian kinerja 3 tahun terakhir di capai dengan peningkatan sampai 100% pada tiga tahun terakhir, pada target yang bisa dicapai dengan realisasi sampai 100%. Dimana data berasal dari Data lembaga kesenian tradisional yang di diinventarisir dalam upaya pelestarian kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023

32.2. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	264,132,700.00	262,627,375.00	100%
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	375,908,300.00	337,288,469.00	99%

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	631,625,000.00	631,605,000.00	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di Bidang Olahraga
IKU 33 : Prestasi Pada Event Olah Raga Propinsi

33.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

33.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

33.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

33.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

33.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

33.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

33.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Sasaran 16 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

IKU 34 : Nilai SAKIP

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP** yang secara defenisi operasional adalah Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau dapat dilihat melalui rumus berikut :

Nilai SAKIP = Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

34.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 4.1. Capaian Indikator Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	77,78	71,50	96.42%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kota Bukittinggi. Evaluasi terhadap SAKIP Kota Bukittinggi yang telah dilakukan oleh Menpan RB bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*Outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai 71,50 atau prediket BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bukittinggi masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Kota Bukittinggi telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra, perjanjian kinerja, RKPd dan renja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Kota Bukittinggi telah menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas mendukung pencapaian kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Belum memiliki pedoman penyusunan perencanaan yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan;
- b. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya berdasarkan logical

framework dan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;

c. Belum seluruh PD menyampaikan PK Kepala Dinas 2023 melalui aplikasi E Sakip Review (ESR), sehingga perlu dipastikan keberadaan PK terbaru;

d. Masih terdapat sasaran dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) PD Bukittinggi Tahun 2023 yang belum berorientasi hasil, hal tersebut dapat dilihat pada contoh di bawah ini:

o Sasaran Belum berorientasi hasil;

- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pertanian perkotaan pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- Meningkatnya promosi perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip

o Indikator belum menjawab sarannya:

- Zero Accident Jumlah daerah irigasi yang terbangun untuk sasaran Terwujudnya Pertanian Kota yang Berkelanjutan pada Dinas Perhubungan;
 - Jumlah Komunitas/Lembaga yang ikut serta dalam pelestarian Warisan Budaya untuk sasaran Meningkatnya Pelestarian Pengembangan Budaya Daerah berbasis Lingkungan pada Dinas Pariwisata;
- Belum seluruh PD menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mencapai perjanjian kinerja;

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Bukittinggi dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman mengenai pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja;
- Belum memiliki Aplikasi E-SAKIP yang mendukung proses monitoring dan evaluasi proses pencapaian target kinerja;
- Pengukuran kinerja organisasi belum diikuti dengan proses pembaruan target dan strategi dalam upaya memastikan pencapaian kinerja maksimal di akhir periode;
- Terdapat penetapan target pada PK level Walikota maupun PD tahun yang berada di bawah capaian tahun, Hal ini bisa dilihat pada beberapa contoh di bawah ini:

- o Target capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan 2023 sebesar 587.282 sedangkan capaian 2022 sebesar 1.262,59 (Walikota);
- o Target Persentase kesesuaian proses pengadaan barang dan jasa dengan SIRUP sebesar 80 sedangkan capaian 2022 sebesar 99,96 (Sekretaris Daerah);
- o Target PPKS yang mandiri 2023 sebesar 83 sedangkan capaian 2022 sebesar 94,12 (Dinas Sosial).

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun laporan kinerja tahun 2022 baik tingkat pemda maupun tingkat perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Beberapa laporan kinerja PD belum disampaikan melalui ESR, seperti pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
- Laporan kinerja PD belum memuat pernyataan telah direviu oleh Inspektorat;
- Laporan kinerja PD belum seluruhnya dipublikasikan untuk bisa diakses oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik;
- Laporan kinerja Pemda dan sebagian besar PD belum memberikan analisis yang memadai atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja untuk setiap sasaran, serta strategi perbaikan untuk tahun berikutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi yang disesuaikan dengan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman evaluasi SAKIP yang memuat mengenai mekanisme evaluasi dan klasifikasi sumber daya manusia dibutuhkan sehingga kualitas pelaksanaan evaluasi internal belum dapat dipastikan;
- Pelaksanaan evaluasi internal belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan belum didukung dengan Quality Assurance yang memadai;
- Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;

Rekomendasi;

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Membangun Aplikasi manajemen kinerja sebagai salah satu alat bantu dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja serta memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi umum terkait proses pemanfaatan anggaran dan proses pencapaian kinerja;
- 4) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja PD sebagai bahan evaluasi proses pencapaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
- 5) Memastikan seluruh laporan kinerja PD telah direviu oleh Inspektorat sebelum dipublikasi untuk memastikan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan kinerja tersebut;
- 6) Melakukan reviu kembali terhadap penetapan target yang diperjanjikan tiap tahunnya yang selaras dengan hasil capaian sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai;
- 7) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;

- 8) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Bukittinggi;
- 9) Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap Perangkat Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP;

34.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Nilai SAKIP	
		Realisasi	Capaian Kinerja
2021	-	71,66	-
2022	75,57	-	-
2023	77,78	71,50	91,92

34.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kab/Kota	Prediket
Provinsi Sumatera Barat	B
Kota Bukittinggi	BB
Kota Padang	BB
Kota Payakumbuh	BB
Kota Pariaman	B
Padang Panjang	B
Kabupaten Agam	B
Kabupaten 50 Kota	B

34.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepatsasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah:

- (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;

- (b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikanimplementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

34.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan perbaikan indikator kinerja yang perlu disempurnakan dan penyusunan pohon kinerja untuk PD baru;
- b. Menerbitkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Bukittinggi terkait Pedoman Teknis evaluasi AKIP yang disesuaikan dengan PermenPANRB No.88 tahun 2021.

34.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} \text{*Efisiensi} &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\ &= \frac{100\% - (72,8\% \times 100\%)}{91,92\%} \\ &= \mathbf{20,8\%} \end{aligned}$$

**Sasaran 16 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan**

IKU 35 : Nilai EKPPD

Sasaran 16 juga diturunkan pada indikator **Nilai EKPPD** (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) atau yang sekarang disebut dengan EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang secara defenisi operasional adalah nilai yang diperoleh atas penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah maka dilakukan pengukuran kinerja pemerintah kabupaten kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kota. Selain itu juga dilakuka evaluasi penyelenggaraan kinerja makro, kinerja urusan pemerintahan konkuren dan kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan yang tertuang dalam LPPD melalui SILPPD.

Dari LPPD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 terdapat uraian permasalahan yang disimpulkan dalam penyusunan LPPD Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dalam proses perencanaan dan penganggaran pada OPD Tahun 2022 belum sepenuhnya memprioritaskan pencapaian kinerja indicator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah,
2. Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan pengelolaan data perencanaan serta pemahaman terhadap definisi operasional IKK,
3. Belum optimal koordinasi lintas sector/ anta OPD dalam pemenuhan data dukung capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta kurangnya internalisasi target-target IKK pada pelaksanaan pekerjaan di Perangkat Daerah,
4. Proses riveu pada LPPD pada SILPPD yang belum optimal terkait dengan definisi operasional IKK maupun pendokumentasian hasil reviu tersebut

Atas catata diatas direkomendasikan kiranya LPPD Pemerintah Kota Bukittinggi sebagi berikut:

1. Mengoptimalkan pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian IKK LPPD,
2. Memberikan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian IKK LPPD

3. Mengoptimalkan peran APIP dalam proses reuiu agar mampu mendorong pencapaian IKK LPPD serta perbaikan atas proses hasil reuiu yang dilakukan tersebut dapat terdokumentasikan dengan baik,
4. Memastikan target-target pada IKK LPPD telah dimasukkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan di perangkat daerah untuk meningkatkan pencapaian LPPD
5. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral/ OPD dalam pemenuhan data dukung capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
6. Melakukan perbaikan data kinerja dan serta data dukung capaian LPPD melalui SILPPD berdasarkan hasil reuiu kertas kerja evaluasi.

35.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 5.1 Capaian Indikator Nilai EKPPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai EKPPD	3,2338	3,1000	95.86

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

35.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Nilai **EKPPD** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 5.2 Perbandingan antara Nilai **EKPPD** dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Nilai EKPPD		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	3.367	-	Belum diterima
2022	3,2323		
2023	3,2338	3,1000	95,86

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

Tersedianya dokumen pendukung pada setiap IKK LPPD

35.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kab/ Kota	2022	2023
Provinsi Sumatera Barat	2,60	2,733
Kota Bukittinggi	2,47	3,100
Kabupaten Dharmasraya	2,88	3,503
Kabupaten Pasaman	3,11	3,492

Kabupaten Agam	2,94	3,491
Kota Payakumbuh	2,66	3,392
Kota Pariaman	2,53	3,298
Kabupaten Padang Pariaman	2,51	3,290
Kota Padang Panjang	2,24	3,283
Kota Padang	2,99	3,258
Kabupaten Tanah Datar	2,62	3,159
Kabupaten Sijunjung	2,88	3,050
Kota Solok	2,63	3,004
Kabupaten Pesisir Selatan	2,38	3,002
Kabupaten Lima Puluh Kota	2,43	2,952
Kota Sawahlunto	2,32	2,951
Kabupaten Solok	2,13	2,825
Kabupaten Solok Selatan	2,34	2,796
Kabupaten Pasaman Barat	2,24	2,763
Kabupaten Kepulauan Mentawai	0	2,699

35.4. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 5.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
FASILITASI KERJASAMA DALAM NEGERI	82,647,527	72,616,557	88%
PENATAAN ADMNINISTRASI PEMERINTAHAN	233,767,100	213,899,822	92%
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	679,615,900	650,868,062	87%
FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	129,430,564	107,457,560	93%
	1,125,461,091	1,044,842,001	0.928367946

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi 2024

Sasaran 17 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih**IKU 36 : Indeks Integritas Pemerintah Daerah**

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Indeks Integritas Pemerintah Daerah** yang secara defenisi operasional adalah Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi

36.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Integritas Pemerintah Daerah	76	76.63	100.8 %

36.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	75	78.3	104 %
2022	76	77.49	102 %
2023	76	76.63	100.8 %

Untuk realisasi Indeks Integritas Pemerintah Daerah Tahun 2023 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja melebihi 100%. Namun jika dibandingkan dengan hasil atau realisasi indikator lebih rendah daripada Tahun 2022.

Realisasi setiap tahunnya masih mampu diperoleh hasil capaian melebihi target yang ditetapkan, tetapi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya hasil capaian yang diperoleh selalu mengalami penurunan hingga Tahun 2023

36.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kab/Kota	2022	2023
Provinsi Sumatera Barat	70.57	71.41
Kab. Kepulauan Mentawai	67.25	68.18
Kab. Pesisir Selatan	74.72	74.77
Kab Solok	73.52	67.64
Kab Sijunjung	72.97	73.69
Kab Tanah Datar	72.39	70.65

Kab Padang Pariaman	77.75	67.31
Kab Agam	76.32	77.19
Kab Lima Puluh Kota	70.8	69.76
Kab Pasaman	73.6	67.66
Kab Solok Selatan	72.42	75.34
Kab Dharmasraya	70.58	64.74
Kab Pasaman Barat	66.82	68.85
Kota Padang	71.64	64.85
Kota Solok	72.62	73.98
Kota Sawahlunto	70.71	75.39
Kota Padang Panjang	78.76	76.11
Kota Bukittinggi	77.49	76.63
Kota Payakumbuh	75.05	78.30
Kota Pariaman	66.21	64.22

Capaian kinerja pada indikator indeks integritas pemerintah daerah kota bukittinggi berada diatas capaian nasional dan provinsi sumatera barat. dan kab/kota setiap tahunnya

36.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned}
 *Efisiensi &= 100\% - \left(\frac{\text{serapan anggaran} \times 100\%}{\text{capaian kinerja IKU}} \right) \\
 Efisiensi &= 100\% - \left(\frac{76,98\% \times 100\%}{100\%} \right) \\
 &= 100\% - 76.35 \\
 &= 23,65\%
 \end{aligned}$$

36.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp563,272,604.00	Rp456,246,177.00	81.00%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp350,699,900.00	Rp247,357,239.00	70.53%
Total Anggaran	Rp913,972,504.00	Rp703,603,416.00	76.98%

Sasaran 18 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**IKU 37 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik**

Sasaran 18 diatas diturunkan pada indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik** yang secara defenisi operasional adalah tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat mesyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

37.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	86,43	90,84	106,51 %

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintahan pada khususnya yang merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (public service). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat juga acuan bagi pemerintah daerah

untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, dengan itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara teliti, santun, responsif, akurat dan akuntabel agar menjadi penyelenggara layanan yang berkualitas.

Untuk melakukan survey menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psiometrik yang umum digunakan dalam kuesioner(angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik.

Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Untuk pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021, Pemerintah Kota Bukittinggi menentukan teknik survei dengan memilih Metode Kuesioner melalui pengisian sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah membuat dan menyebarkan kuesioner melalui unit kerja penyelenggara pelayanan publik yang memiliki pelayanan publik. Kuesioner ini sudah sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah diturunkan menjadi sembilan unsur SKM sebagai indikator.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, unsur SKM dalam peraturan ini meliputi :

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi layanan dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu penyelesaian

- Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Biaya/Tarif **)
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
 - e. Produk spesifikasi jenis pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
 - f. Kompetensi Pelaksana **)
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
 - g. Perilaku pelaksana **)
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
 - h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut.
 - i. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk suatu benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pada tahap pengolahan data, peneliti terlebih dahulu memberi nomor pada kuesioner yang telah disebar. Penomoran data di mulai dari nomor data 1 sampai seterusnya untuk semua data yang penyebarannya berada di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dalam melakukan penyebaran data, tim survei melakukan pendampingan kepada responden dalam melakukan pengisian kuesioner. Namun, pendampingan tidak mempengaruhi objektivitas responden dalam mengisi kuesioner. Untuk memudahkan pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Bukittinggi digunakan program pengolahan data melalui komputer, yang di instal pada komputer. Jenis program pengolahan data melalui computer yang merupakan "Sistem Data Base Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik". Nilai SKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan SKM terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan dikaji dan setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

	Jumlah Bobot	1	
Bobot Nilai Tertimbang	_____	=	_____ = N
=	Jumlah Unsur	X	

N= bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

	Jumlah Bobot	1	
Bobot Nilai Tertimbang	_____	=	_____ = 0,11
=	Jumlah Unsur	9	

Selanjutnya, untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur	
SKM	_____	X Nilai Penimbang
=	Total Unsur Yang Terisi	

Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

SKM Unit Pelayanan x 25

Formula SKM diatas dihitung melalui langkah-langkah berikut :

- a. Merubah huruf menjadi angka, yaitu a=1, b=2, c=3, d=4
- b. Memasukkan nilai kedalam tabel
- c. Menghitung nilai rata rata-rata (NR) tiap unsur
- d. Menghitung nilai rata-rata kali nilai timbang = nilai rata-rata tiap unsur x 0,11 (untuk 9 unsur)
- e. Menghitung nilai rata-rata dari rata-rata nilai timbang
- f. Menghitung nilai IKM – Nilai rata-rata dari nilai timbang x 25
- g. Menghubungkan nilai rata-rata keseluruhan (NRR) dengan standar, sebagaimana table kinerja berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324- 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survey kepada masyarakat. Pada tahun 2023 ini unit penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan 1 (satu) kali survey yaitu pada periode 1 Agustus sampai dengan 20 September 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 20 unsur pelayanan yang ada, 19 unsur berada pada kategori kinerja unsur pelayanan Sangat Baik dan 1 unsur berada pada kinerja unsur pelayanan Kurang Baik. Jika dilihat lebih mendalam terdapat 2 unsur memperoleh nilai tertinggi dengan perolehan nilai rata-rata sama masing- masingnya yaitu sebesar 4,000 (100) yaitu unsur pemenuhan persyaratan layanan (unsur ke-1) yang dibutuhkan dan unsur kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan (unsur ke-6). Penilaian masyarakat terhadap 2 unsur tersebut adalah sangat memuaskan, sehingga harus dipertahankan pada masa yang akan datang. Sedangkan unsur terendah terdapat 1 unsur dan berada pada kinerja unsur pelayanan Kurang Baik dan termasuk ruang lingkup unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan yaitu unsur Tata cara pengaduan layanan (unsur ke-14) memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,750 (68,75). Satu unsur terendah tersebut perlu menjadi skala prioritas perbaikan pada masa yang akan datang. Adapun alasan responden terkait unsur tersebut yaitu :

- a. Puskesmas Guguk Panjang menyediakan informasi dan sarana pengaduan di setiap unit layanan baik berupa informasi sarana dan banner. Tetapi masyarakat tidak melihat adanya unit pengaduan tersebut. Mayorita masyarakat hanya fokus terhadap aktivitas layanan yang harus dilalui. Oleh karenanya berdasarkan hasil olah data Survei Kepuasan Masyarakat di UPTD Puskesmas Guguk Panjang Kota Bukittinggi, maka diperoleh nilai SKM sebesar 91,65 termasuk dalam mutu A dan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik.

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai berkisar 87,4 sampai dengan 95,6 dengan nilai rata-rata adalah **90,84** masuk kedalam kategori **A** bernilai **Sangat Baik**.

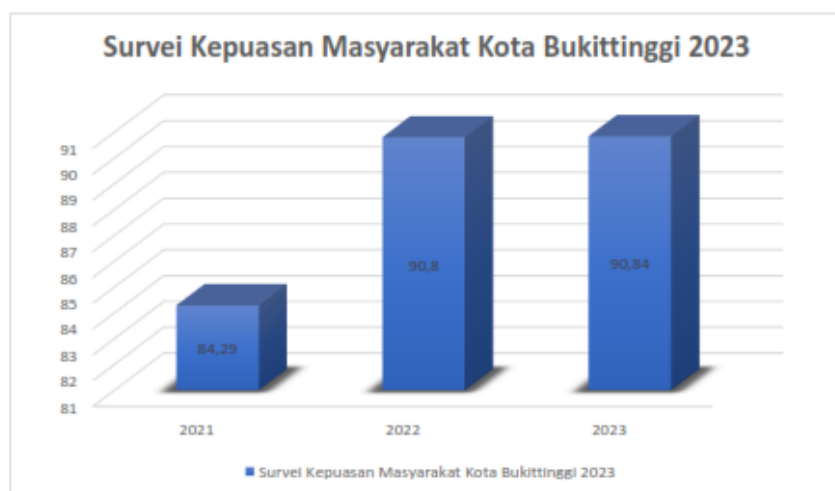
37.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 5.2 Perbandingan antara Nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik** dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	84,06	84,29	100,27
2022	85,25	90,8	106,51
2023	86,43	90,84	105,10

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2023 di lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi.

37.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil analisis data dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas sebagaimana dalam bahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa secara umum pelayanan yang telah diberikan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai berkisar 82,54 sampai dengan 97,50 dengan nilai rata-rata adalah **90,80** masuk kedalam kategori **A** bernilai **Sangat Baik**.

37.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Dari hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas terhadap unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menggunakan 9 indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dan meningkatkan pelayanan yang kurang baik secara konsisten.
2. Melakukan evaluasi dan peningkatan kompetensi pelaksana (sumber daya manusia) yang bertugas di unit pelayanan.
3. Menyediakan dan mengefektifkan loket informasi, penanganan pengaduan, masukan dan saran.
4. Memaksimalkan produk spesifikasi pelayanan (kebersihan, keamanan, kenyamanan) pada unit pelayanan.
5. Meningkatkan dan mengganti sarana dan prasarana pada unit pelayanan yang dirasa masih kurang dan telah berumur.
6. Perlu dikaji kembali besaran tarif retribusi pada unit pelayanan yang memungut retribusi agar tidak membebani masyarakat.
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

37.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= 100\% - \frac{(\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\% \text{ capaian Kinerja}} \\ &= 100\% - \frac{(96.93\% \times 100\%)}{105,1} \\ &= 7.77\% \end{aligned}$$

37.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 37.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	183.628.900	177.992.220	96.93 %

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi 2024

Sasaran 19 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

IKU 38 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)

Sasaran 19 diatas diturunkan pada indikator **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan** yang secara defenisi operasional adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan

38.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 38.1 Capaian Realisasi Indikator Kinerja **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan	19.86	17.41	87,66%

Rasio kemandirian keuangan daerah / PAD terhadap pendapatan didapatkan dari perbandingan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah, tahun 2023 realisasi PAD adalah sebesar Rp123.112.715.360,20.

Realisasi pendapatan Kota Bukittinggi sebesar Rp706.975.454.172,65, maka didapat rasio kemandirian keuangan daerah dengan cara membandingkan realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan didapat angka rasio sebesar 17,41 %. Target rasio kemandirian keuangan daerah yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 19,86 %, maka capaian adalah sebesar 87,66 %.

Jika melihat persentase diatas maka Pemerintah Kota Bukittinggi baru mampu membiayai sebesar 17,41% terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. yang artinya Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada dana eksternal berupa pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

38.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 38.2 Perbandingan antara Nilai **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan** dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan
-------	--

	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	18.83	12.20	64,79
2021	18,89	13.33	70,56
2022	21,91	18.73	85,48
2023	19,86	17,41	87,66

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2024

Jika melihat tren maka selama tiga tahun terakhir yakni sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, tingkat kemandirian Pemerintah Kota Bukittinggi masih berada pada angka 20%, pada tahun 2021 sebesar 13,32%, tahun 2022 sebesar 18,72% dan tahun 2023 kembali turun sebesar 17,41%, artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih cukup tinggi. karena tingkat kemandirian masih dalam kategori rendah, Pemerintah Daerah perlu lebih menggali lagi sumber daya yang berpotensi untuk meningkatkan PAD sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang.

38.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa penyebab rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah yakni diantaranya:

1. Penerimaan retribusi pusat pertokoan pasar atas belum dapat direalisasikan dikarenakan masih belum terdapat aturan pemungutan retribusi.
2. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) dan Taman Panorama Lobang Jepang (TPLJ) di Tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022,
3. Menurunnya kunjungan wisatawan juga berdampak pada menurunnya penerimaan dari parkir kendaraan baik parkir tepi jalan maupun tempat khusus parkir

38.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Alternatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator tidak/ belum mencapai target:

1. Melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah (BMD) gedung pasar atas yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) namun mengingat proses penilaian membutuhkan waktu yang cukup lama, maka hasil penilaian baru keluar pada Oktober 2023 sehingga nilai belum dapat digunakan pada akhir 2023 dimaksud,

2. Melakukan berbagai promosi berupa pengurangan/ diskon pada objek wisata berbayar terhadap sekolah-sekolah, program ini diyakini dapat meningkatkan penerimaan pada TMSBK,
3. Kembali melaksanakan pemungutan dengan menggunakan karcis agar tidak terjadi *lost* penerimaan namun tentu saja pelaksanaan manual punya banyak kelemahan, melakukan pemeliharaan pada sarana gedung parkir agar masyarakat tertarik untuk memarkirkan kendaraan pada gedung parkir, melakukan perencanaan peremajaan *rooftop* gedung parkir.

38.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned}
 \text{*Efisiensi} &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\
 &= 100\% - \frac{(80,05\% \times 100\%)}{87,66} \\
 &= \mathbf{0,91\%}
 \end{aligned}$$

38.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 38.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.010.337.644,00	1.609.286.526,00	80,05
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.010.337.644,00	1.609.286.526,00	80,05
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	203.874.200,00	129.017.754,00	63,28
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	56.079.000,00	38.118.550,00	67,97
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	110.882.800,00	90.859.350,00	81,94
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	95.593.208,00	91.576.016,00	95,80
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	243.750.612,00	240.328.753,00	98,60
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	74.867.704,00	59.537.839,00	79,52
Penetapan Wajib Pajak Daerah	167.313.708,00	152.537.042,00	91,17
Penagihan Pajak Daerah	923.186.612,00	691.580.361,00	74,91
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	134.789.800,00	115.730.861,00	85,86

Sasaran 20 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender**IKU 39 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Sasaran 20 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indek Pemberdayaan Gender** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemberdayaan gender berperan aktif dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan dan ekonomi.

39.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023Tabel 39.1 Capaian Indikator **Indek Pemberdayaan Gender**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indek Pemberdayaan Gender	62		

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2024

Pemberdayaan Perempuan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan United Nations Development Programs (UNDP). IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

39.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indek Pemberdayaan Gender** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 39.2 Perbandingan **Indeks Pemberdayaan Gender 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indek Pemberdayaan Gender		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2019	73.84	60.99	83%
2020	60.33	60.33	100%
2021	61.25	60.19	98%
2022	61.5	60.99	-

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 turun dari tahun sebelumnya. Realisasi capaian indikator Tahun 2021 dari data yang didapat dari Dinas DP3AP2KB Kota Bukittinggi yakni 60,99.

39.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2019	2020	2021
Kab. Agam	63,32	63,06	63,07
Kab. Dharmasraya	51,42	50,87	50,66
Kab. Kepulauan Mentawai	48,36	48,13	47,36
Kab. Lima Puluh Kota	50,18	51,09	50,59
Kab. Padang Pariaman	49,10	48,79	46,64
Kab. Pasaman	64,22	61,57	62,74
Kab. Pasaman Barat	60,88	60,16	60,38
Kab. Pesisir Selatan	55,79	56,93	53,39
Kab. Sijunjung	59,96	59,93	60,46
Kab. Solok	63,89	62,23	61,57
Kab. Solok Selatan	50,23	49,19	47,86
Kab. Tanah Datar	58,35	58,46	59,70
Kota Bukittinggi	60,99	60,33	60,19
Kota Padang	67,49	67,53	65,33
Kota Padang Panjang	66,57	65,24	66,62
Kota Pariaman	54,47	54,41	53,42
Kota Payakumbuh	67,81	71,01	71,58
Kota Sawahlunto	66,18	65,87	65,48
Kota Solok	58,47	57,46	63,09
Provinsi Sumatera Barat	59,09	58,28	65,12

Data perbandingan yang disajikan merupakan data perbandingan Tahun 2019 sampai Tahun 2021, sementara untuk Tahun 2022 data belum rilis.

39.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Memaksimalkan pelaksanaan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender:

1. Masih terbatasnya dana untuk kegiatan Kebijakan
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang profesional bidang Pengarusutamaan Gender Sumber daya
3. Masih belum pulihnya perekonomian masyarakat akibat Covid 19 Alat analisis
4. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman aparat pemerintah maupun masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender di hampir semua aspek kehidupan masyarakat di Kota Bukittinggi
5. Masih kurangnya partisipasi perempuan di lembaga legislative

39.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Alternatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target :

- a. Menyusun Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RANPERDA PP PA)
- b. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
- c. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di Kota Bukittinggi
- d. Mengoptimalkan peran Pokja PUG dan Focal Point dalam merealisasikan Anggaran Berbasis Gender melalui PPRG

39.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\ &= 100\% - \frac{(98\% \times 100\%)}{99,17} \\ &= 1,18\% \end{aligned}$$

39.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 39.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Prog/ Sub Kegiatan	Anggaran TH 2022	Realisasi Tahun 2022	%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	91,445,000	90,507,671	98%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	285,354,600	283,933,094	99.50%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	52,703,000	51,765,400	98.22%
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	17,340,000	17,340,000	100%
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	697,849,554	677,798,773	97.13
Pengembangan kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	678,049,420	663,252,271	97.81%

Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota

IKU 40 : Indeks Kenyamanan Kota

40.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 40.1 Capaian Indikator **Indeks Kenyamanan Kota**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kenyamanan Kota	3,15	3,48	110,35%

Sumber : Bapeitbang Kota Bukittinggi 2023

Indeks kenyamanan kota Bukittinggi berada pada angka 3,35 dari target 3,15 (indeks maksimal 4), ini menggambarkan bahwa keamanan pribadi, lingkungan, dan keamanan dari bencana di Kota Bukittinggi dapat diwujudkan dengan baik dan ini sangat diperlukan untuk mendukung iklim pariwisata dan investasi yang baik di Kota Bukittinggi.

40.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

pengecahan terhadap terjadinya konflik sosial dan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada yang dilaksanakan pemerintah Kota Bukittinggi melalui Kantor Kesbangpol, Satpol PP, BBPD, dan Dinas Kebakaran telah berhasil selama tahun 2022, keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator tingkat kenyamanan kota yang berada diatas target yang ditetapkan pada RPJMD untuk tahun 2022.

Sasaran 22 : Meningkatnya Kehidupan Sosial

IKU 41 : Presentase Penurunan PPKS (%)

Sasaran 22 diatas diturunkan pada indikator **Presentase Penurunan PPKS** yang secara defenisi operasional adalah Persentase jumlah PPKS tahun tertentu terhadap PPKS tahun sebelumnya.

41.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 41.1 Capaian Indikator **Presentase Penurunan PPKS**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Penurunan PPKS	2,2	0,1	4,54%

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi 2024

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

41.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 41.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	JENIS PMKS	SATU AN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Anak Balita Terlantar	Anak	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2	Anak Terlantar	Anak	28	14	42	28	14	42	28	14	42
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	Anak	5	8	13	3	5	8	9	16	25
4	Anak Jalanan	Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas	Anak	34	16	50	34	16	50	34	16	50
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak	4	-	4	5	2	7	5	2	7
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	-	2	2	-	2	2	-	2	2
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	204	246	450	204	252	456	204	252	456
9	Penyandang Disabilitas	Orang	119	72	191	358	205	563	358	205	563

NO	JENIS PMKS	SATU AN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Tuna Susila	Orang	-	1	1	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	Orang	-	-	-	37	24	61	37	24	61
12	Pengemis	Orang	1	-	1	4	2	6	4	2	6
13	Pemulung	Orang	14	5	19	14	5	19	14	5	19
14	Kelompok Minoritas	Orang	-	-	-	25	-	25	25	-	25
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	7	-	7	75	3	78	75	3	78
16	Orang Dengan HIV/AIDS	Orang	-	-	-	-	-	275	-	-	275
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	6	-	6	30	-	30	30	-	30
18	Korban Trafficking	Orang	-	-	3	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	-	-	15	-	-	21	-	-	21
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	Orang	-	-	184	-	-	197	-	-	483
22	Korban Bencana Sosial	Orang	-	-	27	-	-	20	-	-	20
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	-	632	632	-	632	632	-	632	632
24	Fakir Miskin	KK	-	-	4,977	-	-	10,083	-	-	10,083
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	KK	-	-	14	-	-	20	-	-	20
26	Komunitas Adat Terpencil	KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			28	638	6,639	817	1,162	12,595	823	1,173	12,898

41.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bukittinggi Barat saat ini cenderung mengalami peningkatan (sesuai data Dinas Sosial Provinsi) dari kuantitas, hal ini disebabkan berbagai kondisi terutama perekonomian. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dalam penanganan, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan PPKS di Kota Bukittinggi.

41.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Untuk berhasilnya sasaran Dinas Sosial dalam Mewujudkan pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas, telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran dinas sosial untuk pemenuhan Indeks Ramah Disabilitas. Diantaranya dalam penyelenggaraan program kegiatan perlindungan

sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial untuk memberikan penguatan, bimbingan, pembinaan, kepada penyandang disabilitas sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Penyebab kegagalan salah satunya belum maksimalnya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

41.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Untuk peningkatan pelayanan kepada penyandang disabilitas dilakukan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pada kantor – kantor pelayanan, perbankan, agar penyandang disabilitas mendapatkan prioritas dalam pelayanan untuk mencapai Indeks ramah disabilitas. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Kursi Roda, bantuan motor modifikasi dan Hibah melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD kepada Organisasi Disabilitas.

Pemberdayaan seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bukittinggi juga dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, serta dengan menumbuhkan wahana kesejahteraan sosial baru serta memperkuat sosialisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi pilar-pilar sosial dan PSKS lainnya, seperti Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, Penumbuhan Family Care Unit, peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Kota Bukittinggi, serta dengan terus melakukan pembinaan lanjutan terhadap kapasitas organisasi sosial, Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Yayasan dan LKS yang ada di Kota Bukittinggi serta menjalin kemitraan stakeholder terkait untuk menganggarkan dana CSR untuk menciptakan Kota Bukittinggi Ramah Disabilitas.

Setiap tahun dilakukan sosialisasi mengenai penumbuhan Family Care Unit sudah mulai dilakukan untuk menumbuhkan minat keluarga pionir (keluarga kuat) untuk membantu keluarga plasma (keluarga lemah), sehingga keluarga plasma merasakan bantuan dari keluarga pionir. Dari 17 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, 13 diantaranya sudah berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS Kota Bukittinggi termasuk pelayanan kepada disabilitas disabilitas.

Untuk itu, pada tahun mendatang diharapkan seluruh PSKS dapat berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS termasuk stakeholder yang telah menjalin kemitraan dengan Dinas Sosial, baik PSKS dari internal maupun dari masyarakat sendiri.

41.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 41.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.454.112.300	2.376.930.877	97%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2.454.112.300	2.376.930.877	97%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.769.481.100	1.723.381.296	97%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	24.911.600	23.168.350	93%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	59.392.600	52.985.140	89%
Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	561.981.000	553.263.691	98%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	38.346.000	24.132.400	63%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	962.057.596	804.087.640	84%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	727.935.596	612.882.490	84%
Penyediaan Permakanan	92.160.000	89.369.600	97%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga, Pengemis dan masyarakat	309.693.600	286.844.050	93%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	43.770.700	43.466.300	99%
Pemberian Layanan Kedaruratan	167.738.004	115.319.968	69%
Pemberian Layanan Rujukan	114.573.292	77.882.572	68%

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	234.122.000	191.205.150	82%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.244.100	731.1	59%
Pemberian Layanan Kedaruratan	45.073.000	32.393.000	72%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	187.804.900	158.081.050	84%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.267.084.208	4.558.377.126	87%
Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	53.183.600	44.131.298	83%
Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak Terlantar	53.183.600	44.131.298	83%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	5.213.900.608	4.514.245.828	87%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	361.079.400	337.146.515	93%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.066.670.708	1.778.184.584	86%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.786.150.500	2.398.914.729	86%

Sasaran 23 : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

IKU 42 : Indeks Pembangunan Keluarga

Sasaran 23 diatas diturunkan pada indikator **Indeks Pembangunan Keluarga** yang secara defenisi operasional adalah Indeks komposit dari aspek ketentraman keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahagiaan keluarga

42.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 42.1 Capaian Kinerja Indikator **Indeks Pembangunan Keluarga**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga	59	63,2	106,22

Realisasi capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bukittinggi Tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 106.22%

42.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 42.2 Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	56,5	53,57	94,81%
2022	58	53,57	92,36
2023	59,5	63,2	106,22

Dari data di atas, realisasi Indeks Pembangunan Keluarga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Pencapaian realisasi sebesar 106.22% yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target tahun 2023 adalah sebesar 59,5 dengan pencapaian realisasi 63.2.

42.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 42.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kab/Kota di Sumatera Barat

Kab/ Kota	2022	2023
Prov. Sumatera Barat	56,10	60,99
Kota Bukittinggi	58,76	63,20
Kab. Lima Puluh Kota	55,08	61,58

Pembangunan Keluarga merupakan isu lintas sektor (cross cutting issue) artinya pembangunan keluarga menjadi tanggung jawab lintas sektor kementerian/ lembaga di Indonesia. Capaian keberhasilan Program Pembangunan Keluarga diukur menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). iBangga menjelaskan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. iBangga memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga di Indonesia untuk mewujudkan kualitas keluarga. Dengan adanya iBangga maka suatu wilayah dapat diketahui keberhasilan terkait program pembangunan keluarga di wilayahnya.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian realisasi Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah 63.20 melebihi dari capaian Provinsi Sumatera Barat yaitu 60.99.

42.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Pembangunan keluarga merupakan salah satu bagian mikro guna mencapai sasaran makro peningkatan IPM. Peningkatan pelaksanaan pembangunan keluarga dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup anak, remaja, lansia, pemberdayaan keluarga rentan,

peningkatan kualitas lingkungan keluarga, peningkatan usaha mikrokeluarga dan bantuan peralatan bagi usaha mikro.

42.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Adanya Peraturan di Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, Terdapatnya lintas sektor yang melaksanakan tugas pembangunan keluarga. Terdapat peran serta organisasi kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

42.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Efisiensi = 100% - (serapan anggaran x 100 %)

$$= 100\% - \frac{(92,74\% \times 100\%)}{106,22} = 0,87\%$$

42.7 Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 41.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
Program Pengendalian Penduduk	90,538,500	83,371,280	92.08%
Program Pembinaan Keluarga Berencana	3,313,571,866	3,025,077,704	91.29%
Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,939,936,508	1,847,489,393	95.23%
J U M L A H	5,344,046,874	4,955,938,377	92.74%

Sasaran 24 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat

IKU 43 : Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran 24 diatas diturunkan pada indikator **Indeks Ketahanan Pangan** yang secara defenisi operasional adalah Indeks komposit dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

43.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 43.1 Capaian Kinerja Indikator **Indeks Ketahanan Pangan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan	89.50	85.1	95.08%

Tahun 2023 target Indeks Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi adalah 89,50 dengan realisasi 85,1 dan capaian 95,08.

43.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 43.2 Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	89.17	88.90	99.70
2022	89.33	84,66	94.77
2023	89.50	85.1	95.08

Tahun 2021 target Indeks Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi adalah 89,17 dengan realisasi 88,9 dan capaian 99,70, sedangkan tahun 2022 target Indeks Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi adalah 89,33 dengan realisasi 84,66 dan capaian 94,77. Sedangkan tahun 2023 target Indeks Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi adalah 89,50 dengan realisasi 85,1 dan capaian 95,08. Angka ini tidak tercapai lebih dari target disebabkan karena masih tingginya inflasi kota Bukittinggi sehingga menyebabkan harga pangan menjadi tinggi sehingga kecenderungan konsumsi masyarakat Bukittinggi menjadi tidak beragam, Konsumsi masyarakat Bukittinggi menjadi tidak beragam mengakibatkan tidak terjaminnya mutu dan keamanan pangan yang ditunjukkan dengan naiknya bahan pangan terkontaminasi diatas ambang batas akibat tingginya harga pangan, Serangan hama pada produksi pertanian sehingga menurunnya produksi dan ketersediaan pangan, Tingginya inflasi menyebabkan tingginya harga BBM sehingga sulitnya distribusi pangan antar wilayah menyebabkan tidak terjaminnya stabilitas pengadaan pangan, Perubahan pola konsumsi pangan rumahtangga atau pola konsumsi yang instan seperti banyak makan mi, goreng-gorengan, sehingga kecenderungan konsumsi masyarakat Bukittinggi menjadi tidak beragam, tidak berkembangnya diversifikasi usaha rumahtangga akibat faktor ekonomi dan tingginya inflasi.

43.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

1. Hal ini disebabkan karena adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait pola konsumsi B2SA dan kecenderungan konsumsi masyarakat Bukittinggi yang beragam

2. Konsumsi masyarakat Bukittinggi menjadi tidak beragam mengakibatkan tidak terjaminnya mutu dan keamanan pangan yang ditunjukkan dengan naiknya bahan pangan terkontaminasi diatas ambang batas akibat tingginya harga pangan
3. Serangan hama pada produksi pertanian sehingga menurunnya produksi dan ketersediaan pangan
4. Tingginya inflasi menyebabkan tingginya harga BBM sehingga sulitnya distribusi pangan antar wilayah menyebabkan tidak terjaminnya stabilitas pengadaan pangan
5. Perubahan pola konsumsi pangan rumahtangga atau pola konsumsi yang instan seperti banyak makan mi, goreng-gorengan, sehingga kecendrungan konsumsi masyarakat Bukittinggi menjadi tidak beragam
6. Tidak berkembangnya diversifikasi usaha rumahtangga akibat faktor ekonomi dan tingginya inflasi

43.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

1. Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan kembali dalam Renja tahun 2025.
2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

43.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\ &= 100\% - \frac{(62,1\% \times 100\%)}{95,08} \\ &= 3,27\% \end{aligned}$$

43.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 41.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	442.849.100	409.224.150	92,41%

PANGAN MASYARAKAT			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	14.692.400	14.044.250	95,59%
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	23.825.000	2.452.000	10,29%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	404.331.700	392.727.900	97,13%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	21.120.000	20.259.100	95,92%
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21.120.000	20.259.100	95,92%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	18.590.000	14.328.800	77,08%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	18.590.000	14.328.800	77,08%
TOTAL	482.559.100	443.812.050	91,97%

Sasaran 25 : Terwujudnya Pertanian Kota Yang Berkelanjutan

IKU 44 : Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan

Sasaran 25 diatas diturunkan pada indikator **Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan** yang secara defenisi operasional adalah Indeks komposit dari dimensi ekomoni, dimensi sosial, dan dimensi ekologi kegiatan pertanian

44.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 44.1 Capaian Kinerja Indikator Indeks Komposit Pertannian Berkelanjutan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan	74	73	98.64%

tahun 2023 target Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan adalah 74 dengan realisasi 73,00 dan capaian 98,64%. Angka ini tidak tercapai lebih dari target namun angka ini meningkat dari tahun lalu sebesar 1,47.

44.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 44.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	70	70.85	101.2142857

2022	72	71.53	99.35
2023	74	73	98.64

Tahun 2021 target Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan adalah 70 dengan realisasinya 70,85 dan capaian 101,2 %, tahun 2022 target Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan adalah 72 dengan realisasi 71,53 dan capaian 99,35%. Sedangkan tahun 2023 target Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan adalah 74 dengan realisasi 73,00 dan capaian 98,64%. Angka ini tidak tercapai lebih dari target namun angka ini meningkat dari tahun lalu sebesar 1,47. Hal ini disebabkan karena Pertanian kota Bukittinggi telah mensosialisasikan kepada petani agar menerapkan pertanian organik untuk dapat meminimalisir penggunaan pestisida kimia sehingga tanaman yang ditanam menjadi tanaman sehat, Mensosialisasikan kepada peternak-peternak ayam/itik agar mengusahakan peternakan miliknya jauh dari pemukiman dan lingkungan masyarakat banyak untuk menghindari pencemaran udara karena bau kotoran ayam/ itik. Hal ini selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitarnya, Pengendalian Hama Terpadu merupakan suatu pendekatan untuk mengendalikan hama yang dikombinasikan dengan metode-metode biologi, budaya, fisik dan kimia, dalam upaya untuk meminimalkan; biaya, kesehatan dan resiko-resiko lingkungan.

Menerapkan sistem pengelolaan budidaya rumput intensif yang baru adalah dengan memberikan tempat bagi binatang ternak di luar areal pertanian pokok yang ditanami rumput berkualitas tinggi, dan secara tidak langsung dapat menurunkan biaya pemberian pakan. Selain itu, rotasi dimaksudkan pula untuk memberikan waktu bagi pematangan pupuk organik. Areal peternakan yang dipadukan dengan rumput atau kebun buah-buahan dapat memiliki keuntungan ganda, antara lain ternak dapat menghasilkan pupuk kandang yang merupakan pupuk untuk areal pertanian. Optimalisasi lahan dan pekarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya secara tepat, menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dan keberpihakan pasar pada petani serta menjaga petani tetap sehat, sejahtera dan semangat agar terus berproduksi. Menerapkan metode konservasi lahan termasuk penanaman alur, mengurangi atau tidak melakukan pembajakan lahan, dan pencegahan tanah hilang baik oleh erosi angin maupun erosi air.

Menjaga Kualitas Air/Lahan Basah karena lahan basah berperan penting dalam melakukan penyaringan nutrisi (pupuk anorganik) dan pestisida. Menanam tanaman pelindung yang dapat menyediakan beberapa manfaat termasuk menekan pertumbuhan gulma (weed), pengendalian erosi, dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Melakukan diversifikasi Lahan dan Tanaman sehingga dapat mengurangi kondisi ekstrim dari cuaca, hama pengganggu tanaman, dan harga pasar. Peningkatan diversifikasi tanaman dan jenis tanaman lain seperti pohon-pohon dan rumput-rumputan, juga dapat

memberikan kontribusi terhadap konservasi lahan, habitat binatang, dan meningkatkan populasi serangga yang bermanfaat. Pengelolaan nutrisi tanaman dengan baik yang dapat meningkatkan kondisi tanah dan melindungi lingkungan tanah. Peningkatan penggunaan sumberdaya nutrisi di lahan pertanian, seperti pupuk kandang dan tanaman kacang-kacangan (sebagai penutup tanah dapat mengurangi biaya pupuk anorganik yang harus dikeluarkan).

44.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa hal diantaranya :

1. Memberikan bantuan benih dan pakan ikan kepada pembudidaya ikan, memberikan bimbingan dan pembinaan teknis tentang cara budidaya yang baik dan cara pengolahan hasil perikanan, dan lomba forikan tk kota, provinsi dalam rangka menggalakkan gemarikan dan peningkatan konsumsi ikan.
2. Walaupun dengan lahan terbatas produksi dapat ditingkatkan karena pertama menggunakan teknologi tepat guna antara lain dengan sistim bioflok yaitu dengan pemanfaatan lahan sempit dapat ditebar benih ikan dengan jumlah yang besar dengan pemberian pakan yang komposisinya sesuai, yang kedua dengan memberikan rangsangan kepada Pokdakan berupa bantuan benih dan pakan ikan serta melakukan peningkatan SDM petani ikan dalam bentuk studi banding dan pelatihan teknis, yang ketiga banyaknya kelompok memanfaatkan lahan kosong dan lahan terlantar menjadi kolam ikan, yang keempat adanya kelompok yang bergerak dibidang usaha pembesaran lele dalam 1(satu) bulan sudah bisa dipanen.
3. Melakukan intensifikasi pertanian
4. Pembinaan terhadap kelompok tani gapoktan dan LKMA
5. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi dan penanggulangan hama
6. Memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian alsintan

44.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Beberapa hall diantaranya:

1. Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan kembali dalam Renja tahun 2025.
2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

44.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned}
 \text{*Efisiensi} &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\
 &= 100\% - \frac{(91,7\% \times 100\%)}{98,64} \\
 &= 5.55\%
 \end{aligned}$$

44.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 414.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Persentase
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	667.086.212	596.852.969	89,47%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD Balai Benih Ikan Hias)	312.096.612	244.916.469	78,47%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Dinas Pertanian dan Pangan)	354.989.600	351.936.500	99,14%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	415.883.008	334.300.300	80,38%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	415.883.008	334.300.300	80,38%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.999.068.804	1.885.642.592	94,33%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	610.096.600	572.717.894	93,87%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.355.107.904	1.281.924.598	94,60%
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.900.000	16.817.800	93,95%
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.964.300	14.182.300	88,84%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.331.321.400	1.287.338.619	96,70%
Pengembangan Prasarana Pertanian	14.650.000	12.114.840	82,70%
Pembangunan Prasarana Pertanian	1.316.671.400	1.275.223.779	96,85%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	584.037.792	562.563.984	96,32%
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.263.136	49.927.136	92,01%
Pengelolaan Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas)	286.826.448	277.894.796	96,89%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD RPH)	242.948.208	234.742.052	96,62%

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	606.110.180	553.697.608	91,35%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	606.110.180	553.697.608	91,35%
TOTAL	5.603.507.396	5.220.396.072	93,16%

III.4 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan guna mendukung kinerja turut ditopang dengan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaannya. Berikut disajikan Realisasi anggaran utama tahun 2023 yang mendukung langsung ataupun tidak langsung pencapaian 11(sebelah) tujuan, 23 (dua puluh tiga) sasaran dan 44 (empat puluh empat) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi setelah perubahan adalah sebesar Rp. 733,692,996,334.00 dengan realisasi sebesar Rp. 706,975,454,172.65 atau dengan persentase realisasi sebesar 96.36%.

Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)
PENDAPATAN DAERAH	733,692,996,334.00	706,975,454,172.65	96.36
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	137,413,209,479.00	123,112,715,360.20	89.59
Pajak Daerah Retribusi Daerah	53,610,644,633.00	51,690,816,406.00	96.42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	51,990,259,000.00	39,222,055,481.00	75.44
	8,307,425,308.00	8,363,843,874.00	100.68
	23,504,880,538.00	23,835,999,599.20	101.41
PENDAPATAN TRANSFER	596,279,786,855.00	583,728,726,369.00	97.90
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	558,512,589,194.00	554,987,256,154.00	99.37
Dana Perimbangan	529,660,216,194.00	526,134,883,154.00	99.33
Dana Insentif Daerah (DID)	28,852,373,000.00	28,852,373,000.00	100.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37,767,197,661.00	28,741,470,215.00	76.10
Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan	37,767,197,661.00	28,741,470,215.00	76.10
	0.00	0.00	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	134,012,443.45	0
	0.00	134,012,443.45	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan BELANJA	811,015,184,022.00	751,239,962,696.31	92.63
	721,468,847,488.00	667,764,935,144.91	92.56
	331,188,392,484.00	308,535,703,099.00	93.16

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)
DAERAH	336,418,334,978.00	308,199,944,742.03	91.61
BELANJA OPERASI	2,500,000,000.00	2,499,916,363.00	100.00
Belanja Pegawai	46,304,120,026.00	43,676,370,940.88	94.33
Belanja Barang dan Jasa Belanja	5,058,000,000.00	4,853,000,000.00	95.95
Subsidi	79,095,716,534.00	74,023,558,551.40	93.59
Belanja Hibah	29,030,076,880.00	26,111,089,608.47	89.94
Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL	27,930,651,811.00	27,005,206,763.60	96.69
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,726,432,153.00	19,501,037,779.33	94.09
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,408,555,690.00	1,406,224,400.00	99.83
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,000,000,000.00	849,000.00	0.08
Belanja Modal Lainnya	1,000,000,000.00	849,000.00	0.08
Aset Tetap Lainnya	9,450,620,000.00	9,450,620,000.00	100.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	9,450,620,000.00	9,450,620,000.00	100.00
Belanja Tidak Terduga BELANJA TRANSFER			
Belanja Bantuan Keuangan			
SURPLUS / DEFISIT	(77,322,187,688.00)	(44,264,508,523.66)	0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77,322,187,688.00	77,322,181,688.46	100.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	77,322,187,688.00	77,322,181,688.46	100.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0
Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00	0
PEMBIAYAAN NETTO	77,322,187,688.00	77,322,181,688.46	100.00

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2024

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pemerintah Kota Bukittinggi secara berkesinambungan membangun serius dan berkomitmen tinggi atas terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil dan *output* dari implementasi SAKIP dapat dilihat dengan jelas dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bukittinggi.

LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2023 berhasil menyajikan keberhasilan dan kemajuan maupun kendala yang dihadapi dalam capaian setiap sasaran strategis melalui target Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan setiap IKU telah dibandingkan perkembangannya dari tahun ke tahun. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen yang ada termasuk, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* termasuk kondisi pandemi Covid-19 yang melanda.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Sesuai dengan rekomendasi atas *reviu* LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inpektorat Kota Bukittinggi yang dituangkan ke dalam laporan hasil reviu nomor 8/LHP-REV/Insp-Bkt/2022 Tanggal 21 Maret 2022 disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Format

1. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target RPJMD dan standar nasional untuk LKjIP mendatang.
2. Mempertajam analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dengan tidak hanya menyajikan upaya peningkatan keberhasilan yang telah dilakukan saja tetapi disebutkan juga faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan atau tidak berhasilnya suatu pencapaian kinerja.
3. Membuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menyebutkan secara jelas sumber daya yang diefisiensikan dan berapa kalkulasinya (khusus untuk efisiensi anggaran).

4. Memastikan realisasi anggaran yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah sama dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 hasil Reviu Inspektorat Kota Bukittinggi.
5. Menyusun Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja yang diformalkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan diedarkan ke seluruh SKPD untuk menyamakan pemahaman, pola pikir dan format laporan kinerja, baik sistematika, penulisan, pemakaian huruf, spasi, ukuran kertas dan lain sebagainya yang diperlukan, sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil reviu tahun yang lalu.
6. Memperbaiki dan mempertajam narasi sehingga serta mencantumkan sumber data pada setiap data sekunder yang disajikan sehingga laporan kinerja dapat dipahami oleh pembaca laporan.

B. Mekanisme Penyusunan

1. Menetapkan penanggungjawab pengumpulan data dan informasi kinerja di tingkat Pemerintah Kota Bukittinggi dan di setiap SKPD untuk menjamin kehandalan data dan informasi kinerja yang dilaporkan, sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil reviu tahun-tahun yang lalu.
2. Menyusun mekanisme pelaporan dan kinerja dalam bentuk formal SOP dan diedarkan kepada seluruh SKPD, sehingga memudahkan dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya, sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil reviu tahun-tahun yang lalu.
3. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan semester untuk melihat kemajuan pencapaian sasaran strategis dan memudahkan dalam menyusun laporan kinerja tahunan, sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil *reviu* tahun-tahun yang lalu.

C. Substansi

1. Menyempumakan semua data yang tidak sesuai dan tidak selaras dalam laporan Kinerja dan dokumen terkait, baik dengan menyamakan indikator kinerja, target dan realisasi serta capaian kinerja termasuk analisisnya secara lebih mamadai
2. Melengkapi semua kekurangan data, baik yang belum valid atau yang belum *up to date* sehingga data dan informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja bisa diandalkan dan valid.
3. Menetapkan skala pengukuran capaian kinerja secara formal dengan keputusan Walikota Bukittinggi dan bisa dijadikan pedoman/ acuan yang jelas bagi SKPD dalam menyusun LKJIP SKPD.

D. Penelaahan Penyelenggaraan SAKIP

Meningkatkan penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Kota Bukittinggi baik perbaikan sistem yang terus menerus, pemantapan pencapaian kinerja dengan orientasi

outcome, penggunaan teknologi informasi yang optimal, pemanfaat sistem yang terintegrasi, peningkatan mekanisme pengumpulan data kinerja, membentuk bank data untuk kevalidan sumber data, dan sebagainya.

E. Tindak Lanjut hasil *reviu*

1. Menindaklanjuti hasil *reviu* tahun yang lalu untuk poin-poin yang masih belum ditindaklanjuti sebelumnya.
2. Menindaklanjuti hasil *reviu* ini segera setelah Laporan Hasil *Reviu* ini diterima.

Menindaklanjuti LHE *Reviu* Inspektorat diatas, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai leading unit *dalam* penyusunan dokumen LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2023 telah melakukan beberapa perbaikan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan sebagai berikut :

A. Format

1. Dalam menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target RPJMD dan standar nasional untuk LKjIP mendatang, telah dilakukan penurunan analisis dengan melakukan perbandingan capaian realisasi masing-masing IKU dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 dan yang juga telah diturunkan pada Perwako IKU Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026.
2. Guna mempertajam analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dengan tidak hanya menyajikan upaya peningkatan keberhasilan yang telah dilakukan saja tetapi disebutkan juga faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan atau tidak berhasilnya suatu pencapaian kinerja, telah dilakukan oleh Bagian Organisasi melalui surat penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Nomor 061/ 05/ Org/I-2023 Tanggal 13 Januari 2023, yang didalamnya juga dilampirkan pedoman penyusunan LKjIP Tahun 2023.
3. Telah dilakukan upaya membuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menyebutkan secara jelas sumber daya yang diefisienkan dan berapa kalkulasinya (khusus untuk efisiensi anggaran), sesuai dengan surat penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Nomor 061/ 05/ Org/I-2023 Tanggal 13 Januari 2023, yang didalamnya juga dilampirkan pedoman penyusunan LKjIP Tahun 2023.
4. Untuk memastikan realisasi anggaran yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah sama dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 hasil *Reviu* Inspektorat Kota Bukittinggi, bagian organisasi meminta realisasi anggaran yang juga disampaikan pada dokumen yang disampaikan ke Bagian Organisasi.
5. Telah dilakukan penyusunan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja yang untuk menyamakan pemahaman, pola pikir dan format laporan kinerja, baik sistematika, penulisan, pemakaian huruf, spasi, ukuran kertas dan lain sebagainya yang diperlukan

namun belum diformalkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan diedarkan ke seluruh SKPD hanya disampaikan dalam bentuk surat yakni pada surat penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Nomor 061/ 05/ Org/I-2023 Tanggal 13 Januari 2023, yang didalamnya juga dilampirkan pedoman penyusunan LKjIP Tahun 2022.

6. Bagian organisasi juga terus berkomunikasi dengan perangkat daerah pengampu IKU untuk memperbaiki dan mempertajam narasi sehingga serta mencantumkan sumber data pada setiap data sekunder yang disajikan sehingga laporan kinerja dapat dipahami oleh pembaca laporan.

B. Mekanisme Penyusunan

1. Telah dilakukan penetapan penanggungjawab pengumpulan data dan informasi kinerja di tingkat Pemerintah Kota Bukittinggi dan di setiap perangkat daerah untuk menjamin kehandalan data dan informasi kinerja yang dilaporkan, sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil reuiu tahun-tahun yang lalu yang dituangkan melalui Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45 – 246 - 2022, tanggal 18 Oktober 2022, tentang Tim penyusun tim penanggung jawab data dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dipertegas melalui Surat Sekretaris daerah Nomor 061/ 416/ Org/ XI – 2022 Tanggal 1 November 2022 perihal SK Tim Penyusun LKjIP dan Penanggungjawab data dan Dokumen LKjIP.
2. Sudah dilakukan mekanisme pelaporan dan kinerja dalam bentuk formal SOP dan diedarkan kepada seluruh PD, sehingga memudahkan dalam penyusunan Laporan Kinerja namun belum disampaikan ke Perangkat Daerah.
3. Belum dilakukan menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan semester untuk melihat kemajuan pencapaian sasaran strategis dan memudahkan dalam menyusun laporan kinerja tahunan.

C. Substansi

1. Belum dilakuka menyempurnaan semua data yang tidak sesuai dan tidak selaras dalam laporan Kinerja dan dokumen terkait, baik dengan menyamakan indikator kinerja, target dan realisasi serta capaian kinerja termasuk analisisnya secara lebih mamadai mengingat untuk hal diatas dibutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan Bapelitbangda Kota Bukittinggi.
2. Terkait dengan kelengkapan data, jelang dirampungkannya penyusunan LKjIP beberapa Perangkat Daerah pengampu IKU terus melengkapi semua kekurangan data, baik yang belum valid atau yang belum *up to date* sehingga data dan informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja bisa diandalkan dan valid terkait dengan data yang dikeluarkan oleh Instansi lain seperti Kementerian dan BPS.

D. Penelaahan Penyelenggaraan SAKIP

Untuk memberikan penguatan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan SAKIP Kota Bukittinggi perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Kota Bukittinggi baik perbaikan sistem yang terus menerus, pemantapan pencapaian kinerja dengan orientasi *outcome*, penggunaan teknologi Informasi yang optimal, pemanfaatan system yang terintegrasi, peningkatan mekanisme pengumpulan data kinerja, membentuk bank data untuk kevalidan sumber data, dan sebagainya. Hal ini akansangat terkait dengan koordinasi lintas Perangkat Daerah seperti Bapelitbangda selaku leading SAKIP Kota Bukittinggi, Inspektorat Daerah selaku pengawas internal SAKIP, dan Sekretariat Daerah selaku Koordinator dan penyusun dokumen LKjIP Kota Bukittinggi.

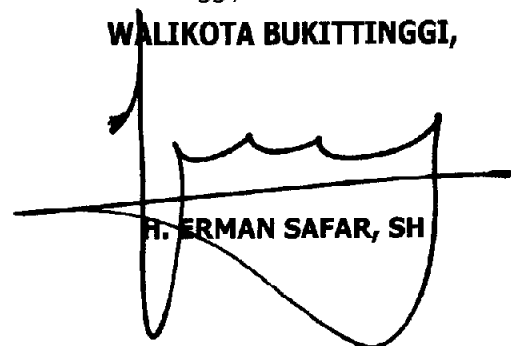
E. Tindak Lanjut hasil revid

1. Terkait tindak lanjut revid Bagian organisasi dengan keterbatasan sumber daya yang ada tetap berupaya kiranya penyajian LKjIP Kota Bukittinggi setiap tahunnya mampu memberikan laporan yang dapat dipahami dan memiliki keakuratan dan terukur terhadap capaian dari perjanjian kinerja daerah yang telah diperjanjikan diawal tahunnya.
2. Terhadap tindaklanjut dari hasil *revid* tahun yang lalu telah dilakukan upaya dan tindaklanjut perbaikan, walaupun masih terdapat beberapa perbaikan yang belum dilaksanakan dengan baik.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Revid* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bukittinggi, Maret 2024

WALIKOTA BUKITTINGGI,



H. ERMAN SAFAR, SH